

# LAKIN 2019

Laporan Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Pulau Cinta, Gorontalo



**KANWIL DJEN  
PERBENDAHARAAN  
PROVINSI GORONTALO**

## KATA PENGANTAR

Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara diterbitkan sebagai upaya dalam menghubungkan antara aspek penganggaran sebagai sumber daya dengan aspek akuntabilitas dalam rangka menerapkan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh dalam sistem penganggaran. Selanjutnya untuk lebih baiknya pelaksanaan akuntabilitas pemerintah sekaligus penyelarasan antara aspek perencanaan, penganggaran, dan akuntabilitas, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana disebutkan bahwa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja (LAKIN).

LAKIN sebagai salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Gorontalo merupakan sebagai Instansi Vertikal Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, menyusun LAKIN yang berisi berbagai capaian kinerja atas target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019 dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sehingga seluruh pihak yang mempunyai kepentingan dapat mengetahui hasil dan capaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan selama tahun 2019.

Semoga LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 dapat menjadi media pertanggungjawaban kepada pihak eksternal dan secara internal dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan terus-menerus dalam rangka meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo di masa yang akan datang.

Gorontalo, 28 Januari 2020  
Kepala Kanwil,

  
Fahma Sari Fatma

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung visi Ditjen Perbendaharaan, yaitu untuk menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai instansi vertikal di daerah memiliki tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mempunyai visi, yaitu "Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional". Untuk mewujudkan visi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melaksanakan misi yang meliputi: (1) Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal; (2) Mendukung pelaksanaan anggaran yang tepat waktu efektif dan akuntabel; (3) Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu; (4) Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan modern.

Visi dan misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tergambar dalam Peta Strategi Kemenkeu -*Two* Kanwil DJPB yang terdiri dari 12 Sasaran Strategis yaitu: (1) Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional; (2) Tercapainya pelayanan publik yang prima; (3) Tercapainya kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi; (4) Terwujudnya layanan unggulan yang prima; (5) Terwujudnya pembinaan yang berkesinambungan; (6) Terciptanya fungsi pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal, dan tepat waktu; (7) Terwujudnya pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal; (8) Terwujudnya akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu; (9) Terwujudnya SDM yang kompeten; (10) Terciptanya organisasi yang fit for purpose; (11) Terwujudnya pengelolaan sarana dan TIK yang optimal; (12) Terwujudnya pengelolaan anggaran yang berkualitas yang kesemuanya itu dikelompokkan kedalam 4 perspektif yaitu : Stakeholder Perspektif, Customer Perspektif, Internal Process Perspektif dan Learning and Growth Perspektif.

12 Sasaran Strategis dirinci lebih spesifik kedalam 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis atau kinerja. Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai, dan semuanya itu dituangkan kedalam Kontrak Kinerja yang akan dituangkan dalam sebagai gambaran pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2019, secara keseluruhan capaian kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sudah sangat baik di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai adalah sebesar 109,36. Dari 19 IKU Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun

2019, seluruhnya telah memenuhi target dengan rincian capaian sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain:

1. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L terealisasi sebesar 94,35 dari target 88;
2. Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil terealisasi sebesar 95,91 dari target 89;
3. Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil terealisasi sebesar 99,47 dari target 94;
4. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil terealisasi sebesar 4,74 dari target 4,53;
5. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal terealisasi 100% dari target 98,1%;
6. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 100% dari target 100%;
7. Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN terealisasi sebesar 96,77 dari target 88;
8. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi terealisasi sebesar 91,66 dari target 86;
9. Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI terealisasi sebesar 100% dari target 95%;
10. Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 96,48 dari target 89;
11. Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN terealisasi sebesar 96,86 dari target 75;
12. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker terealisasi sebesar 96,47% dari target 90%;
13. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program terealisasi sebesar 100 dari target 78;
14. Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah terealisasi sebesar 95,16 dari target 77;
15. Nilai rata-rata hard competency pegawai terealisasi sebesar 89,9 dari target 77;
16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 86,9 dari target 83;
17. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* terealisasi sebesar 93,27 dari target 83;
18. Persentase pengelolaan BMN yang optimal terealisasi sebesar 96,32% dari target 92%
19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil terealisasi sebesar 99,53% dari target 95%;

B. Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah:

1. (N I H I L)

Pada sisi pengelolaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah merealisasikan penyerapan DIPA TA 2019 untuk semua jenis belanja sebesar 99,82%, yaitu Rp. 3.808.326.934. dari total pagu sebesar Rp. 3.815.166.000. Kualitas pemanfaatan anggaran tidak direfleksikan dengan sekedar menyerap pagu anggaran, tetapi memperhitungkan juga ketercapaian *output* serta upaya efisiensi penyerapannya. Pemanfaatan anggaran harus memberikan dampak yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga telah menghasilkan berbagai capaian membanggakan selama tahun 2019, antara lain sebagai Peringkat Pertama Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah Terbaik Semester I Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil, Peringkat Kedua Lomba Implementasi Pengarustamaan Gender Tingkat Kementerian Keuangan, Peringkat Pertama Lomba Implementasi Pengarustamaan Gender Unit Vertikal Tingkat Ditjen Perbendaharaan, Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinasi Kuasa BUN Kantor Wilayah DJPb Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil, Peringkat Kedua Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Terbaik (LKPK-TW dan LSKP-TW) Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil, Peringkat Ketiga Implementasi Pengelolaan Kinerja berbasis *Strategy Focussed Organization* Tahun 2019.

Perbaikan terhadap organisasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai inovasi atas manajemen dan pelayanan, peningkatan integritas pegawai, dan peningkatan pengelolaan kinerja. Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai akan terus ditingkatkan sehingga dapat mengantarkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mewujudkan visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional.



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii	
DAFTAR ISI	v	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
	C. Peran Strategis	6
	D. Sistematika Laporan	7
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>8</b>
	A. Rencana Strategis	9
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	12
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>19</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi	20
	B. Realisasi Anggaran	96
	C. Kinerja Lainnya	100
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
	▪ Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019	
	▪ Rencana Kinerja Tahunan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019	
	▪ Rencana Kerja dan Anggaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

- A. LATAR BELAKANG
- B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
- C. PERAN STRATEGIS
- D. SISTEMATIKA LAPORAN

**A. LATAR  
BELAKANG**

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah instansi vertikal eselon II Direktorat Jendral Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Diterktur Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Oraganisasi dan Tata Kerja Insransi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Provinsi membawahi 2 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), yaitu KPPN Tipe A1 Gorontalo dan KPPN Tipe A2 Marisa dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Gorontalo dan 6 Kabupaten/ Kota meliputi Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, dan Kabupaten Boalemo. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melaksanakan tugasnya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

LAKIN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



**B.TUGAS,  
FUNGSI,  
DAN  
STRUKTUR  
ORGANISASI**

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan lingkup kerja satuan kerja dan pemerintah daerah yang berada di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara. Berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Insransi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan, serta menyelenggarakan fungsi- fungsi:

- a. penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
- c. penyusunan reuiu belanja pemerintah (*spending review*) dan reuiu pelaksanaan anggaran;
- d. pembinaan teknis sistem akuntansi;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
- f. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
- g. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- i. pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
- j. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- k. pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah;
- l. pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN);
- m. pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
- n. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
- o. pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Infrmasi Publik(KIP);
- p. pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- q. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- r. pelaksanaan kepatuhan internal; dan
- s. pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

Dalam rangka menjalankan fungsi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo didukung oleh unit-unit eselon III, yang meliputi 1 Bagian, 4 Bidang dan 2 KPPN. Unit-unit tersebut bekerja sesuai reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif dan fokus. Adapun susunan organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terdiri dari :

- a. Bagian Umum;
- b. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
- c. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
- d. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
- e. Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, dukungan sarana dan prasarana kerja, melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan, tata usaha, rumah tangga, kehumasan dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP), protokoler pimpinan, dan pengelolaan kinerja.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran pemerintah pusat, penganggaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta melaksanakan penyusunan reviu atas pelaksanaan dan analisis kinerja anggaran belanja pemerintah pusat.

Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II mempunyai tugas melaksanakan asistensi dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran daerah, investasi pemerintah, pinjaman, kredit program, dana transfer, dan pelaksanaan anggaran belanja daerah, serta melaksanakan Kajian Fiskal Regional, analisis kinerja anggaran belanja daerah, koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah, serta layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah.

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem akuntansi pemerintahan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, melaksanakan monitoring, evaluasi, dan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tingkat Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN), melaksanakan penyusunan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintah (PUSAP), melaksanakan penyusunan statistik keuangan sesuai dengan *Government Finance Statistics* (GFS), serta melaksanakan analisis atas laporan keuangan.

Bidang Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan proses bisnis, supervisi, implementasi dan bimbingan teknis operasional aplikasi pada KPPN, melaksanakan koordinasi mutu pelayanan dan inovasi, penilaian kinerja dan pemenuhan standar tata kelola KPPN, melaksanakan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, melaksanakan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, pembinaan pertanggungjawaban bendahara dan pengelolaan rekening pemerintah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*) serta pelaporan pelaksanaan tugas Pembinaan Pengelola Perbendaharaan (*treasury relationship representative*)

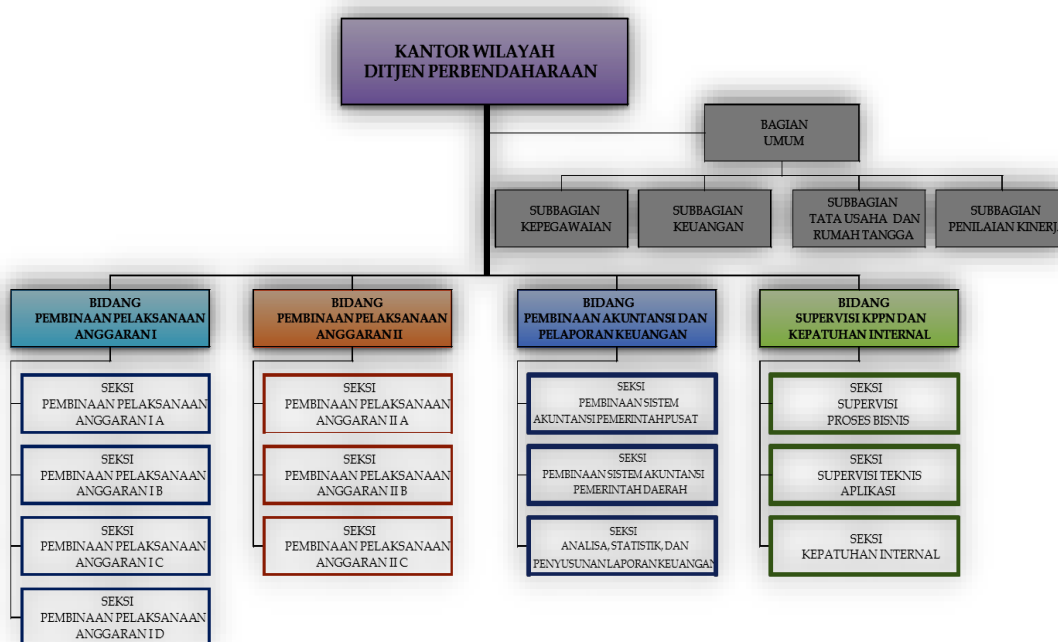
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, di wilayah kerjanya membawahi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang berlokasi di wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain:

1. KPPN Gorontalo berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 58 Kota Gorontalo;
2. KPPN Marisa berkantor di Jalan Pelabuhan Marisa Kabupaten Pohuwato.

Sebagai bagian dari unsur Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada hakekatnya merupakan representasi dari Kementerian Keuangan dalam melaksanakan amanat seluruh rakyat Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan penerimaan dan belanja negara. Oleh karena itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam menyelenggarakan tugas/kegiatannya berdasarkan/sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Struktur Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi seperti pada bagan di bawah berikut ini.

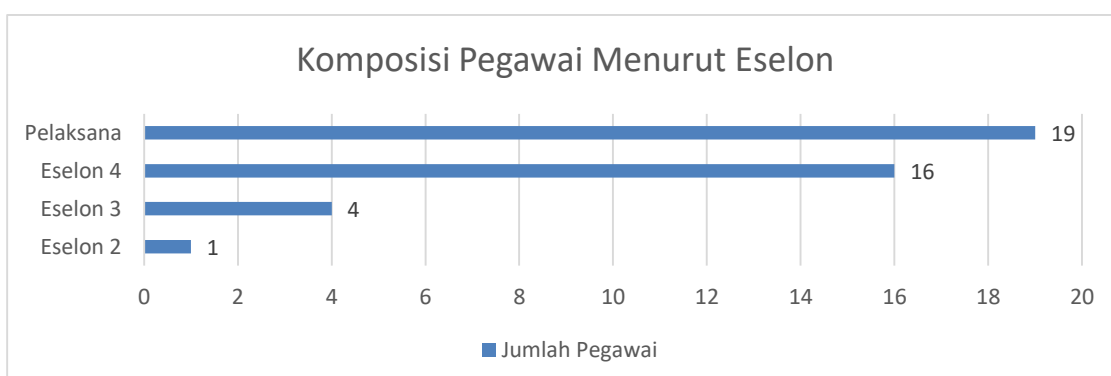
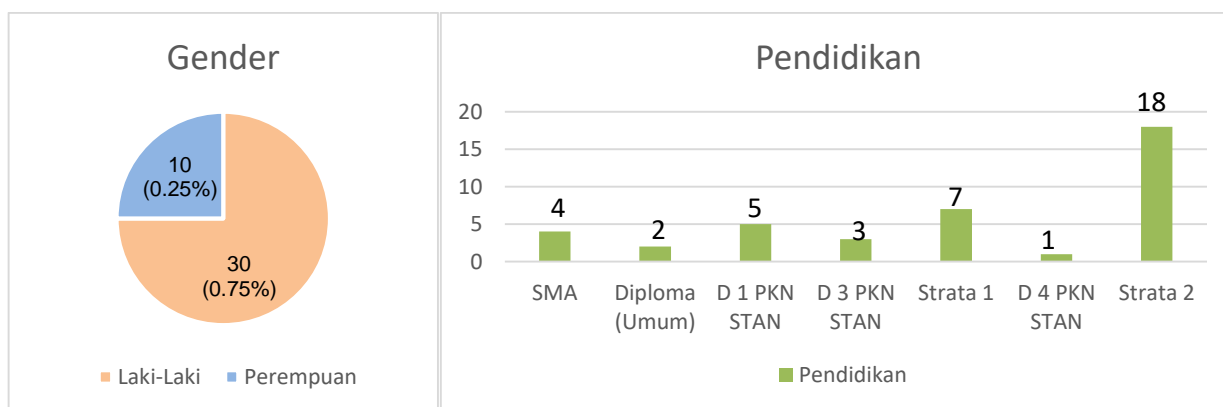
GAMBAR 1.1

Bagan Struktur Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo



Sumber  
Daya  
Manusia  
Kanwil  
Ditjen  
Perbendah  
araan  
Provinsi  
Gorontalo

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Jumlah SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terdiri dari berbagai macam kompetensi menjadi tantangan dalam pengelolaan SDM terutama dalam menempatkan staf pelaksana dalam rangka mengisi formasi yang dibutuhkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik. SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo per 31 Desember 2019 adalah sejumlah 40 orang dengan rincian sebagai berikut:



### C. PERAN STRATEGIS

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai pengelola perbendaharaan negara di wilayah kerjanya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Sebagai perpanjangan tangan dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Provinsi Gorontalo mempunyai posisi yang strategis yaitu:

1. Sebagai Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan di wilayah Provinsi Gorontalo;
2. Sebagai wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi Kuasa BUN di Daerah;
3. Sebagai ujung tombak Pelayanan Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo harus senantiasa berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sesuai dengan ketentuan/prosedur yang berlaku, serta mampu menguasai bidang tugasnya dan memiliki pengetahuan dan keterampilan (*hard skill*) serta integritas/moralitas (*soft skill*) yang memadai dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaan sekaligus meningkatkan kualitas hasil kerja.

Keberhasilan mengemban peran strategis dipengaruhi oleh unsur di luar lingkup organisasi dalam hal ini adalah budaya kerja serta komunikasi maupun koordinasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga mengambil peran penting dalam mendukung salah satu visi pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dengan cara aktif bertugas melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, khususnya alokasi anggaran untuk program-program prioritas yang memiliki manfaat ekonomi demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga mengambil peran penting dalam mewujudkan program pemerintah antara lain:

1. Mengentaskan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan dalam upaya membina pengelolaan bantuan langsung ke masyarakat serta pembinaan layanan kredit usaha mikro (Umi).
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan berperan dalam mensukseskan program pembangunan kawasan perdesaan melalui pembinaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Konsep keterpaduan menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. sehingga memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas

keseharian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual sehingga mampu meningkatkan peran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait fungsi distribusi, stabilisasi, dan alokasi dalam menciptakan kondisi fiskal negara yang sehat dan berkesinambungan.

Sistematika penyajian LAKIN Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### *Capaian Kinerja Organisasi*

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

#### *Realisasi Anggaran*

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### *Kinerja Lain-Lain*

### **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **Lampiran**

Perjanjian Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahunan 2019, serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019.

# **BAB II**

## PERENCANAAN KINERJA

- A. RENCANA STRATEGIS
- B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA



**A. RENCANA  
STRATEGIS**

Sebagai unit vertikal dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Kanwil Ditjen Provinsi Gorontalo harus mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi dan mampu mengikuti segala dinamika perubahan yang terjadi, baik perubahan struktur, sistem, budaya kerja maupun perubahan-perubahan lainnya yang bersifat strategis. Dalam rangka menghadapi perubahan kondisi nasional yang cepat dan dinamis, sebagaimana yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis yang mengacu pada Rancana Strategis (Renstra) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah menetapkan Visi yaitu :

*Visi dan Misi*

**“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Unggul Di Tingkat Regional”.**

*Kanwil Ditjen  
Perbendaharaan Provinsi  
Gorontalo*

**Pengelola perbendaharaan negara** artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

**Unggul** memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja.

**Di tingkat regional** artinya kualitas kinerja yang dihasilkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat menjadikan rujukan bagi pengelolaan perbendaharaan negara oleh unit-unit lain di tingkat wilayah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Perbendaharaan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel ;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
4. Mengembangkan kapasitas pendukung sisten perbendaharaan yang andal, professional, dan modern ;

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Ditjen Perbendaharaan menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019. Tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo difokuskan untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan *best practices*, transparan, dan akuntabel. Tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tersebut adalah:

1. Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional;
2. Tercapainya pelayanan publik yang prima;
3. Tercapainya kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi;
4. Terwujudnya Pelayanan Unggulan yang prima;

5. Terwujudnya Pembinaan yang berkesinambungan;
6. Terciptanya fungsi Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal, dan tepat waktu;
7. Terwujudnya Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal;
8. Terwujudnya Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
9. Terwujudnya SDM yang kompetitif;
10. Terciptanya Organisasi yang *fit for purpose*;
11. Terwujudnya Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal;
12. Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang optimal.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 beserta hasil reviunya, tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat dikelompokan dalam 12 (dua belas) tema pokok dengan tujuan strategis yang jelas dan terukur sebagai berikut:

1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L target sebesar 88;
  - b. Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil dengan target sebesar 89;
  - c. Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil dengan target sebesar 94.
2. Pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja:
  - a. Indeks kepuasan satker terhadap layanan kanwil dengan target sebesar 4,53 (skala 5);
3. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal dengan target sebesar 98,1%;
4. Pemenuhan layanan unggulan yang prima dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran satker yang diselesaikan tepat waktu dengan target sebesar 100%;
5. Pembinaan yang berkesinambungan dengan indikator kinerja:
  - a. Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN dengan target sebesar 88;
  - b. Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi dengan target sebesar 86;
  - c. Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI dengan target sebesar 95%;
6. Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal, dan tepat waktu dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai kualitas laporan rewiu pelaksanaan anggaran Kanwil dengan target sebesar 89;

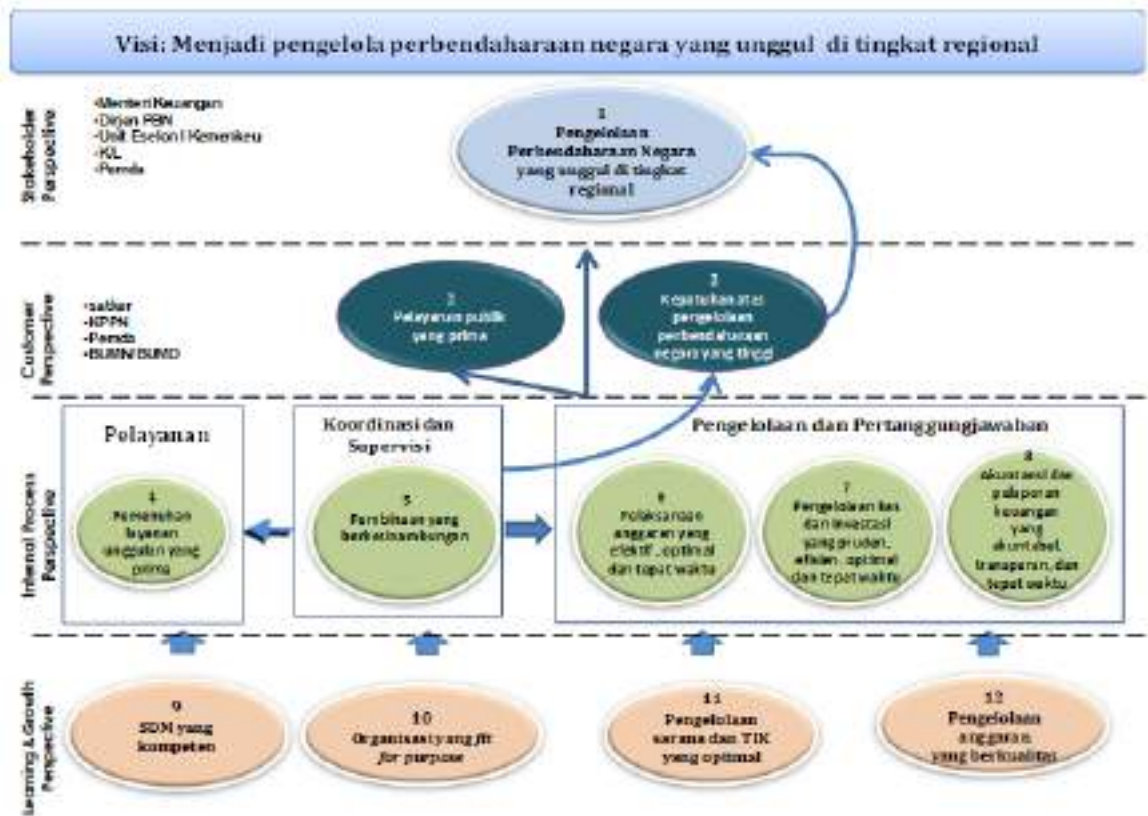
- b. Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN dengan target sebesar 75;
- 7. Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase akurasi rencana penarikan dana satker dengan target sebesar 90%;
  - b. Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan target sebesar 78;
- 8. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah dengan target sebesar 77;
- 9. SDM yang kompetitif dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai rata-rata hard competency pegawai dengan target sebesar 77;
- 10. Organisasi yang fit for purpose dengan indikator kinerja:
  - a. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal dengan target sebesar 83;
  - b. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization dengan target sebesar 83;
- 11. Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase pemenuhan BMN yang optimal dengan target sebesar 92%;
- 12. Pengelolaan anggaran yang optimal dengan indikator kinerja:
  - a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil dengan target sebesar 95%;

**B. PENETAPAN/  
PERJANJIAN  
KINERJA**

Penetapan Kinerja tahun 2019 yang merupakan Kontrak Kinerja Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dengan Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 19 (delapan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1.

**GAMBAR 2.1**

Peta Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019



Peta Strategi  
Perbendaharaan  
Gorontalo Tahun  
2019

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

**1. Stakeholders Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang *stakeholder* (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas *output* atau *outcome* dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

**2. Customer Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan *customer* (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap *customer*. *Customer* merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

### **3. Internal Process Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi *stakeholder* dan *customer* (*value chain*).

### **4. Learning and Growth Perspective**

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan *output* atau *outcome* organisasi yang sesuai dengan harapan *customer* dan *stakeholder*.

Dua belas sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif dapat untuk tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Stakeholders perspective* terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu:

**a. Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional**

Pengelolaan perbendaharaan negara artinya Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Unggul di tingkat regional memiliki makna bahwa pengelolaan perbendaharaan negara oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan perbendaharaan negara oleh unit-unit lain di tingkat wilayah.

2. *Customer perspective* terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu:

**a. Pelayanan publik yang prima**

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan *customer* (pelanggan) terhadap layanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Pelayanan publik yang prima didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan Kanwil Ditjen perbendaharaan yang telah memenuhi atau melebihi harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah. Adapun pengguna layanan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terdiri dari Kementerian Negara/Lembaga (satker) dan Pemda.

**b. Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi**

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan di bidang pengelolaan perbendaharaan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja/KL lingkup Kanwil dalam melakukan rekonsiliasi tingkat UAKPA.

3. *Internal process perspective* terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, yaitu:

**a. Pemenuhan layanan unggulan yang prima**

Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau



pelayanan administratif yang disediakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

**b. Pembinaan yang berkesinambungan**

Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo perlu melakukan pembinaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan satuan kerja di wilayah kerjanya secara berkala.

**c. Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu**

Pelaksanaan anggaran yang efektif adalah anggaran dilaksanakan oleh satker K/L sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Optimal berarti bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sedangkan tepat waktu adalah anggaran dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran K/L yang efektif dan optimal, dengan cara melakukan pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran.

Pengelolaan perbendaharaan negara yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan dan perbendaharaan berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran

**d. Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, optimal dan tepat waktu**

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya *cash mismatch*, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi *idle cash* secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal.

**e. Akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu**

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini.

4. *Learning and growth perspective* terdiri atas 4 (empat) sasaran strategis, yaitu:

**a. SDM yang kompetitif**

SDM yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

**b. Organisasi yang *fit for purpose***

Organisasi yang *fit for purpose* tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik.

**c. Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal**

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit. Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien.

**d. Pengelolaan anggaran yang optimal**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap

memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Pada tahun 2019, 12 (dua belas) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

**TABEL 2.2**  
Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	89
		1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94
2.	Pelayanan publik yang prima	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,53 (skala 5)
3.	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
4.	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Pembinaan yang berkesinambungan	5a-N Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	88
		5b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86
		5c-N Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	95%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal, dan tepat waktu	6a-N Nilai kualitas laporan reuiv pelaksanaan anggaran Kanwil	89
		6c-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75
7.	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	7a-N Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%
		7b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	78
8.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	8a-N Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	77
9.	SDM yang kompetitif	9a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
10.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	10a-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		10b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83
11.	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	11a-N Persentase pemenuhan BMN yang optimal	92%
12.	Pengelolaan anggaran yang optimal	12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak (Perjanjian) Kinerja Tahun 2019, dalam upaya mencapai 12 (dua belas) sasaran strategis tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo didukung pendanaan yang dibagi ke dalam 4 (empat) jenis kegiatan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3.

**TABEL 2.3**  
Pendanaan Per Kegiatan untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

No	Kegiatan	Anggaran
Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah (015.08.09.1706)		
1.	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah (1706.003)	Rp. 142.102.000
2.	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah (1706.009)	Rp. 450.814.000
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1706.951)	Rp. 319.388.000
4.	Layanan Perkantoran (1706.994)	Rp. 2.902.862.000
	Jumlah	<b>Rp. 3.815.166.000</b>

Adapun rincian atas pendanaan dan kinerja lebih lanjut diuraikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran, pada Lampiran III LAKIN ini.

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN
- C. KINERJA LAINNYA

**A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

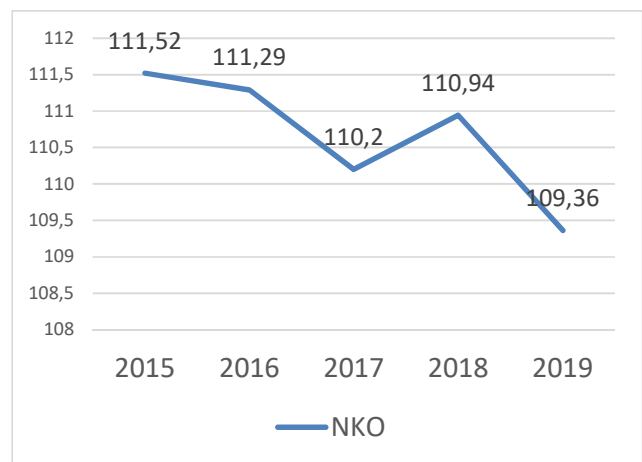
Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian **Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 109,36**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1.

PERSPECTIVE	BOBOT	NILAI
STAKEHOLDER	25%	108,22
CUSTOMER	15%	103,29
INTERNAL PROCESS	30%	114,00
LEARNING AND GROWTH	30%	108,69
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI</b>		<b>109,36</b>

**TABEL 3.1**  
Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif  
Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai tertinggi terdapat pada *Internal Process Perspective*. Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo ditunjukkan pada Grafik 3.1.

Nilai Kinerja Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.1, dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, NKO Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengalami sedikit penurunan dari tahun ke tahun dengan penurunan signifikan dari tahun 2016 ke tahun 2017. Namun pada tahun 2018 terdapat kenaikan sebesar 0,74. Kemudian, pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 109,36. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan mendasar pada beberapa target namun secara umum masih melampaui seluruh target yang telah ditetapkan. Capaian 19 IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.2.



**GRAFIK 3.1** NKO Ditjen Perbendaharaan

Penjelasan capaian IKU secara detail dijelaskan pada tabel berikut :

**TABEL 3.2**  
Capaian IKU Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Capaian IKU Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama (bobot)	Target	Realisasi	Nilai
<i>Stakeholder Perspective (25%)</i>				27,06%
1	Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia			108,22
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	93,93	107,22
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	89	95,91	107,76
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	99,47	105,82
<i>Customer Perspective (15%)</i>				15,49%
2	Pelayanan publik yang prima			104,64
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,53	4,73	104,64
3	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi			101,94



3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,94
<i>Internal Process Perspective (30%)</i>				34,20%
4	Pemenuhan layanan unggulan yang prima			100
4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100
5	Pembinaan yang berkesinambungan			110,82
5a-N	Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	88	96,77	109,97
5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86	91,76	106,58
5c-N	Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	95%	100%	105,26
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal, dan tepat waktu			118,54
6a-N	Nilai kualitas laporan reuiv pelaksanaan anggaran Kanwil	89	96,48	108,40
6c-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75	96,86	120
7	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal			120,65%
7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%	96,47%	107,19
7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	78	100	120
8	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu			120
8a-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	77	95,16	120
<i>Learning and Growth Perspective (30%)</i>				32,61%
9	SDM yang kompetitif			116,75
9a-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77	89,90	116,75
10	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>			108,54
10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	86,90	104,70
10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	93,27	112,37
11	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal			104,70
11a-N	Persentase pemenuhan BMN yang optimal	92%	96,32%	104,70
112	Pengelolaan anggaran yang optimal			104,77
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	99,53%	104,77
<b>NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)</b>				<b>109,36</b>

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2, realisasi seluruh IKU Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo (19 IKU) telah mencapai target yang telah ditentukan. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Sasaran  
Strategis 1:

Pengelola  
perbendaharaan  
negara yang  
unggul di tingkat  
regional

Sesuai dengan visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, *Pengelola Perbendaharaan Negara* artinya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. *Unggul di tingkat regional* memiliki makna bahwa kualitas kinerja yang dihasilkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat menjadikan rujukan bagi pengelolaan perbendaharaan negara oleh unit-unit lain di tingkat wilayah. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.3.

TABEL 3.3

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

*Pengelola Perbendaharaan Negara Yang Unggul di Tingkat regional*

**SS1 : Pengelola Perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	94,35	107,22
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	89	95,91	107,76
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	95	99,47	105,82

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

1a-CP Nilai kinerja  
pelaksanaan  
anggaran K/L

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain:

- (1) kesesuaian dengan perencanaan,
- (2) efektivitas pelaksanaan anggaran,
- (3) efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan
- (4) kepatuhan terhadap regulasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L** merupakan salah satu IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang juga menjadi IKU *Kemenkeu-One* Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan IKU *Kemenkeu-Wide* Kementerian Keuangan tahun 2019 dan dimulai pada tahun 2015. IKU ini disusun dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran satker. Selain itu, IKU ini bertujuan untuk mengetahui kinerja satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L didapatkan dengan menggabungkan nilai keempat variabel tersebut dengan penjelasan masing-masing variabel sebagai berikut:

1. **Kesesuaian dengan Perencanaan (diberi bobot 15%):** dihitung dari 3 (tiga) variable yaitu :
  - a. Revisi DIPA (REV) dengan bobot 5%
  - b. Deviasi Halaman III DIPA (HAL3) dengan bobot 5%
  - c. Pagu Minus (MIN) dengan bobot 5%

**Revisi DIPA** dihitung berdasarkan jumlah revisi anggaran K/L per satker. Data revisi DIPA yang digunakan adalah untuk data revisi yang bersifat pergeseran (dalam hal pagu tetap). indeks kinerja terkait revisi DIPA yang dihitung dengan menggunakan formula =  $(100/\text{Rasio Revisi DIPA})$ , dengan ketentuan: (i) Rasio Revisi DIPA merupakan Total Revisi DIPA/Jumlah DIPA; (ii) Total Revisi



DIPA merupakan jumlah frekuensi revisi DIPA secara kumulatif s/d periode triwulan bersangkutan dan (iii) Jumlah DIPA merupakan jumlah DIPA Petikan satker dikali dengan batasan maksimal frekuensi revisi DIPA yang diperkenankan s/d periode triwulan bersangkutan yaitu 1x untuk Triwulan I, 2x untuk Triwulan 2, 3x untuk Triwulan III, serta 4x untuk Triwulan IV. Revisi yang diperhitungkan dalam pengukuran capaian IKU adalah seluruh revisi pergeseran anggaran dalam hal pagu tetap (kode jenis revisi 2XX) yang dilaksanakan oleh Kanwil, Direktorat Pelaksanaan Anggaran, dan Direktorat Jenderal Anggaran. Dengan ketentuan, apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai lebih dari 100, maka nilainya dikonversi menjadi 100.

**Deviasi Halaman III DIPA** dihitung berdasarkan rata-rata gap antara realisasi dengan rencana penarikan dana. Angka gap per bulan yang diambil bernilai absolut sehingga dalam perhitungan rata-rata gap tidak saling meniadakan. Indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, dihitung dengan formula =  $1 - \text{rata2 per bulan } [(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$ , dengan ketentuan: (i) Jreal merupakan nilai total realisasi anggaran, (ii) Jrenc merupakan jumlah rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil  $[(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$  maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil  $[(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$  menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi. (v) hasil  $[(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$  bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus).



rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA, (iii) hasil  $[(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$  maksimal bernilai 1, serta (iv) dalam kondisi hasil  $[(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$  menunjukkan #DIV/0, maka nilainya dikonversi menjadi 1 apabila ada nilai realisasi dan menjadi 0 apabila tidak ada nilai realisasi. (v) hasil  $[(j\text{real}-j\text{renc})/j\text{renc}]$  bernilai absolut (mengabaikan tanda plus atau minus).

**Pagu Minus** dihitung berdasarkan persentase pagu minus terhadap pagunya. Nilai tersebut dapat ditunjukkan dengan formulasi berikut:

$$\text{Kalkulasi} = \left( \frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

Bobot **5%**

Sub Kriteria  
100 - Rasio pagu minus

**2. Efektivitas Pelaksanaan Anggaran (diberi bobot 45%):** dihitung dari 3 (tiga) variable yaitu :

- a. Retur SP2D (RTR) dengan bobot 5%
- b. Penyerapan Anggaran (REAL) dengan bobot 20%
- c. Penyelesaian Tagihan (TAG) dengan bobot 20%

**Retur SP2D** dihitung dengan membandingkan jumlah retur SP2D dengan jumlah SP2D yang terbit

$$\text{Kalkulasi} = \left( \frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$$

Bobot **5%**

Sub Kriteria  
100 - Rasio Retur SP2D

$$\text{Kalkulasi} = \left( \frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

Bobot **20%**

Sub Kriteria  
sesuai dengan rasio tagihan tepat waktu

**Penyerapan Anggaran** dihitung berdasarkan persentase realisasi anggaran terhadap pagunya. Target penyerapan anggaran K/L untuk Triwulan I sebesar 15%, Triwulan II 40%, Triwulan III sebesar 60% dan Triwulan IV sebesar 90%, K/L dengan tingkat realisasi diatas target per triwulan ke atas diberikan nilai maksimal.

**Penyelesaian Tagihan** dihitung berdasarkan rasio penyelesaian tagihan yang tepat waktu dibagi dengan seluruh SPM LS Non Belanja Pegawai (yang tepat waktu dan terlambat) yang terdapat dalam set data. Tagihan dianggap tepat waktu apabila diselesaikan pembayarannya paling lama 17 HK setelah muncul hak (BAST/BAP/BAPP).



**3. Efisiensi Pelaksanaan kegiatan (diberi bobot 10%):** dihitung dari 2 (dua) variable yaitu :

- a. Pengembalian/Kesalahan SPM (SPM) dengan bobot 5%
- b. Perencanaan Kas (RPD) dengan bobot 5%



**Pengembalian/Kesalahan SPM** dihitung berdasarkan rasio pengembalian SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan Kementerian Negara/Lembaga. Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak KPPN.

**Perencanaan Kas** dihitung berdasarkan rasio renkas yang tepat waktu disampaikan sesuai nilai rencana penarikan dan kategori KPPN terhadap seluruh Renkas yang disampaikan ke KPPN.



**4. Kepatuhan terhadap regulasi (diberi bobot 30%):** dihitung dari 4 variable yaitu :

- a. Data Kontrak (KTR) dengan bobot 10%
- b. Pengelolaan UP (PUP) dengan bobot 10%
- c. Rekon LPJ Bendahara (LPJ) dengan bobot 5%
- d. Dispensasi Penyampaian SPM (DSPM) dengan bobot 5%

**Data Kontrak** dihitung berdasarkan rasio data kontrak yang disampaikan tepat waktu terhadap seluruh kontrak yang disampaikan ke KPPN. data kontrak dinyatakan disampaikan tepat waktu apabila disampaikan maksimal 5 HK setelah ditandatangani.





**Rekon LPJ Bendahara** dihitung berdasarkan rasio LPJ Bendahara yang tepat waktu disampaikan terhadap seluruh LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN. Penyampaian LPJ Bendahara dinyatakan tepat waktu apabila disampaikan paling lambat tanggal 10 setelah bulan pelaporan.

**Pengelolaan UP** dihitung berdasarkan jumlah GUP yang tepat waktu dibagi seluruh Total SPM GUP. Pertanggungjawaban UP dinyatakan dipertanggungjawabkan secara tepat waktu apabila disampaikan tidak lebih dari 1 bulan sejak tanggal SPM UP atau tanggal SPM GUP terakhir.



**Dispensasi Penyampaian SPM** dihitung berdasarkan rasio dispensasi SPM terhadap seluruh SPM yang diterbitkan K/L. Jumlah SPM yang diterbitkan K/L termasuk jumlah SPM yang salah/ditolak.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L kemudian dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran} &= (0,15 \times \text{Kesesuaian dengan Perencanaan}) + \\ &+ (0,45 \times \text{Efektivitas Pelaksanaan Anggaran}) + \\ &+ (0,1 \times \text{Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan}) + \\ &+ (0,3 \times \text{Kepatuhan terhadap regulasi}) \end{aligned}$$

Dengan demikian, Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L dapat diformulasikan secara IKPA= [ 5% (REV) + 5% (HAL3) + 5% (RTR) + 20% (REAL) + 20% (TAG) + 5% (SPM) + 5% (RPD) + 10% (KTR) + 10% (PUP) + 5% (LPJ) + 5% (DSPM) + 5% (MIN) ] x 100



Keterangan:

IKPA	=	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L
REV	=	Indeks kinerja terkait revisi DIPA
HAL3	=	Indeks kinerja terkait akurasi rencana penarikan dana sebagaimana tertuang dalam halaman III DIPA
RTR	=	Indeks kinerja terkait level retur SP2D
REAL	=	Indeks penyerapan anggaran DIPA K/L
TAG	=	Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyelesaian tagihan
SPM	=	Indeks kinerja terkait pengembalian SPM yang diajukan satker
RPD	=	Indeks kinerja terkait akurasi penyampaian RPD harian satker K/L,
KTR	=	Indeks kinerja terkait ketepatan waktu penyampaian data kontrak
PUP	=	Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu pertanggungjawaban UP
LPJ	=	Indeks kinerja terkait dengan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara
DSPM	=	Indeks kinerja terkait dispensasi penyampaian SPM
MIN	=	Indeks kinerja terkait pagu minus

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU  
Tahun 2019

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 88 sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019. Target IKU tersebut sama dengan target yang ditentukan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perbendaharaan 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 untuk tahun 2019. Dengan menimbang pergerakan ekonomi tahun 2019, target IKU tahun 2019 tersebut masih *challenging*.

Realisasi  
tahun 2019

Mulai triwulan II tahun 2018, perhitungan capaian IKU ini mengalami perubahan mengikuti formula pada Aplikasi OMSPAN dengan penambahan *variable* pagu minus dan dispensasi SPM. Realisasi IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2019 adalah 94,35. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L tahun 2019 triwulanan, yaitu 87,06% (triwulan I), 89,08% (triwulan II), 92,39% (triwulan III), dan 94,55% (triwulan IV) yang diperoleh dengan uraian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4.

**TABEL 3.4**  
Capaian IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2019

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target KK	88	88	88	88	88	Maximize/ Average
Realisasi	92,18	94,11	94,41	96,68	94,35	
Nilai Capaian	104,75	106,94	107,28	108,60	107,22	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.4, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 94,35 tersebut melampaui target IKU sebesar 88 (dengan nilai capaian 107,22) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019. Selain itu, setiap realisasi triwulanan juga melampaui target *trajectory* triwulanan yang telah ditetapkan dengan capaian tertinggi pada triwulan IV karena unsur penyerapan anggaran meningkat pada triwulan IV.

Meskipun target IKU tercapai, terdapat beberapa isu yang perlu mendapat perhatian karena dianggap membuat capaian IKU tersebut kurang optimal dan menjadi tantangan di antaranya:

1. Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan hal baru bagi satuan kerja pengelola dana APBN. Banyak satuan kerja yang belum memahami kepentingan penilaian IKPA, faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian dan cara perhitungan yang telah ditetapkan pada IKPA.
2. Pemahaman satker terkait batas waktu penyampaian data kontrak ke KPPN masih rendah sehingga banyak keterlambatan.
3. Masih terdapat beberapa satker yang terlambat dalam melakukan pertanggungjawaban UP/TUP.
4. Dibeberapa satker masih terjadi deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana dalam HAL 3 DIPA.
5. Masih terdapat beberapa satker yang terlambat menyelesaikan tagihan LS Non Kontraktual lebih dari 17 hari kerja setelah ditandatanganinya BAST/BAP/BAPP.

Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran antara lain:

1. Tidak ada sanksi dalam peraturan terkait, sehingga pelanggaran dilakukan berulang-ulang oleh satuan kerja;
2. Kepatuhan/ketertiban/disiplin satker yang masih rendah dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan anggaran, khususnya terkait percepatan penyelesaian tagihan jatuh tempo dan uang persediaan (UP);
3. Tidak konsistennya K/L dalam melaksanakan perencanaan.
4. Pada saat melakukan pembinaan langsung ke Satker ataupun pelaksanaan FGD dan sosialisasi para peserta ataupun yang bisa ditemui hanyalah pihak operator/bendahara dan paling tinggi PPK. Pihak KPA paling susah ditemui/hadir dikarenakan kesibukannya ataupun sering tidak berada di tempat yang membuat pelaksanaan kegiatan tidak berlangsung optimal.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Menghimbau kepada satker apabila terdapat pekerjaan yang memerlukan juknis KL dan pejabat perbendaharaan agar segera ditindaklanjuti;
2. Membuat Surat Edaran terkait langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran 2019;
3. Menyusun langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran lingkup Kanwil DJPb Gorontalo yang di proyeksikan untuk dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran strategis.
4. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara langsung (*on the spot*) pada satuan kerja yang memperoleh nilai IKPA kurang baik.
5. Melakukan pemantauan/pengawasan melalui aplikasi OM SPAN ataupun MEBE PA kemudian melakukan himbauan kepada seluruh satker untuk dapat meningkatkan nilai IKPA

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu dengan meningkatkan strategi edukasi dan komunikasi kepada satker dengan mengintensifkan pelaksanaan monev dan pemberian apresiasi kepada satker berkinerja terbaik untuk meningkatkan awareness dan motivasi satker.

Untuk diketahui bahwa IKU Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L merupakan IKU baru di tahun 2019 sekaligus menjadi penyempurna dari IKU sebelumnya yakni Presentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L. Meskipun hasilnya belum dapat dibandingkan, namun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berharap agar perkembangan capaian IKU ini dapat terus diperbaiki dan mencapai hasil yang memuaskan.

**1b-N** Nilai  
kualitas  
Laporan  
Kajian  
Fiskal  
Regional  
Kanwil

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memiliki fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi, serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah sebagai Pengelola Fiskal. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diharapkan dapat memiliki data, informasi dan kemampuan untuk menganalisis dan menyajikan laporan kajian fiskal tingkat wilayah (regional). Sesuai ketentuan SE-61/PB/2017, setiap Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) secara periodik (triwulanan) dan menyampaikan laporan tersebut kepada kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Kajian Fiskal Regional pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Kajian Fiskal tingkat wilayah. Penilaian KFR dilakukan secara Semesteran. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian KFR, meliputi: Ketepatan waktu penyampaian laporan (5%); Kesesuaian dengan petunjuk dan contoh penyajian sebagaimana diatur dalam SE (10%); Kelengkapan, relevansi, dan kualitas data (35%); Kualitas analisis (40%); Teknik penyajian dan estetika (10%). Kategori nilai Kajian Fiskal Regional Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 5 = 91-100 (Excellent), Level 4 = 75-90 (Good), Level 3 = 61-74 (Fair), Level 2 = 41-60 (Poor), Level 1 = 0-40 (Unqualified)

Pengisian realisasi disesuaikan dengan siklus dan karakteristik Laporan KFR yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU semester I tahun 2019 merupakan hasil penilaian Laporan KFR tahunan 2018, dan untuk realisasi IKU semester II tahun 2019 merupakan hasil penilaian Laporan KFR semester I tahun 2019. Selanjutnya nilai realisasi IKU tersebut diperoleh dari hasil penilaian Laporan Kajian Fiskal Regional oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah rata-rata realisasi setiap periode).

*Target  
tahun 2019*

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 89 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019. Target tersebut meningkat dari target dalam kontrak kinerja tahun sebelumnya (2018), yaitu 87.

Target IKU tersebut juga lebih kecil dibandingkan dengan target yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 (ditargetkan 90,25).

*Realisasi  
tahun  
2019*

Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Tahun 2019 adalah 95,91. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil tahun 2019 semester I, yaitu 96,90 semester II sebesar 94,92 berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : ND-1023/PB/2019 tanggal 25 Desember 2019 hal Penyampaian Hasil Penilaian Kajian Fiskal Regional (KFR) Tahun 2019 Tingkat Wilayah.. Realisasi IKU per semester tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.5.

**TABEL 3.5**  
Perhitungan Realisasi IKU *Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil*  
Tahun 2019

URAIA N	Semester I	Semester II
Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	96,90	94,92
Rata-rata semester I-II	<b>95,91</b>	

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.6.

**TABEL 3.6**  
Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil tahun 2019

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	89	89	89	Maximize/ Average
Realisasi	96,90	94,92	95,91	
Nilai	108,88	106,65	107,76	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.6, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 95,91 tersebut melampaui target IKU sebesar 89 (dengan nilai capaian 107,76) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2019 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.7.

**TABEL 3.7**  
Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil Tahun 2016 s.d. 2019

Tahun	Realisasi			Target
	Smt I	Smt II	Tahunan	Tahunan
2019	96,90	94,92	95,57	89
2018	93,77	95,05	94,41	87
2017	93,02	94,31	93,67	85
2016	94,13	94,2	94,17	82

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU menurun pada tahun 2017 tetapi meningkat pada tahun 2018. Namun bila dibandingkan dengan capaian tahun 2019, perkembangan capaian IKU ini semakin meningkat di angka 95,57.

Perbandingan realisasi IKU dalam rentang 2016 s.d. 2019 selaras dengan Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.8.

**TABEL 3.8**  
Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil s.d. 2019 dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Keterangan
2019	95,57	90,25	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019</i>
2018	94,41	90	
2017	93,67	87,5	
2016	94,17	85	

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Meskipun target IKU tercapai, untuk mendapatkan capaian maksimal diperlukan effort lebih terutama terkait pemenuhan kelengkapan data dan optimalisasi ruang peningkatan kualitas dalam analisis yang dilakukan. Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian IKU ini antara lain adalah terkait penyajian data dan analisis yang tidak komprehensif akan mempengaruhi nilai KFR secara keseluruhan

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Koordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran untuk meningkatkan kualitas Kajian Fiskal Regional Provinsi Gorontalo;
2. Koordinasi dengan Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik Gorontalo dalam rangka pemenuhan kebutuhan data;
3. Mengirimkan pegawai dan pejabat Bidang PPA II untuk mengikuti pendidikan pelatihan, lokakarya, dan sejenisnya terkait pengolahan data dan penajaman analisa;

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan melaksanakan *Focuss Group Discussion* (FGD) mengenai penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) dengan mengundang Dit. PA, BI dan BPS;

**1c-N** Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil

Berdasarkan 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKABUN-Kanwil melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKKABUN-Kanwil berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan LK UAKABUN-Daerah seluruh KPPN di wilayah kerjanya. LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tersebut secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Dit. PK (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Dit. APK memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu :

(1) ketepatan waktu (10%), (2) Akurasi Data (75%), (3) Kelengkapan Dokumen (5%), (4) Partisipasi (10%).

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik), Level 3 = 80-94 (Baik), Level 2 = 65-79 (Cukup), Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat *historical report*. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2019, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat Kanwil tahun 2018. Selanjutnya nilai realisasi IKU tersebut diperoleh dari hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat kanwil yang dilakukan oleh Direktorat APK. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

*Target tahun 2019*

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 94 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019. Target IKU tahun 2019 tersebut lebih besar dibandingkan dengan target tahun 2018 yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 (ditargetkan 92).

*Realisasi tahun 2019*

Realisasi IKU Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil Tahun 2019 adalah 99,47 berdasarkan hasil penilaian dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-273/PB/2019 Tentang Penetapan Peringkat Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinator Kuasa BUN Kanwil DJPb, dan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Daerah KPPN Khusus Penerimaan, serta KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah Tahun 2019.



Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.9.

**TABEL 3.9**  
Capaian IKU *Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil* tahun 2019

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	94	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	99,47	
Nilai	105,82	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.9, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,47 tersebut melampaui target IKU sebesar 94 (dengan nilai capaian 105,82) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2019 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.10.

**TABEL 3.10**  
Perbandingan Capaian IKU *Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil* Tahun 2016 s.d.  
2019

Tahun	Realisasi	Target
2019	99,47	94
2018	98,77	93
2017	97,63	93
2016	97,40	93

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan seluruh realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 telah memenuhi target yang telah ditentukan. Dengan demikian, capaian IKU di tahun 2019 (sebesar 99,47) diharapkan dapat menjadi pemacu peningkatan capaian di tahun berikutnya

Perbandingan realisasi IKU dalam rentang 2016 s.d. 2019 selaras dengan Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.11.

**TABEL 3.11**  
Perbandingan Realisasi IKU *Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil*  
s.d. 2019 dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	99,47	92	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019</i>
2018	98,77	92	-	-	
2017	97,63	92	-	-	
2016	97,40	92	-	-	

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tahun 2019 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.12.

**TABEL 3.12**

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil s.d. 2019 dengan RPJMN 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU	Target RPJMN 2015-2019	Keterangan
2019	99,47	-	Tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada RPJMN Tahun 2015-2019
2018	98,77	-	
2017	97,63	-	
2016	97,40	-	

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah :

1. Masih terdapat akun 5 (belanja) bersaldo kredit akibat pengembalian belanja tanpa ada realisasi melalui potongan SPM;
2. Banyaknya void SP2D yang disebabkan karena kesalahan dalam melakukan proses persetujuan tagihan, berupa tahun anggaran yang salah, kode bank salah, nilai pengesahan hibah salah, dsb;
3. Proses rekonsiliasi pada awal-awal periode pelaporan tidak mencapai 100%.

Dengan demikian, dapat disimpulkan akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Kurangnya pemahaman satker sehingga masih terdapat satker yang menyetorkan pengembalian belanja melalui mekanisme potongan SPM padahal satker tersebut tidak memiliki pagu belanja atas setoran tersebut.
2. Masih banyak satker yang menyetorkan sisa UP melewati Tahun Anggaran.
3. Masih terdapat void transaksi pengesahan hibah.
4. Terjadinya mutasi/pergantian petugas penyusun LKBUN sehingga memerlukan waktu untuk penyesuaian pekerjaan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Mengadakan rapat koordinasi penyusunan LKPP tingkat Kanwil yang melibatkan KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa dan melakukan analisa atas LK BUN KPPN sebagai sumber utama penyusunan LKBUN Tingkat Kanwil;
2. Berkonsultasi ke Dit. APK dalam hal terdapat kendala dan permasalahan terkait sistem akuntansi pemerintah pusat yang tidak dapat diselesaikan di Kanwil;
3. Meningkatkan koordinasi dengan KPPN, dan satker lingkup Kanwil Gorontalo;
4. Membentuk Tim Saber Suspen.

Rekomendasi Rencana Aksi (*action plan*) yang dilakukan pada tahun 2019 untuk meningkatkan pencapaian mendatang IKU tersebut (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan terus meningkatkan koordinasi dengan KPPN dan satker lingkup Kanwil Gorontalo.

**Sasaran Strategis 2: Pelayanan publik yang prima**

Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah dimulai sejak tahun 2007. Untuk menguji keberhasilan reformasi tersebut, salah satunya diukur dengan tingkat kepuasan customer (pelanggan) terhadap layanan yang diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Pelayanan publik yang prima didefinisikan sebagai persepsi satuan kerja terhadap produk atau layanan Kanwil Ditjen perbendaharaan yang telah memenuhi atau melebihi harapan. Tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi akan meningkatkan citra Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.13.

**TABEL 3.13**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
*Pelayanan publik yang prima*

<b>SS 2: Pelayanan publik yang prima</b>				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,53	4,74	104,63

**2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil**

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil merupakan salah satu IKU *Kemenkeu-Two* Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019. IKU ini disusun untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. IKU ini merupakan nilai kepuasan pengguna layanan atas layanan unggulan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terhadap pihak eksternal. Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap layanan revisi DIPA yang diberikan oleh Kanwil. Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing Kanwil dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh Bidang PPA I. Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas, 4 = Puas, 3 = Cukup Puas, 2 = Kurang Puas, 1 = Tidak Puas

Perhitungan polarisasi data menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

**Target tahun 2019**

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 4,53 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut meningkat dari tahun 2018 sebesar 4,52. Target IKU tersebut lebih besar dari target yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 (target sebesar 4,18). Hasil survey menunjukkan bahwa realisasi IKU untuk tahun 2019 tersebut lebih tinggi dari target IKU tahun tersebut dan target yang dicantumkan dalam Rencana Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019. Layanan revisi DIPA dinilai memuaskan (skor  $\geq 4,00$ ) dari 27 responden. Rincian skor indeks untuk aspek layanan revisi DIPA yang diteliti dalam hasil survei tersebut pada tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.14.

**TABEL 3.14**  
Rincian Skor Indeks Kepuasan atas Layanan Revisi DIPA Tahun 2019

No	Aspek Layanan	Indeks
1	Kinerja Layananan Revisi Dokumen Anggaran	4,68
2	Sarana dan Prasarana	4,79
Indeks Kepuasan Masyarakat		0,94 (sangat puas)

\*tidak terdapat biaya untuk memperoleh layanan pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui bahwa target IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* tahun 2019 dapat dipenuhi dengan capaian ditunjukkan pada Tabel 3.15.

**TABEL 3.15**  
Capaian IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil*

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	-	4,53	-	-	4,53	Maximize/ Take last known
Realisasi	-	4,74	-	-	4,74	
Nilai capaian	-	104,63	-	-	104,63	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.15, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4,74 tersebut (yang diperoleh pada triwulan II) melampaui target IKU sebesar 4,53 (dengan nilai capaian 104,63) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Capaian IKU sebesar 4,74 tersebut merupakan yang tertinggi selama 5 (lima) tahun terakhir. Secara berturut-turut capaian IKU tersebut tahun 2015 s.d. 2019 yaitu : 4,34, 4,33, 4,45, 4,69, da 4,74 sehingga dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan capaian IKU tersebut setiap tahunnya sejak tahun 2015 s.d tahun 2019 kecuali pada tahun 2016 yang mengalami penurunan.

Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2014 s.d 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.16.

**TABEL 3.16**  
Perbandingan Capaian IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* Tahun 2015 s.d. 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Target	4.06	4.09	4.09	4.52	4,53
Indeks Realisasi	4,34	4,33	4,45	4,69	4,74

Dari tabel 3.16, dapat diketahui bahwa realisasi capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan pada tahun 2016 menurun 0,01 poin dari indeks tahun 2015, indeks tahun 2017 meningkat 0,12 poin dari indeks tahun 2016, indeks tahun 2018 meningkat 0,24 poin dari indeks tahun 2017, dan indeks tahun 2019 meningkat 0,5 dari indeks tahun 2018.

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi tiga tahun pertama dari Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.17.

**Tabel 3.17** Perbandingan Realisasi IKU *Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil* dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPb	Renstra Kemenkeu
2019	4,74	4,18	4,15	4,15
2018	4,69	4,15	4,12	4,12
2017	4,45	4,12	4,09	4,09
2016	4,33	4,09	4,06	4,06

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Isu utama terkait pencapaian IKU tersebut pada tahun 2019 adalah terkait PMK dan Perdirjen Perbendaharaan tentang revisi DIPA masih menimbulkan multitafsir, bukan hanya pada pegawai di bidang PPA I Kanwil Gorontalo tetapi juga antar kanwil sehingga pada berbagai kesempatan revisi membutuhkan waktu yang lebih lama hanya untuk menafsirkan maksud dari peraturan atau untuk meminta penjelasan dari pembuat peraturan. Selain itu seluruh pegawai pada Bidang PPA I belum pernah mendapatkan bimtek terkait dengan aplikasi RKAKL padahal satker seringkali menanyakan permasalahan teknis terkait aplikasi RKAKL. Isu tersebut berimplikasi pada penurunan indeks kepuasan layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut adalah dengan seringkali mengadakan mini GKM untuk para pegawainya untuk mendiskusikan ketentuan-ketentuan dalam PMK dan Perdirjen Perbendaharaan terkait revisi dan Aplikasi RKAKL sehingga dapat meningkatkan pengetahuan para pegawai dan pelayanan yang diberikan. Selain itu secara proaktif Bidang PPA I juga membangun komunikasi dengan Dit. PSP dan DJA terkait dengan PMK revisi.

Adapun secara umum rekomendasi rencana aksi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada tahun 2019 dalam upaya meningkatkan Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil (Penanggung Jawab : Bidang PPA I) adalah dengan mengundang pegawai DJA untuk memberikan bimtek Aplikasi RKAKL.

**Sasaran****Strategis 3:****Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi**

Sebagai pengelola perbendaharaan negara di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan tertentu, khususnya terkait bidang perbendaharaan. Pengguna layanan adalah pihak eksternal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang secara langsung menerima layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Kepatuhan pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi diukur dari tingkat kepatuhan Satuan Kerja/KL lingkup Kanwil dalam melakukan rekonsiliasi tingkat UAKPA.

**TABEL 3.18**

Capaian IKU pada Sasaran Strategi

*Kepatuhan atas Pengelolaan Perbendaharaan negara yang Tinggi*

**SS3: Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang Tinggi**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	100%	101,93

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**3a-****CP****Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal**

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, Satuan Kerja selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN- Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan. Selanjutnya, sesuai surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-4841/PB/2016 tanggal 14 Juni 2016 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal tingkat KPPN Bulan Januari s.d. Mei 2016, Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak lagi melakukan rekonsiliasi antara UAPPA-W, namun diwajibkan untuk memantau pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA pada seluruh KPPN di wilayah kerjanya. Realisasi IKU dihitung berdasarkan:

- 1) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%);
- 2) Perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%).

**Ketepatan waktu rekonsiliasi** yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon sebelum batas akhir yang ditetapkan.

**Keandalan data hasil rekonsiliasi** yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki suspen belanja (ambang batas suspen 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan. Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Triwulan 1 2019 = Desember 2018 - Februari 2019, Triwulan 2 2019 = Maret - Mei 2019, Triwulan 3 2019 = Juni - Agustus 2019, Triwulan 4 2019 = September - November 2019

IKU tersebut bertujuan untuk mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo agar selalu melakukan upaya pembinaan secara optimal dalam pelaksanaan rekonsiliasi tingkat KPPN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (menggantikan PMK No. 210/ PMK.05/2013), Satker selaku UAKPA melakukan rekonsiliasi dengan UAKKBUN- Daerah di wilayah kerjanya setiap bulan. Rekonsiliasi tersebut dilakukan dengan menggunakan aplikasi-Rekon.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%) dan perbandingan jumlah satuan kerja yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal dengan jumlah satker yang wajib

$$\text{Capaian} = 50\% \left(\frac{a}{c}\right) + 50\% \left(\frac{b}{c}\right)$$

melakukan rekonsiliasi laporan keuangan (bobot 50%). Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

- a: Jumlah satker yang melakukan upload data ke E-Rekon secara tepat waktu
- b: Jumlah satker yang memiliki nilai suspen (selisih) belanja tidak melebihi ambang batas suspen.
- c: Jumlah satker aktif pada periode berkenaan

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2019 adalah sebesar 98,1%, baik untuk target IKU tahunan maupun triwulanan. Target tersebut lebih besar dengan target IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal tahun 2018 ( sebesar 98%).

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2019 adalah 100% yang diperoleh dari rata-rata capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal pada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa yang telah memenuhi targetnya (100%) dengan nilai capaian 101,93 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.19.

Target  
tahun 2019

Realisasi  
tahun 2019

**TABEL 3.19**

Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2019

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	Maximize/ Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	101,93	101,93	101,93	101,93	101,93	

Perbandingan  
an Realisasi  
IKU tahun  
2019 dan  
tahun  
sebelumnya

Perbandingan IKU dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.20.

Tabel 3.20

Perbandingan Capaian IKU Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal Tahun 2016 s.d. 2019

Target/Realisasi	2019	2018	2017	2016
Target	98,1%	98%	97%	97%
Realisasi	100%	99,75%	99,60%	97%

**Keterangan:** 2016 = IKU Persentase rekonsiliasi/konfirmasi realisasi APBN tingkat UAKPA dan UAPPA-W secara tepat waktu

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi tiga tahun kedua dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.21.

**TABEL 3.21**  
Perbandingan Realisasi IKU *Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal* s.d 2019 dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	100%	4	-	-	tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
2018	99,75%	4	-	-	
2017	99,60%	4	-	-	
2016	97%	3	-	-	

**Ket :** Pada renstra kanwil tahun 2015 s.d. 2019 *wording* IKU ini adalah Indeks kepatuhan pengguna layanan dengan satuan targetnya adalah indeks

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2016-2019 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tahun 2017 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.22

**Tabel 3.22**  
Perbandingan Realisasi IKU *Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal* s.d. 2019 dengan RPJMN 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU	Target RPJMN 2015-2019	Keterangan
2019	100%	-	Tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada RPJMN Tahun 2015-2019
2018	99,75%	-	
2017	99,60%	-	
2016	97%	-	

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah masih terdapat beberapa satker yang sering terlambat menyelesaikan rekonsiliasi hingga menunggu *closed period* serta masih adanya suspend (Transaksi dalam Konfirmasi) pada Belanja.

Akar permasalahan pencapaian IKU yang dapat disimpulkan dalam hal ini adalah :

1. Aplikasi e-Rekon G2 masih dalam pengembangan, sehingga masih memerlukan sinkronisasi dengan aplikasi lain (SPAN dan OM-SPAN) serta penyempurnaan proses bisnis dan fitur;
2. Kurangnya kepedulian pimpinan terhadap pengawasan penyelesaian rekonsiliasi;
3. Satker masih belum memahami perbedaan proses rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuangan. Satker cenderung baru akan mengupload ADK setelah menerima data dari Aset (yang sebenarnya untuk rekon bulanan yang tidak bersamaan dengan penyusunan LK, data Aset dapat dikesampingkan dahulu) sehingga sering terlambat melaksanakan rekonsiliasi;
4. Beberapa satker yang memperoleh DIPA pada pertengahan tahun belum memahami



aturan tentang rekonsiliasi.

5. Satuan kerja yang menggunakan mekanisme LS dan pagunya sudah habis merasa tidak perlu melakukan rekonsiliasi

Isu dan permasalahan tersebut berimplikasi pada penyajian data pada LK BUN, antara lain:

1. Suspen data antara Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI),
2. Laporan Keuangan tingkat wilayah menjadi tidak valid dikarenakan belum terkonsolidasi dari seluruh satker.

Kondisi ini berpotensi muncul kembali pada laporan keuangan tahunan sehingga perlu upaya penanganan serius dan perbaikan segera agar penyusunan LK BUN Tahun 2019 yang berkualitas dapat terwujud. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan langkah-langkah persuasif dengan memberitahukan jadwal rekonsiliasi melalui telepon dan grup WhatWhatsapp UAPPA-W;
2. Monitoring dan Evaluasi *on the spot* untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang membuat Satker terlambat rekonsiliasi dan memiliki data suspen.

Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PAPPK), yaitu: dengan terus melakukan monitoring melalui aplikasi e-rekon&LK untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang membuat satker belum melaksanakan rekonsiliasi dan memiliki data suspen dan ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi secara *on the spot* ke satker-satker tersebut.

**Sasaran Strategis 4: Pemenuhan layanan unggulan yang prima**

Pemenuhan layanan unggulan yang prima merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal dan/atau internal sesuai dengan peraturan/standar baku yang telah ditetapkan untuk kepentingan masyarakat atau para pemangku kepentingan lainnya atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan.

**TABEL 3.23**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
*Pemenuhan layanan unggulanyang prima*

<b>SS 4: Pemenuhan layanan unggulan yang prima</b>				
<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Nilai</b>
4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100

**4a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu**

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Revisi dokumen pelaksanaan anggaran adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan APBN dan disahkan dalam DIPA. Berdasarkan PMK 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tahun 2017, untuk usulan revisi anggaran yang dapat ditetapkan, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan surat pengesahan revisi anggaran, palinglama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima dengan lengkap.

IKU tersebut bertujuan untuk mendorong Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo agar selalu mengedepankan pelayanan prima dengan menyelesaikan usulan revisi sesuai ketentuan.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan perbandingan jumlah revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah usulan pengesahan revisi DIPA yang diterima dari satker. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{revisi DIPA yang diselesaikan tepat waktu}}{\sum \text{Usulan pengesahan revisi DIPA yang diterima dari satker}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

**Target IKU Tahun 2019**

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Tahun 2019 adalah 100%. Target tersebut sama dengan target periode sebelumnya, target pada Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo 2015-2019.

**Realisasi IKU Tahun 2019**

Realisasi IKU Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 adalah 100% yang berarti seluruh penyelesaian revisi yang dilaksanakan pada tahun 2019 telah dilaksanakan dengan tepat waktu. Perhitungan IKU tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.24.

**TABEL 3.24**

Perhitungan IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* tahun 2019

Target/Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	Maximize/ Average
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	
Nilai Capaian	100	100	100	100	100	

Dengan demikian, realisasi IKU tersebut telah memenuhi target pada tahun 2019, yaitu sebesar 100%, dengan nilai capaian 100, sebagaimana telah ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019. Perbandingan IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* tahun 2016 s.d. 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.25.

**TABEL 3.25**

Perbandingan Capaian IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* tahun 2016 s.d. tahun 2019

Target/Realisasi	2019	2018	2017	2016	2015
Target	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi tiga tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26.

**TABEL 3.26**

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu* dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	100%	100%	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019</i>
2018	100%	100%	-	-	
2017	100%	100%	-	-	
2016	100%	100%	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.26, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% untuk tahun 2016 s.d. 2019 tersebut telah memenuhi target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2019 dan  
tahun  
sebelumnya

Perbandingan  
Realisasi s.d.  
2019 dengan  
Renstra Kanwil  
Ditjen  
Perbendaharaan  
Provinsi  
Gorontalo,  
Renstra DJPb dan  
Renstra  
Kementerian  
keuangan

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Isu utama dalam pencapaian IKU tersebut adalah seperti terdapat beberapa bagian dari PMK 117 PMK.02/2018 terkait Revisi Anggaran TA 2019 yang multitafsir. Akar permasalahan dalam hal ini yaitu terkait aturan Revisi DIPA yang setiap tahun berubah-ubah.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Mempelajari aturan terbaru terkait mekanisme revisi DIPA;
2. Melakukan GKM mini pada Bidang PA I untuk menyamakan persepsi terkait revisi.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu dengan memberikan masukan kepada Kantor Pusat agar perlu ditetapkan garis-garis besar kewenangan revisi pada DJA, Dit. PA, Kanwil DJPb dan KPA.

**Sasaran Strategis 5: Pembinaan yang berkesinambungan**

Dalam rangka menjamin terlaksananya kondisi pelayanan prima kepada masyarakat dan terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang profesional, transparan, dan akuntabel maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan pembinaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan satuan kerja di wilayah kerjanya secara berkala. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.27

**Tabel 3.27**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
*Pembinaan yang berkesinambungan*

<b>SS 5: Pembinaan yang berkesinambungan</b>				
<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Nilai</b>
5a-N	Rata-rata nilai Laporan Hasil Pmbinaan dan Supervisi KPPN	88	96,77	109,96
5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86	91,29	106,15
5c-N	Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI	95%	100%	105,26

**5a-N Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN**

Uraian mengenai 3 (tiga) IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: Sesuai dengan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor 261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, setiap Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan wajib melakukan pembinaan pada KPPN di lingkup wilayah kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan masyarakat, Kanwil melalui tim Pembinaan dan Supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja KPPN dilingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-inikator pada setiap unsur berikut:

1. Pelaksanaan tugas Kuasa BUN
2. Pelayanan Perbendaharaan
3. Kinerja dan Tata Kelola KPPN

Pengisian realisasi IKU bersifat *historical report*. Artinya, untuk data realisasi IKU Semester I tahun 2019 merupakan rata-rata nilai kinerja KPPN hasil pembinaan semester II tahun 2018 . Tujuan IKU ini adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan KPPN kepada stakeholder sesuai janji layanan yakni layanan yang cepat, tepat, akuntabel dan bebas biaya.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan merata-rata nilai kinerja 2 (dua) KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yaitu KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa periode semesteran selama tahun 2019. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah nilai kinerja KPPN hasil pembinaan Kanwil}}{\text{Jumlah KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kerjanya), periode pelaporan (*trajectory*)

semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target Tahun  
2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk tahun 2019 adalah sebesar 88..

Realisasi Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN pada tahun 2019 sebesar 96,77 . Nilai realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan yang dapat ditunjukkan pada Tabel 3.28.

**TABEL 3.28**

Perhitungan IKU Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil Tahun 2019

URAIAN	Semester I	Semester II
Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil	96,35	97,19
Nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil TA 2019 (rata-rata semester I-II)	<b>96,77</b>	

Realisasi Tahun  
2019

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2019  
dan tahun  
sebelumnya

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.29.

**TABEL 3.29**

Perbandingan Capaian IKU Rata-rata Nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN Tahun 2019

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	88	88	88	Maximize/ Average
Realisasi	96,35	97,19	96,77	
Nilai	109,48	110,44	109,96	

Untuk diketahui bahwa IKU ini merupakan IKU baru sekaligus penyempurna dari IKU sebelumnya pada tahun 2019 yakni Rata-rata nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi Kanwil. Walaupun hasilnya belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, namun Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo optimis dapat mengawal berjalannya IKU ini hingga mendapat hasil yang memuaskan.

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2019, terdapat beberapa hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

1. Belum meratanya kemampuan dari Tim Pembinaan dalam menilai kinerja KPPN berdasarkan unsur-unsur pembinaan dan supervisi KPPN.
2. Tingkat kepatuhan dan awareness pegawai dalam standar keamanan informasi masih rendah sehingga perlu ditingkatkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Melakukan update checklist pembinaan terkait penatausahaan rekening dan Penerimaan Negara sesuai PMK 182 Tahun 2017;
2. Membentuk tim pembinaan lintas bidang/bagian yang terdiri atas pegawai yang menguasai materi sesuai dengan unsur-unsur pembinaan KPPN;
3. Menyatukan pembinaan kegiatan dan supervisi KPPN dengan Monev ISO dan Monitoring TIK agar lebih efektif dan efisien;
4. Melakukan rapat persiapan pembinaan dan supervisi pada KPPN untuk mendalami unsur-unsur pembinaan yang terdapat dalam KEP-261/PB/2016.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang SKKI), yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan supervisi ke KPPN;
2. Analisa atas hasil pembinaan dan finalisasi LHPS Semester II Tahun 2019. Pada bulan Januari 2019.

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (*stakeholders*) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh Kanwil Ditjen perbendaharaan.

Untuk bimtek diukur dengan rata-rata hasil *post test* sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan hasil kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu semesteran) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada periode tersebut dibobot dengan formula sebagai berikut:

Capaian = hasil pos test 60% + hasil kuesioner 40%

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pembinaan teknis perbendaharaan.

Formula perhitungan IKU tersebut adalah rata-rata Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi, dengan pembagian nilai seperti di bawah ini :

$0 < x \leq 20$  = sangat tidak efektif

$20 < x \leq 40$  = tidak efektif

$40 < x \leq 60$  = kurang efektif

$60 < x \leq 80$  = efektif

$80 < x \leq 100$  = sangat efektif

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU  
Tahun 2019

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 86 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019.



**Pada Bidang PAPP** diperoleh dari penyelenggaraan sosialisasi atau bimtek dengan rincian sebagai berikut:

1. Terkait pelaksanaan kegiatan pada Semester I 2019, Bidang PAPP menyelenggarakan Bimtek Penggunaan Aplikasi e-Rekon LK dalam rangka Fungsi Penguatan UAPPA-W Tahun 2019. Nilai rata-rata post test peserta pada bimtek tersebut adalah 86.88 dan nilai kuesioner sebesar 95.03. Atas Kegiatan tersebut didapatkan indeks efektivitas, edukasi dan komunikasi seksi PSAPP sebesar 90,14. Pada bulan April 2019 Bidang PAPP menyelenggarakan FGD Koordinasi dan Konsolidasi LKPD Lingkup Provinsi Gorontalo Tahun 2019. Pada penyelenggaraan bimtek tersebut hasil rata-rata kuesioner (sekaligus Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Seksi PSAPD) adalah sebesar 98,75. Atas pelaksanaan kedua kegiatan tersebut Bidang PAPP secara keseluruhan memiliki capaian Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 94,45 untuk Semester I 2019.
2. erkait pelaksanaan kegiatan pada semester II 2019, Bidang PAPP telah melaksanakan Bimtek Pendampingan Penyusunan LK UAPPA-W Semester I 2019 pada tanggal 23 Juli 2019. Pada penyelenggaran bimtek tersebut hasil rata-rata post test peserta adalah 89.29 dan nilai kuesioner sebesar 92.36. Sehingga didapat indeks efektifitas edukasi dan komunikasi seksi PSAPP sebesar 90,52. Selanjutnya pada bulan November 2019 Bidang PAPP menyelenggarakan kegiatan FGD terkait GFS dan diperoleh nilai kuesioner (sekaligus Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Seksi PSAPD) sebesar 90,92. Atas pelaksanaan kedua kegiatan tersebut Bidang PAPP secara keseluruhan memiliki capaian Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 90,72 untuk Semester II 2019.

**Pada Bidang PPA I**, diperoleh dari kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti : Sosialisasi Peraturan Terkini Bidang Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 pada tanggal 19-20 Februari 2019 di Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan 18-19 Maret 2019 di KPPN Marisa. Kemudian, sosialisasi Tata cara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada tanggal 1-2 April 2019 namun rumusan perhitungan pada manual IKU belum tersedia. FGD Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan III 2019, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2019 untuk nilai pada semester II 2019

**Pada Bidang SKKI**, dengan uraian sebagai berikut :

1. Realisasi indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada Semester I 2019 dilakukan dengan memakai kuisisioner. Hasil Penyebaran Kuisisioner pada KPPN Gorontalo sebesar 95,24 sedangkan hasil pada KPPN Marisa sebesar 93.85.
2. Sosialisasi Aplikasi SAKTI pada KPPN Gorontalo dilaksanakan pada tanggal 12-19 Februari 2019 sedangkan sosialisasi security awareness TIK pada KPPN marisa dilakukan pada 20

Mei 2019. Dengan demikian capaian indeks untuk semester I 2019 adalah sebesar 94.54

- Sedangkan pada semester II 2019 menggunakan metode pre dan post test. Bidang SKKI telah melakukan bimbingan teknis pengelolaan TIK pada KPPN Marisa (23-25 Oktober 2019) dan hasil post testnya adalah senilai 94.00. Lalu Bidang SKKI melakukan bimbingan teknis pengelolaan TIK pada KPPN Gorontalo pada tanggal 30 Oktober - 1 November 2019 dan hasil Post Tesnya senilai 92.67. Dengan demikian realisasi indek efektifitas edukasi dan komunikasi semester II 2019 adalah sebesar 93.34

Secara keseluruhan Capaian IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi Bidang SKKI tahun 2019 adalah sebesar 93.94.

Realisasi IKU Tahun 2019

Realisasi atas rata-rata hasil post test dan nilai kuesioner adalah sebesar 91,66 atau dengan nilai capaian 106,58 dari target IKU yang telah ditetapkan. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.30.

**TABEL 3.30**

Capaian IKU Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi Tahun 2019

Target/Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	86	86	86	Maximize/ Average
Realisasi	92,03	91,29	91,66	
Nilai Capaian	107,01	106,15	106,58	

Perbandingan Realisasi IKU tahun 2019 dan tahun sebelumnya

Realisasi IKU Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2019 lebih tinggi dari realisasi pada tahun 2018 (87,36) serta lebih tinggi daripada realisasi IKU pada tahun 2017 (86,6) dan 2016 (85,81).

Perbandingan Realisasi s.d. 2019 dengan Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Renstra DJPb dan Renstra Kementerian keuangan

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi tiga tahun kedua dari Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb Tahun 2015- 2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.31.

**TABEL 3.31**

Perbandingan Realisasi IKU Indeks efektifitas edukasi dan komunikasi dengan Renstra

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	91,66	-	-	-	tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra Kanwil, Renstra DJPb dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
2018	87,36	-	-	-	
2017	86,60	-	-	-	
2016	85,81	-	-	-	

Meskipun telah memenuhi target yang telah ditentukan untuk tahun 2019, terdapat beberapa isu yang perlu mendapatkan perhatian yaitu:

1. Belum ada pelaksana bidang PPK yang memiliki sertifikat penyuluh perbendaharaan (*Treasury Management Representative*);
2. Tidak tersedianya alokasi anggaran yang secara tegas tercantum dalam POK pada seksi PSAPD dalam rangka memenuhi kebutuhan bimtek/sosialisasi/workshop akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal tersebut berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan seksi PSAPD belum dapat dilakukan secara optimal karena masih menggunakan anggaran kegiatan seksi PSAPP dengan ASPLK.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mencapai IKU tersebut antara lain:

1. Meningkatkan kualitas narasumber dan materi setiap sosialisasi dilakukan.
2. Mengikuti diklat / sosialisasi yang diselenggarakan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
3. Menyelenggarakan sosialisasi / bimtek ke UAPPA-W dan Satker
4. Evaluasi dan feedback untuk meningkatkan kualitas (narasumber, materi dan fasilitas) setiap sosialisasi/bimtek yang dilaksanakan.
5. Mengikuti TOT.
6. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan (terutama berkaitan dengan fasilitas).
7. Mengadakan bimtek akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
8. Melengkapi data Profil Satker UAPPA-W
9. Monev ke satker-satker yang di kategorikan sebagai satker yang masih kurang dalam penerapan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Selain itu, rekomendasi rencana aksi yang dilakukan terkait pencapaian IKU tersebut selama tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PPK dan Bidang PPA I), yaitu:

1. Evaluasi terhadap narasumber dan sarana sosialisasi yang telah dilakukan;
2. Membuat usulan penambahan pembina pengelola perbendaharaan (TMR).

**5c-N** Persentase  
Tingkat  
Implementasi  
Aplikasi  
SAKTI

Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI adalah tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2019 pada seluruh satuan kerja Lingkup Kementerian Keuangan dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI untuk memastikan SAKTI dapat diterapkan/dioperasikan secara menyeluruh pada satker yang ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 962/KMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tahap III, sesuai dengan tahapan implementasi yang telah dilaksanakan pada Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dan KPPN.

Untuk Kanwil, IKU ini mengukur tingkat keberhasilan Kanwil dalam melakukan koordinasi, supervisi, dan monitoring penyelesaian tahapan implementasi SAKTI pada satuan kerja lingkup KPPN di wilayah kerjanya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan

implementasi Aplikasi SAKTI tahun 2019 pada seluruh satker lingkup Kementerian Keuangan.

Formula perhitungan IKU tersebut ditunjukkan sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Jumlah satker yang telah mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III}}{\text{Total Jumlah satker yang seharusnya mengikuti tahapan implementasi SAKTI Tahap III}} \times 100\%$$

Tabel A. Tahapan Kegiatan Implementasi SAKTI Tahun 2019

Periode	Tahapan	Tahapan Kegiatan	Target Waktu Pelaksanaan	Porsi
Triwulan I	Tahap 1	Training lanjutan SAKTI 2019 kelas modul admin dan penganggaran untuk satker lingkup Kemenkeu dan PPATK	Februari - Maret	3%
	Tahap 2	Training lanjutan SAKTI 2019 kelas pelaksanaan (PPK dan PPSPM) untuk satker lingkup Kemenkeu dan PPATK	Februari - Maret	3%
	Tahap 3	Training lanjutan SAKTI 2019 kelas pelaksanaan (bendahara) untuk satker lingkup Kemenkeu dan PPATK	Februari - Maret	3%
	Tahap 4	Training lanjutan SAKTI 2019 kelas pelaporan (aset, persediaan, dan pelaporan) untuk satker lingkup Kemenkeu dan PPATK	Februari - Maret	6%
	Tahap 5	Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap I untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	Maret	4%
Triwulan II	Tahap 6	Pendampingan migrasi saldo awal 2019 satker lingkup Kemenkeu dan PPATK (Unaudited dan Audited)	April	6%
	Tahap 7	FGD/Sosialisasi SAKTI Tahap I untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	April	5%
	Tahap 8	FGD/Sosialisasi SAKTI Tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	Mei	5%
Triwulan III	Tahap 9	Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap II untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	Juni	5%
	Tahap 10	Training modul admin dan penganggaran SAKTI berbasis web	Juli - September	25%
Triwulan IV	Tahap 11	Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap III untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	September	5%
	Tahap 12	Publikasi dan komunikasi SAKTI tahap IV untuk seluruh satker mitra KPPN di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK	November	5%
	Tahap 13	Pendampingan SAKTI berbasis web untuk modul admin dan penganggaran	Oktober - Desember	25%

Tabel B. Jumlah satker Kementerian/Lembaga yang mengimplementasikan SAKTI Tahun 2019

No.	Satker	Keberangan
1	Satker pusat Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan PMK Implementasi SAKTI Tahun 2019 (di luar lingkup Kemenkeu dan PPATK)	Untuk implementasi seluruh modul Aplikasi SAKTI berbasis Desktop
2	Seluruh satker Kementerian/Lembaga (di luar satker Kemenkeu, PPATK dan satker pusat K/L sesuai poin nomor 1) mitra KPPN di seluruh wilayah Indonesia	Untuk implementasi Modul Admin dan Modul Penganggaran Aplikasi SAKTI berbasis Web

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

*Target IKU  
Tahun 2019*

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah 95% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 lebih tinggi dari target tahun 2018 (90%). IKU tersebut merupakan IKU yang baru dilaksanakan pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mulai tahun 2018 dan telah ada pada IKU Kantor Pusat DJPb sejak tahun 2016.

*Realisasi IKU  
Tahun 2019*

1. Melakukan EUT lanjutan SAKTI Bersama KPPN Gorontalo kepada satker Piloting SAKTI Tahap IIIC lingkup Gorontalo melalui Surat Tugas Nomor : ST-057/WPB.29/BG.0101/2019 tanggal 22 Februari 2019 dalam hal :
  - a. Modul Admin dan Penganggaran (3%)
  - b. Modul PPK dan PPSPM (3%)
  - c. Modul Bendahara (3%)
  - d. Modul Aset dan pelaporan (6%)Kegiatan EUT lanjutan ini mencakup tahapan sesuai manual IKU nomor 1 s.d. 4 (15%)
2. Melakukan sosialisasi SAKTI Bersama KPPN Gorontalo kepada seluruh satker keuangan lingkup KPPN Gorontalo melalui Surat Tugas Nomor : ST-043/WPB.29/BG.0101/2019 tanggal 14 Februari 2019. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tahapan 7 (5%)
3. Melakukan penegasan kepada KPPN Untuk melakukan Publikasi SAKTI kepada seluruh satker diluar Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas ke KPPN Nomor : ND-319/WPB.29/2019 tanggal 22 Maret 2019. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tahapan 5 (4%)
4. Melakukan migrasi saldo awal pada satker piloting SAKTI Tahap IIIC (KPP Pratama Gorontalo dan KPBC Gorontalo) sesuai Surat Tugas Nomor : ST-138/WPB.29/BG.0101/2019 tanggal 30 April 2019. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tahapan 6 (6%)
5. Melakukan sosialisasi SAKTI Bersama KPPN Gorontalo kepada seluruh satker di luar kementerian Keuangan sesuai Surat Tugas Nomor : ST-143/WPB.29/WPB.29/BG.0101/2019 tanggal 2 Mei 2019. (5%)
6. Melakukan penegasan kepada KPPN untuk melakukan publikasi SAKTI kepada seluruh satker diluar kementerian Keuangan melalui Nota Dinas ke KPPN Nomor : ND-492/WPB.29/2019 tanggal 19 Juni 2019. (5%)

7. Melakukan penegasan kepada KPPN untuk melakukan Publikasi SAKTI Tahap III kepada seluruh satker diluar Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas ke KPPN Nomor : ND-716/WPB.29/2019 Tgl. 16-09-2019. KPPN Gorontalo dan Marisa telah merespon dengan membuat Surat Nomor : S-1651/WPB.29/KP.0103/2019 Tgl. 19-09-2019 dan Surat publikasi ke satker Nomor : S-460/WPB.29/KP.02/2019 Tgl. 10-09-2019. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tahap 11 (5%).
8. Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah menginstruksikan KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa untuk melakukan Training Sakti Web Modul Admin dan Modul Penganggaran ke seluruh satker lingkup Provinsi Gorontalo melalui ND-719/WPB.29/2019 tanggal 16 September 2019. Kedua KPPN tersebut telah melaksanakan training pada tanggal 24 dan 25 September 2019 dengan metode video conference (online melalui aplikasi ZOOM.us). Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tahap 10 (25%).
9. Melakukan penegasan kepada KPPN untuk melakukan Publikasi SAKTI Tahap IV kepada seluruh satker diluar Kementerian Keuangan melalui Nota Dinas ke KPPN Nomor : ND-843/WPB.29/2019 Tgl. 15-11-2019. KPPN Gorontalo dan Marisa telah merespon dengan membuat Surat Nomor : S-2049/WPB.29/KP.0103/2019 Tgl. 19-11-2019 dan Surat publikasi ke satker Nomor : S-593/WPB.29/KP.02/2019 Tgl. 18-11-2019. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tahap 12 (5%).
10. Melakukan Pendampingan Tatap muka Modul Admin dan Anggaran via server training kepada seluruh satker lingkup Wilayah Gorontalo. Pendampingan dilakukan dengan mengundang 240 Satker Mitra Kerja KPPN Gorontalo dan 52 satker KPPN Marisa. Acara pada KPPN Marisa dilakukan pada tanggal 26-27 November 2019 sedangkan pada KPPN Gorontalo dilakukan pada tanggal 2 s.d 3 Desember 2019. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tahap 13 (25%).
11. Melakukan Pendampingan Lanjutan Modul Admin dan Anggaran via server training kepada 30 satker Mitra Kerja KPPN Gorontalo yang tidak menghadiri acara pada poin 10 diatas. Pendampingan dilakukan dengan site visit oleh Tim Kanwil dan Tim KPPN secara bertahap pada tanggal 18 s.d 23 Desember 2019. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tahap 13 (25%).

Perbandingan realisasi dan target tahun 2019

Realisasi tersebut melampaui target yang telah ditetapkan (90%) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.32.

**TABEL 3.32**

Capaian IKU *Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI* Tahun 2019

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Pol /KP
Target	15%	35%	65%	95%	90%	<i>Maximize/ Take Last Known Value</i>
Realisasi	24%	40%	70%	100%	100%	
Capaian	120	114,28	107,69	105,26	105,26	

Perbandingan capaian IKU tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.32. Ditunjukkan bahwa tidak terdapat target (pada Kontrak Kinerja Kemenkeu- *Two* Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo) dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2016 dan 2017 karena IKU tersebut baru diterapkan pada tahun 2018.

Perbandingan Realisasi s.d. 2019 dengan Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Renstra DJPb dan Renstra Kementerian keuangan

Tabel 3.33

Perbandingan Capaian IKU *Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI* tahun 2016 s.d. 2019

Target/Realisasi	2019	2018	2017	2016	Ket
Target	95%	90%	-	-	IKU baru diterapkan di tahun 2018
Realisasi	100%	100%	-	-	

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi selama tiga tahun kedua rencana jangka menengah Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.34.

**TABEL 3.34**

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI* dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu
2019	100%	-	86%	86%
2018	100%	-	86%	86%
2017	-	-	75%	75%
2016	-	-	100%	100%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.34, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 100% untuk tahun 2019 tersebut masing-masing telah melampaui target tahunan yang ditetapkan Renstra Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019. Sedangkan IKU ini tidak ditargetkan pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dan baru dilaksanakan di tingkat Kanwil dan KPPN mulai tahun 2018.

Realisasi Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Realisasi IKU *Persentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI* sebesar 100% tahun 2019 telah melampaui target tahun 2019 dalam RPJMN sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.35.

**TABEL 3.35**

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase Tingkat Implementasi Aplikasi SAKTI*  
s.d. 2019 dan RPJMN 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU	Target RPJMN 2015-2019
2019	100%	86%
2018	100%	86%
2017	-	75%
2016	-	72%

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2019, terdapat beberapa hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. 7 tahapan pada IKU implementasi SAKTI tidak dianggarkan pada DIPA Kanwil.
2. Minimnya tingkat pemahaman Aplikasi SAKTI pada personel Kanwil yang digagas sebagai trainers / pembimbing para operator dari Satker Piloting SAKTI Tahap III (SPS T III) .
3. Adanya potensi respons perubahan yang lambat dari perangkat pengelola keuangan SPS TIII. Respons dalam mengakomodir transisi dari aplikasi keuangan existing ke SAKTI.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. 7 tahapan pada IKU implementasi SAKTI pada SPS T III ini digagas sesudah penyusunan RKA- KL 2019, hal ini mengakibatkan banyak tahapan kegiatan yang harus dilakukan secara global terkendala dari sisi pendanaan kegiatan.
2. Fokustraining dari Dit. SITP saat ini hanya kepada staff keuangan Kanwil selaku satker vertikal DJPb, belum ada upaya untuk melatih staff lainnya pada Kanwil DJPb selaku trainer regional Aplikasi SAKTI.
3. Lambatnya koneksi jaringan intranet kemenkeu dan tingkat kompetensi SDM IT pada SPS T III dapat menghambat proses transisi.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Bertanya secara formal lewat HAI-SPAN untuk meminta arahan dari Dit. SITP mengenai pendanaan dan juknis detail akan tahapan implementasi SAKTI yang diharapkan.
2. Pengenalan Aplikasi SAKTI dari Staff keuangan Kanwil kepada pegawai Kanwil Lainnya via GKM.
3. Koordinasi bersama antara para pengelola Aplikasi SAKTI Kanwil & KPPN Gorontalo bersama staff SPS T III via group chat.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2019 adalah dengan optimalisasi FGD SAKTI, EUT SAKTI dan publikasi SAKTI sebagai upaya peningkatan respon perubahan transisi SAKTI ke pimpinan DJP dan DJBC.



**Sasaran Strategis 6: Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu**

Pelaksanaan anggaran yang efektif adalah anggaran dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Optimal berarti bahwa anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana. Sedangkan tepat waktu adalah anggaran dilaksanakan dan dilaporkan sesuai dengan norma waktu yang telah ditetapkan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran K/L yang efektif dan optimal, dengan cara melakukan pembinaan teknis dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam Tabel 3.36.

**TABEL 3.36**  
 Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
*Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu*

<b>SS6: Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu</b>				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	89	96,48	108,40
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75	96,86	120

**6a-N Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil**

Uraian mengenai 2 (dua) IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Reviu Pelaksanaan Anggaran merupakan salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran, seperti operasionalisasi/teknis pelaksanaan anggaran, kendala-kendala pembayaran, teknis keterlaksanaan kegiatan, dan isu-isu terkait pelaksanaan anggaran lainnya. Tujuan disusunnya Laporan reviu pelaksanaan anggaran tersebut adalah untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dari level satuan kerja sampai K/L, menghasilkan rekomendasi kebijakan mekanisme pelaksanaan anggaran, serta menilai apakah belanja pemerintah telah memenuhi tujuan, efisien, efektif dan berbagai indikator lain yang mewakili kinerja atau kualitas. Sesuai ketentuan SE- 28/PB/2015, laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara periodik (semesteran) dan disampaikan kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mewujudkan kualitas penyusunan Laporan reviu pelaksanaan anggaran pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan memberikan penilaian dan penghargaan atas kesungguhan dan upaya nyata Kanwil dalam menyelesaikan dan meningkatkan kualitas Laporan reviu pelaksanaan anggaran tingkat wilayah. Terdapat beberapa parameter/aspek yang digunakan dalam penilaian RPA, meliputi: kesesuaian tujuan, ruang lingkup, dan objek reviu RPA (15%); Alur pikir/flow (10%); Kualitas analisis dan inovasi (25%); Ketajaman rekomendasi (15%); Analisis aspek khusus-Bab IV (15%); Format review/sistematika (5%); Penyajian dashboard (5%); Ketetapan waktu (5%); dan Desain/layout (5%). Kategori kualitas nilai Reviu Pelaksanaan Anggaran Kanwil adalah sebagai berikut: Level 5 = 91-100 (*Excellent*), Level 4 = 75-90 (*Good*), Level 3 = 61-74 (*Fair*), Level 2 = 41-60 (*Poor*), Level 1 = 0-40 (*Unqualified*)

Tujuan IKU ini adalah untuk memastikan tersusunnya laporan reviu pelaksanaan anggaran yang berkualitas. Realisasi IKU dihitung berdasarkan rata-rata nilai Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran semesteran selama tahun 2019 dengan hasil penilaian oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

Capaian = Hasil penilaian oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (*trajectory*) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU  
Tahun 2019

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah 89 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2019, lebih tinggi dari target tahun 2018 (87).

Realisasi IKU  
Tahun 2019

Realisasi atas Nilai kualitas laporan revidi pelaksanaan anggaran Kanwil Laporan Revidi Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo pada semester I Tahun 2019 diselesaikan dan dikirimkan pada bulan Februari 2019, dan dinilai oleh Direktorat PA melalui ND-374/PB/2019 tanggal 13 Mei 2019 dengan nilai melampaui target yang ditetapkan (96,8). Selanjutnya pada semester II Tahun 2019, berdasarkan ND Direktur Jenderal Perbendaharaan No. ND-879/PB/2019 tanggal 30 Oktober 2019 hal Penyampaian Hasil Penilaian Revidi Pelaksanaan Anggaran Semester I 2019 Tingkat Wilayah, untuk Laporan Revidi Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 96,15. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.37.

**TABEL 3.37**

Capaian IKU Nilai kualitas laporan revidi pelaksanaan anggaran Kanwil Tahun 2019

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	89	89	89	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	96,80	96,15	96,48	
Capaian	108,76	108,03	108,40	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.37, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 96,48 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebesar 89 (dengan nilai capaian 108,40).

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2019  
dan tahun  
sebelumnya

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahunan 2019 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada table 3.38.

**TABEL 3.38**

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas laporan revidi pelaksanaan anggaran Kanwil tahun 2016 s.d. 2019

Tahun	Realisasi			Target Tahunan
	Smt I	Smt II	Tahunan	
2019	96,80	96,15	96,48	89
2018	94,65	96,3	95,48	87
2017	94,16	95,72	94,94	85
2016	91,71	92,77	92,44	80

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan seluruh realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Perbandingan Realisasi s.d. 2019 dengan Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, Renstra DJPb dan Renstra Kementerian keuangan

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Rencana Strategis (Renstra) Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.39.

**TABEL 3.39**

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil dengan Renstra 2015—2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	96,48	95	-	-	tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
2018	95,48	95	-	-	
2017	94,94	95	-	-	
2016	92,44	95	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.39, dapat diketahui bahwa nilai realisasi IKU untuk tahun 2016 s.d. 2019 tersebut belum memenuhi seluruh target yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019. Sedangkan IKU ini tidak terdapat targetnya pada Renstra Ditjen Perbendaharaan tahun 2015-2019 dan Renstra Kemenkeu tahun 2015-2019.

Realisasi Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Realisasi IKU Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil dapat dibandingkan target dalam RPJMN 2015-2019 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.40.

**TABEL 3.40**

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil s.d. 2019 dan RPJMN 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU	Target RPJMN 2015-2019	Keterangan
2019	96,48	-	Tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada RPJMN Tahun 2015-2019
2018	95,48	-	
2017	94,94	-	
2016	92,44	-	

Perbandingan Realisasi 2019 dan Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Meskipun realisasi IKU tersebut telah mencapai target tahun 2019, terdapat beberapa hal terkait yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

1. Identifikasi langkah-langkah permasalahan pelaksanaan anggaran belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Kapasitas SDM dalam melaksanakan analisis secara akademik dari sudut praktisi masih kurang memadai.

Akar permasalahan dalam hal ini antara lain:

1. Adanya program self blocking mengakibatkan kendala pelaksanaan anggaran menjadi semakin sulit untuk diidentifikasi secara jelas.
2. Beberapa pegawai pada Bidang PPA I belum mendapatkan bimtek yang memadai terkait dengan metode penelitian.
3. Data yang disediakan dalam tool ME Budget Execution masih perlu diolah kembali.

Tindakan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Berkoordinasi dengan KPPN untuk mengidentifikasi kendala- kendala pelaksanaan anggaran.
2. Knowledge sharing mengenai metode penelitian dengan akademisi (mantan ekonom regional Gorontalo)

Rekomendasi rencana aksi yang dilaksanakan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu dengan melaksanakan identifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran secara lebih rinci sehingga masih tersedia cukup waktu untuk konfirmasi dan mendalaminya.

Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN menggambarkan sejauh mana upaya pembinaan dan monitoring yang dilakukan Kanwil dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran DAK Fisik dan Dana Desa pada seluruh KPPN di lingkup wilayah kerjanya berjalan secara efektif, optimal dan tepat waktu. Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana

Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. (MONEV)
4. Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa. (LK-UAKPA)

**SYARAT** adalah rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian (dhi. upload melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran DFDD oleh pemda per jenis transfer perbidang dengan mengacu pada ketentuan pasal 11, 12, 14, dan 21 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-11/PB/2017 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-1/PB/2018. Sesuai ketentuan tersebut, diatur batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagai berikut:

- a. DAK Fisik: Tahap I (21 Juli); Tahap II (21 Oktober); dan Tahap III (15 Desember).
- b. DAK Fisik Bidang Tertentu: 21 Juli.
- c. Dana Desa: Tahap I (7 HK sebelum minggu ketiga Juni); Tahap II (7 HK sebelum minggu keempat Juni); dan Tahap III (mengikuti pedoman Akhir TA).

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran DFDD per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran (NIKWPDP DFDD) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1,00 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 3 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan

0,95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 2 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan

0,90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 1 bulan sebelum batas waktu yang ditentukan

0,85 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 3 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan

0,80 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 2 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan

0,75 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap 1 minggu sebelum batas waktu yang ditentukan

0,70 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar dan lengkap secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan

0,60 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah terlambat dari batas waktu yang ditentukan

Rata-rata indeks ketepatan waktu penyampaian =  $\frac{\sum \text{NIKWPDP DFDD}}{\text{Jumlah Penyaluran DFDD}}$

per jenis transfer per bidang per tahap penyaluran yang dilakukan.

**SSPSPM** adalah prosentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dengan mengacu pada ketentuan pasal 24 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-04/PB/2017. Sesuai ketentuan tersebut, diatur bahwa Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat 7 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar.

Persentase ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM = jumlah penyaluran DFDD per pemda per bidang per tahap secara tepat waktu / jumlah penyaluran DFDD per pemda per bidang per tahap. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "SSPSPM" bersifat kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

**MONEV** adalah indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Koordinator KPA penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil dengan tembusan kepada Koordinator KPA melalui alamat email subditpa4@gmail.com paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir.

Penentuan nilai indeks ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1,00 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 HK sebelum batas waktu yang ditentukan

0,90 = dokumen laporan monev disampaikan 3-2 HK sebelum batas waktu yang ditentukan

0,80 = dokumen laporan monev disampaikan 1 HK sebelum batas waktu yang ditentukan

0,70 = dokumen laporan monev disampaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditentukan

0,60 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat setelah batas waktu yang ditentukan

0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "MONEV" bersifat tidak kumulatif.

Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka hanya menggunakan data pada triwulan berkenaan.

**LK-UAKPA** adalah prosentase ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN kepada UAKKPA BUN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK 221/PMK.05/2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut:

LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya.

LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan. LK Tahunan disampaikan paling lambat 5 Februari TA berikutnya.

LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya.

Pelaksanaan penyampaian LK-UAKPA mengacu pada ketentuan yang disampaikan oleh Dit. PA selaku koordinator KPA Penyalur DFDD.

$LK \text{ Kuasa UAKPA} = \frac{\sum \text{laporan yang disampaikan tepat waktu s.d. triwulan berkenaan}}{\sum \text{laporan yang harus disampaikan s.d. triwulan berkenaan}}$

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai komponen "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif. Artinya, untuk menghitung capaian komponen ini dalam suatu triwulan, maka hanya menggunakan data pada triwulan berkenaan.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan jumlah rata-rata Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa yang disalurkan melalui KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \bar{x} \text{ NKP DFDD} = \frac{\sum [\text{NKP DFDD di KPPN}]}{\text{Jumlah KPPN}}$$

$$\text{NKP DFDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + 0,30 (\text{SSPSPM}) + 0,30 (\text{MONEV}) + 0,30 (\text{LK-UAKPA})] \times 100$$

**Keterangan:**

$\bar{x}$  NKP DFDD adalah rata-rata Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.  
NKP DFDD adalah Nilai Kinerja penyaluran DAK fisik dan Dana Desa.

Dalam perhitungan IKU tersebut, digunakan polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU  
Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2019 adalah sebesar 75, baik untuk target IKU tahunan maupun triwulanan.

Realisasi IKU  
Tahun 2019

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2019 adalah 96,86 yang diperoleh dari rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa yang telah memenuhi targetnya dengan nilai capaian 120 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.41

Perbandingan  
realisasi dan  
target tahun  
2019

**TABEL 3.41**

Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2019

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	75	75	75	75	75	Maximize/ Average
Realisasi	95,05	96,61	98,26	97,5	96,86	
Nilai Capaian	120	120	120	120	120	

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2019  
dan tahun  
sebelumnya

Perbandingan IKU dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.42.

Tabel 3.42  
Perbandingan Capaian IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN Tahun 2016 s.d. 2019

Target/Realisasi	2019	2018	2017	2016
Target	75	70	-	-
Realisasi	96,86	87,53	-	-

**Keterangan:**

IKU baru ditetapkan pada tahun 2018 sehingga tidak terdapat target pada tahun 2016 dan 2017

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.42, meskipun IKU ini baru ditetapkan pada tahun 2019, dapat dikatakan bahwa IKU tersebut memiliki capaian baik dan berhasil memenuhi target yang ditetapkan pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun masing-masing.

Perbandingan  
Realisasi s.d.  
2019 dengan  
Renstra Kanwil  
Ditjen  
Perbendahara  
an Provinsi  
Gorontalo,  
Renstra DJPb  
dan Renstra  
Kementerian  
keuangan

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi tiga tahun kedua dari Renstra Kanwil DJPb Tahun 2015-2019, Renstra Ditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.43

**TABEL 3.43**

Perbandingan Realisasi IKU Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN s.d 2019 dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	96,86	-	-	-	tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, Renstra DJPb dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019
2018	87,53	-	-	-	
2017	-	-	-	-	
2016	-	-	-	-	

Perbandingan  
Realisasi 2019

Realisasi kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 dapat dikaitkan dengan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Perbandingan realisasi IKU tahun 2019 dengan RPJMN Tahun 2015-2019 ditunjukkan pada Tabel 3.44

Tabel 3.44 Perbandingan Realisasi IKU *Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN s.d. 2019 dengan RPJMN 2015-2019*

Tahun	Realisasi IKU	Target RPJMN 2015-2019	Keterangan
2019	96,86	-	<i>Tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada RPJMN Tahun 2015-2019</i>
2018	87,53	-	
2017	-	-	

Isu utama yang terjadi dalam pencapaian IKU tersebut antara lain adalah terkait persyaratan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang sering mengalami perubahan. Selain itu Aplikasi OM SPAN juga masih belum bisa diandalkan dalam upload data.

Akar permasalahan pencapaian IKU yang dapat disimpulkan dalam hal ini adalah :

1. Aplikasi OM SPAN masih belum bisa diandalkan dalam upload data sehingga kadang terdapat beberapa pemda yang terlambat menyampaikan persyaratan penyaluran.
2. Pemenuhan data terkait perhitungan capaian IKU ini membutuhkan koordinasi dengan KPPN sebagai KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mendukung pencapaian IKU tersebut, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan KPPN lingkup Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo untuk pemenuhan kewajiban pelaporan terkait DAK Fisik dan Dana Desa.
2. Koordinasi dengan Pemda lingkup Provinsi Gorontalo untuk pemenuhan syarat penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan melaksanakan sosialisasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2019 kepada Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Gorontalo.

**Sasaran Strategis 7:**

**Pengelolaan Kas dan Investasi yang pruden, efisien dan optimal**

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. Pruden artinya berhati-hati dalam setiap pengambilan putusan/kebijakan maupun dalam melaksanakan pengelolaan kas maupun investasi pemerintah. Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara yang optimal. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.45.

**TABEL 3.45**

Capaian IKU pada Sasaran Strategis

*Pengelolaan Kas dan Investasi yang pruden, efisien dan optimal*

**SS7: Pengelolaan Kas dan Investasi yang pruden, efisien dan optimal**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%	96,47%	107,19
7b-N	Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program	78	100	120

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

**7a-N** **Persentase akurasi rencana penarikan dana satker**

Teknisnya, KPA menyampaikan RPD dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya kepada Kepala KPPN. Persentase rencana dan penarikan dana satker dinyatakan akurat apabila rencana penarikan dengan realisasinya mencapai 90%. Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi yang maksimal (100%) dengan tingkat deviasi pada periode tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase akurasi rencana penarikan dana satker** bertujuan untuk mengoptimalkan peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam melakukan pembinaan dan supervisi terhadap akurasi perencanaan kas satker.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan selisih antara akurasi yang maksimal (100%) dengan tingkat deviasi pada periode tertentu. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = (100\% - \text{Tingkat Deviasi})$$

**Keterangan:**

Tingkat Deviasi diperoleh dari rata-rata akumulasi seluruh Laporan Deviasi KPPN di wilayah kerjanya

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan triwulanan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU *Persentase akurasi rencana penarikan dana satker* untuk tahun 2019 adalah 90% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019. Target tersebut lebih besar dari target IKU tahun 2018 (88%) dan Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019. IKU tersebut merupakan *refinement* dari IKU *Deviasi antara rencana dan penarikan dana satker yang akurat* yang ditetapkan pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, berupa *rewording* dan perhitungan dengan mengukur akurasi dari sisi deviasi dari perencanaan tersebut. Dengan demikian, secara substansi yang diukur, IKU tersebut masih tetap dengan tahun sebelumnya

Realisasi IKU *Persentase akurasi rencana penarikan dana satker* Tahun 2019 adalah 96,47%. Persentase tersebut diperoleh dari rata-rata *Persentase akurasi rencana penarikan dana satker* tahun 2019 triwulanan, yaitu 98,11% (triwulan I), 98,79% (triwulan II), 95,05% (triwulan III), dan 93,93% (triwulan IV).

Capaian IKU tersebut terhadap target tiap triwulannya pada tahun 2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.46

**TABEL 3.46**

Capaian IKU *Persentase akurasi rencana penarikan dana satker* Tahun 2019

Target/ Realisasi	Trw I	Trw II	Trw III	Trw IV	Tahunan	Pol /KP
Target	90%	90%	90%	90%	90%	<i>Maximize/ Average</i>
Realisasi	98,11%	98,79%	95,05%	93,93%	96,47%	
Nilai Capaian	109,01	110,54	107,92	104,37	107,19	

Dengan diketahuinya realisasi IKU tersebut, dapat ditunjukkan perbandingan realisasinya dari tahun 2016 s.d. 2019 pada Tabel 3.47

**Tabel 3.47**

Perbandingan Capaian IKU *Persentase akurasi rencana penarikan dana satker* Tahun 2016 s.d. 2019

Target/Realisasi	2019	2018	2017	2016
Target	90%	88%	85%	85%
Realisasi	96,47%	92,39%	95,73%	98,35%

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Terdapat isu utama terkait IKU ini diantaranya adalah :

1. Kepedulian satker terhadap ketersediaan kas masih kurang, karena mereka masih beranggapan bahwa semua SPM akan cair apabila sudah benar perhitungan dan kesesuaian pagunya dalam DIPA.
2. Masih terdapat beberapa satker yang kesulitan dalam membuat rencana penarikan dana karena banyak kegiatan yang tidak dapat diprediksi.
3. Pelaksanaan penarikan di awal tahun anggaran sangat bergantung pada penetapan pejabat pengelola keuangan dan juknis yang lambat ditetapkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut adalah :

1. Menghimbau satker agar disiplin dalam melakukan pembaruan perencanaan kas.
2. Mensosialisasikan secara langsung pada pelaksanaan Monev pelaksanaan anggaran. Rekomendasi Rencana Aksi yang dilakukan selama tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PPA I), yaitu dengan terus melanjutkan melakukan pemberitahuan dan Monev secara rutin kepada satuan kerja yang kinerjanya masih kurang.

7b- Indeks  
N  
Kualitas Pelaksanaan  
Pembinaan dan Monitoring  
Pinjaman dan Kredit Program

Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selaku representasi Kementerian Keuangan di daerah perlu melakukan tindakan terhadap permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah agar kewajiban Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Daerah/Badan Hukum Lainnya kepada Pemerintah dapat dipenuhi.

Tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan dimaksudkan untuk menjamin peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, peningkatan koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Untuk mengukur efektivitas tindakan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Gorontalo tersebut, diperlukan pengukuran kinerja yang dapat mencerminkan kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program. Kualitas pelaksanaan pembinaan diukur dari dua aspek, yaitu kualitas pembinaan itu sendiri serta ketepatan waktu penyusunan laporan.

Kualitas pembinaan dimaksudkan untuk mengetahui kesinambungan antara perencanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program dengan pelaksanaan pembinaan dan monitoring yang berupa :

- a. Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman
- b. Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu
- c. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program

Ketepatan waktu laporan dimaksudkan sebagai salah satu alat *early warning system* (EWS) yang digunakan oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi dalam menghadapi permasalahan pinjaman dan kredit program di daerah. Tujuan IKU ini adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pinjaman dan kredit program, koordinasi dan kecepatan penyampaian data kewajiban kepada debitur, dan tercapainya pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran.

Realisasi IKU ini diperoleh dari hasil penilaian kualitas pembinaan kredit program oleh Kantor Pusat Ditjen DJPb. Adapun mekanisme penilaian oleh Kantor Pusat DJPb adalah sebagai berikut:

Perhitungan IKU tersebut tahun 2019 didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut tiap semester masing-masing yang diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai} = \left\{ \left( \sum \text{Kualitas Pembinaan} \times 80\% \right) + \left( \text{Ketepatan Waktu} \times 20\% \right) \right\}$$

$$\text{Kualitas Pembinaan} = \left\{ (A1 \times 10\%) + (A2 \times 30\%) + (A3 \times 30\%) + (A4 \times 30\%) \right\}$$

**Keterangan:**

**A1 = Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program**

- 100 = Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017.  
Dokumen Perencanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program tidak  
50 = dibuat sesuai dengan kriteria dalam Perdirjen  
Perbendaharaan No. PER-19/PB/2017.

**A2 = Pembinaan dan monitoring atas pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman**

- 100 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017 .  
50 = Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan tidak sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017  
0 = Tidak dilakukan Pembinaan dan Monitoring atas Pemberian Pinjaman Pemerintah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman

**A3 = Rekonsiliasi Outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu**

Tepat waktu adalah debitur melakukan rekonsiliasi pinjaman dengan kanwil sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, yaitu paling lambat akhir Juli untuk Semester I dan akhir Januari tahun berikutnya untuk Semester II, atau mengacu pada kebijakan khusus yang ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Andal adalah rekonsiliasi dilaksanakan sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Rekonsiliasi sebagai bentuk persetujuan atas kebenaran data. Komponen penghitungan IKU ini berdasarkan jumlah pinjaman yang harus dilakukan rekonsiliasi, bukan berdasarkan jumlah debitur, mengingat satu debitur dapat mempunyai pinjaman lebih dari satu.

$$\left( \frac{\sum \text{Pinjaman yang direkonsiliasi secara tepat waktu dan andal}}{\sum \text{Pinjaman yang seharusnya direkonsiliasi}} \right) \times 100\%$$

**A4 = Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kredit Program**

- 100 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017  
50 = Dilakukan satu kali dalam enam bulan dan dilaksanakan sesuai dengan kriteria pada PER-19/PB/2017  
0 = tidak dilakukan monitoring

**Ketepatan Waktu =**

1 hari sd 5 hari sesudah semester berakhir	100
6 hari sd 10 hari sesudah semester berakhir	80
11 hari sd 15 hari sesudah semester berakhir	50
16 hari sd 20 hari sesudah semester berakhir	25
Diatas 20 hari	0

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan semesteran, dan jenis

konsolidasi periode menggunakan *average* (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata dalam periode bersangkutan).

Target IKU  
Tahun 2019

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 sebesar 78 sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2019 dengan periode pelaporan semesteran. Dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015- 2019 terdapat IKU yang identik dengan IKU ini namun hanya mengukur dari persentase rekonsiliasi outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu sehingga tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple*. IKU ini tidak ditargetkan pada Rencana Strategis (Renstra) DJPb Tahun 2015-2019, Restra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Realisasi IKU  
Tahun 2019

Adapun realisasi tahun 2019 tersebut didapatkan dengan dengan perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.48.

**TABEL 3.48**  
Perhitungan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program Tahun 2019

Target/ Realisasi	Semester I	Semester II	Tahunan	Pol /KP
Target	78	78	78	Maximize/ Average
Realisasi	100	100	100	
Capaian	120	120	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.48, realisasi IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 100 dan telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu- *Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebesar 78 (dengan nilai capaian 120).

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2019  
dan tahun  
sebelumnya

Perbandingan realisasi IKU tersebut pada tahun 2019 dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat ditunjukkan Tabel 3.49.

**TABEL 3.49**  
Perbandingan IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program Tahun 2016—2019

Target/ realisasi	2016	2017	2018	2019	Ket.
Target KK	95%	97%	75	78	Pada tahun 2016 dan 2017 IKU ini hanya mengukur dari persentase rekonsiliasi outstanding pinjaman yang andal dan tepat waktu sehingga tidak dapat dibandingkan secara <i>apple to apple</i>
Realisasi	100%	N/A	91	100	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.49, realisasi IKU tersebut pada tahun 2016, 2018, dan 2019 masing-masing telah melampaui targetnya. Di tahun 2017 tidak terdapat realisasi disebabkan tidak terdapatnya debitur pinjaman *outstanding* di wilayah gorontalo.

Perbandingan  
Realisasi s.d.  
2019 dengan  
Renstra Kanwil  
Ditjen  
Perbendaharaan  
Provinsi  
Gorontalo dan  
Renstra  
Kementerian  
keuangan

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi yang dituangkan dalam Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.50.

**TABEL 3.50**

Perbandingan Realisasi IKU *Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program* s.d. 2019 dan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu
2019	100	100%	-	-
2018	91	100%	-	-
2017	N/A	97%	-	-
2016	100%	98%	-	-

Perbandingan  
Realisasi 2019  
dan Target  
Rencana  
Pembangunan  
jangka Menengah

Realisasi Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 dapat dikaitkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, yang memuat perencanaan kinerja jangka menengah pemerintah pada tingkat nasional. Realisasi *IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Pembinaan dan Monitoring Pinjaman dan Kredit Program* terhadap target pada RPJMN 2015-2019 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.51.

**TABEL 3.51**

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti* s.d. 2019 dan RPJMN 2015—2019

Tahun	Realisasi IKU	Target RPJMN 2015-2019	Keterangan
2019	100	-	<i>Tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada RPJMN Tahun 2015-2019</i>
2018	91	-	
2017	N/A	-	
2016	100%	-	



*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Realisasi sampai dengan triwulan IV tahun 2019 telah melampaui target. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian. Isu Utama dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Data yang tersedia dalam SIKP tidak update, sehingga menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan monev;
2. Debitur sampel terbatas;
3. Ketiadaan pinjaman outstanding di Provinsi Gorontalo menyebabkan capaian IKU tidak maksimal.

Hal tersebut berimplikasi pada Pemberian pinjaman dan subsidi secara tepat sasaran tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut adalah :

1. Pihak Bank tidak melakukan update kredit outstanding, sehingga ada beberapa debitur yang sudah lunas masih terdapat kredit di SIKP;
2. Daftar sampel debitur yang dapat dicetak dari aplikasi SIKP terbatas dan tidak hanya mengalami sedikit perubahan selama 2 tahun ini;
3. Pinjaman Daerah (RDI/RPD) dan Penerusan Pinjaman di Provinsi Gorontalo tidak/belum ada.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Monev, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo bekerja sama dengan SKPD terkait;
2. Adanya penandatanganan MoU dengan Pemda setempat;
3. Berkoordinasi dengan Dit. SMI untuk penyempurnaan aplikasi SIKP.

Rekomendasi rencana aksi terkait IKU tersebut yang dilakukan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang PPA II), yaitu dengan terus berkoordinasi dengan Dit SMI, untuk penyempurnaan aplikasi SIKP.

**Sasaran Strategis 8:**

**Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu**

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai Pengelola Perbendaharaan di daerah menyusun Laporan Keuangan secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Prinsip transparan dan akuntabilitas mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu dan jelas sebagai perwujudan pertanggungjawaban suatu unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang telah dikelola. Transparansi, akuntabilitas dan tepat waktu akan mendorong diungkapkannya kondisi yang sebenarnya sehingga setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dapat memperoleh informasi yang akurat, andal dan terkini. Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.52.

**TABEL 3.52**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis

*Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu*

<b>SS8: Akuntansi dan Pelaporan Keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu</b>				
<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Nilai</b>
8a-N	Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah	77	95.16	120

**8a-N Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat wilayah**

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Government Finance Statistic (GFS) telah menjadi salah satu milestones dalam reformasi manajemen keuangan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah, UU Nomor 1 tahun 2004 mengamanatkan agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik Keuangan Pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara. Berdasarkan peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 41/PB/2013, Kanwil Ditjen PBN mengkonsolidasikan seluruh data LKPD dalam wilayah kerjanya untuk selanjutnya dikonsolidasikan dengan data LKPP tingkat wilayah. Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah selanjutnya diproses untuk menghasilkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (GFS regional).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah ini selanjutnya secara periodik (triwulanan, semesteran dan tahunan) disampaikan kepada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit. APK) untuk dilakukan penilaian.

Kategori nilai Laporan Government Finance Statistic (GFS) tingkat Wilayah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 90-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 60-89 (Baik)

Level 2 = 40-59 (Cukup)

Level 1 = <39 (Kurang)

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini bertujuan untuk mewujudkan laporan GFS tingkat Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang berkualitas.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan Hasil penilaian Laporan *Government Finance Statistics* (GFS) tingkat wilayah oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. Dengan demikian, dapat diformulasikan perhitungan realisasi IKU sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Hasil penilaian Laporan Government Finance Statistics (GFS) tingkat wilayah oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan}}{\text{Target}}$$

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Target IKU  
Tahun 2019

Target IKU tersebut sebagaimana terdapat pada Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2019 adalah 77 dengan periode pelaporan tahunan. Dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 terdapat IKU yang identik dengan IKU ini namun hanya mengukur dari sisi ketepatan waktu penyampaian laporan GFS sehingga tidak dapat dibandingkan secara *apple to apple*. IKU tersebut tidak ditargetkan pada Rencana Strategis (Renstra) DJPb Tahun 2015-2019, Restra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Realisasi IKU  
Tahun 2019

Realisasi IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah adalah 95,16 berdasarkan hasil penilaian dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan sesuai KEP-271/PB/2019 tanggal 7 November 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penilaian LKPK-TW dan LSKP-TW Tahun 2018 Kategori kantor Wilayah Kecil, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Perbandingan  
realisasi dan  
target tahun  
2019

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.53

TABEL 3.53

Capaian IKU Nilai kualitas Laporan *Government Finance Statistic* (GFS) tingkat wilayah tahun 2019

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	77	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	95.16	
Nilai	120	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.53, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 95.16 tersebut melampaui target IKU sebesar 77 (dengan nilai capaian 120) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Perbandingan  
Realisasi IKU  
tahun 2019 dan  
tahun  
sebelumnya

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2019 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.54

**TABEL 3.54**  
Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas Laporan Government Finance Statistic  
(GFS) tingkat wilayah Tahun 2016 s.d. 2019

Tahun	Realisasi	Target
2019	95,16	77
2018	94,09	75
2017	95,35	70
2016	94,06	60

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU menurun pada tahun 2018 tetapi meningkat pada tahun 2019. Namun demikian seluruh realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan

Meskipun realisasi sebesar tersebut telah mencapai target yang ditentukan (100%), terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Isu utama yang mempengaruhi pencapaian IKU tersebut adalah:

1. Kertas Kerja pengolahan data GFS sering berubah-ubah sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memperoleh data final GFS.
2. Data LKPD pada beberapa Pemda belum dilengkapi data detil per jenis-jenis laporan keuangan sehingga perlu upaya untuk meminta kembali data detil sebagaimana yang dibutuhkan pada Kertas Kerja GFS.
3. Data pemerintah pusat pada Aplikasi OMSPAN tidak tersedia lebih awal.
4. Validitas data pemda masih kurang memadai.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan LKPD sebagai sumber data pembuatan GFS.
2. Konsultasi dan koordinasi dengan Dit. APK.
3. Membentuk forum komunikasi Akuntansi dengan Pemerintah Daerah.
4. Mengundang pemda untuk rapat dalam penyusunan LKPD Konsolidasian.
5. Menyelenggarakan seminar akuntansi dengan melibatkan semua Pemda di lingkup Kanwil Gorontalo dengan mengundang Narasumber dari Dit. APK/KSAP.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2017 (penanggung jawab: Bidang PAPPK), yaitu :

1. Melanjutkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mendapatkan LKPD sebagai sumber data pembuatan GFS melalui FGD, sosialisasi, seminar dan pembinaan *On the Spot*.
2. Menggunakan aplikasi SIKD dalam pengumpulan data Pemda.
3. Melakukan pendampingan penyusunan LKPD ke Pemda.
4. Melakukan pendampingan ke BKAD terkait temuan-temuan BPK.

Sasaran  
Strategis 9:

SDM yang  
kompetitif

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat dan mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

TABEL 3.55  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
*SDM yang kompetitif*

SS 9: SDM yang kompetitif				
Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
8a-CP	Nilai rata-rata hard competency pegawai	77	88,72	115,22

8a-CP Nilai rata-rata hard competency pegawai

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan *hard competency* pegawai. Pengukuran tingkat pemahaman terhadap tugas dan fungsi dilakukan dengan cara memberikan tes secara online kepada para pegawai, yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan. Untuk Kemenkeu-*Two* Kanwil, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai Kanwil. Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing. Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol). Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai rata-rata hard competency pegawai** bertujuan untuk mendorong Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan sebagai pimpinan unit agar secara berkelanjutan selalu melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kompetensi para pegawai.

Formula perhitungan IKU Nilai rata-rata hard competency pegawai ditunjukkan sebagai berikut:

Jumlah Nilai Hard competency pegawai kanwil

Jumlah pegawai kanwil yang mengikuti tes hard competency

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Realisasi IKU tersebut tahun 2019, yaitu sebesar 89,9 , telah melebihi target yang telah ditetapkan (77) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.56.

**TABEL 3.56**

Capaian IKU Nilai rata-rata *hard competency pegawai* Tahun 2019

T/R	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Y-18	Pol /KP
Target	-	-	-	-	-	77	77	Maximize/ Take Last Known Value
Realisasi	-	-	-	-	-	89,9	89,9	
Capaian	-	-	-	-	-	116,75	116,75	

Realisasi tersebut tahun 2019 sebesar 89,9 meningkat dibanding realisasi tahun 2018 sebagaimana ditunjukkan target dan realisasinya pada Tabel 3.57.

**TABEL 3.57**

Perbandingan Capaian IKU Nilai rata-rata *hard competency pegawai* Tahun 2016 s.d. 2019

Target/ realisasi	2016	2017	2018	2019
Target KK	72	75	77	77
Realisasi	91,64	91,28	88,72	89,9

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.57, realisasi IKU tersebut pada tahun 2016 s.d. 2019 masing-masing telah melampaui targetnya.

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi selama tiga tahun kedua rencana jangka menengah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.58.

**TABEL 3.58**

Perbandingan Realisasi IKU Nilai rata-rata *hard competency pegawai* s.d. 2019 dan Renstra 2015—2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu
2019	89,9	90	-	-
2018	88,72	90	-	-
2017	91,28	90	-	-
2016	91,64	90	-	-

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.58 nilai realisasi tahunan IKU sebesar 89,9 untuk tahun 2019 tidak dapat dilakukan perbandingan secara *appel to apple* karena terdapat perbedaan ruang lingkup perhitungan dimana dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo hanya mengukur dari sisi persentase jumlah pegawai yang mendapat nilai *hard competency 'baik'*.

*Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan*

Ruang lingkup tes untuk mengukur pemenuhan *hard competency* adalah kemampuan teknis pekerjaan di setiap unit eselon IV dan kemampuan umum tentang Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tes dimaksud dilakukan secara online dan diikuti oleh 19 orang pelaksana pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada tahun 2019. Dari 19 orang pegawai yang mengikuti tes online penguasaan *hard competency*, pegawai yang telah memenuhi standar minimal tes *hard competency* sejumlah 13 atau sebanyak 68,42%. Dapat diketahui juga bahwa nilai rata-rata penguasaan nilai *hard competency* dari seluruh pegawai yang mengerjakan tes online dimaksud adalah 89,9. Terjadi peningkatan realisasi pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 (realisasi IKU tahun 2018 adalah 88,72).

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan IKU tersebut, yaitu:

1. Melaksanakan GKM internal, knowledge transfer, maupun *coaching and counseling* terkait tuis masing-masing Bidang/Bagian
2. Mengusulkan diklat, FGD, Seminar, studi banding, dan kegiatan sejenis.
3. Memotivasi pegawai untuk terus meningkatkan *hard competency*

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan untuk pemenuhan *hard competency* di tahun 2019 (penanggung jawab: Bagian Umum), yaitu dengan terus mempelajari aturan terkait tuis masing-masing Bidang/Bagian serta segera membahas peraturan terbaru pada saat peraturan tersebut dikeluarkan.

**Sasaran Strategis 10:**  
**Organisasi yang fit for purpose**

Organisasi yang fit for purpose tercermin dengan adanya perilaku anggota organisasi yang memiliki komitmen kuat terhadap organisasi, hubungan yang harmonis di antara setiap anggota organisasi, serta motivasi dan etos kerja yang tinggi. Organisasi kondusif dapat tercipta jika beberapa faktor berikut dapat berjalan dengan baik antara lain pola komunikasi dan hubungan-hubungan dalam interaksi antarpersonal yang mempengaruhi suasana kerja; program pengembangan SDM dan kualitas kerja; alur dan prosedur pelaksanaan kegiatan, model jalur koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan kerja; mekanisme penyampaian pendapat dan tingkat kebebasan dalam menyampaikan pendapat; serta program peningkatan kesejahteraan (termasuk pola jenjang karir). Dengan organisasi yang kondusif, pencapaian tujuan organisasi akan berjalan dengan baik. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.59.

**TABEL 3.59**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
*Organisasi yang fit for purpose*

<b>SS10: Organisasi yang fit for purpose</b>				
<b>Kode</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Nilai</b>
10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	78	93,02	119,26
10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	81	94,27	116,38

**10a-N** **Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal**

Uraian mengenai IKU tersebut :

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan. Penilaian tersebut dilakukan oleh Setditjen Perbendaharaan c.q. Bagian Kepatuhan Internal. Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen No. KEP-415/PB/2017 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan dan pemantauan pengendalian intern (bobot: 35%)
3. Kode etik dan disiplin pegawai (bobot: 20%)

Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal** bertujuan untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

Realisasi IKU ini diperoleh dari hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi



terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 83 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut lebih besar dari target IKU tersebut tahun 2018 (78).

Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah 86,9 berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dari kantor Pusat Ditjen Perbandaharaan sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perbandaharaan Nomor : KEP- 301/PB/2019 tentang Penetapan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal Tahun 2019.

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.60.

**TABEL 3.60**

Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2019

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	83	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	86,9	
Nilai	104,69	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.61, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 86,9 tersebut melampaui target IKU sebesar 83 (dengan nilai capaian 104,69) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbandaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2019 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.61.

**TABEL 3.61**

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2016 s.d. 2019

Tahun	Realisasi	Target
2019	86,9	83
2018	93,02	78
2017	89,31	77
2016	82,66	75

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan seluruh realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 telah memenuhi target yang telah ditentukan.

Perbandingan  
Realisasi s.d. 2019  
dengan Renstra  
Kanwil Ditjen  
Perbendaharaan  
Provinsi  
Gorontalo,  
Renstra DJPb dan  
Renstra  
Kementerian  
keuangan.

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.62.

**TABEL 3.62**  
Perbandingan Realisasi IKU *Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal*  
s.d. 2019 dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	86,9	80	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019</i>
2018	93,02	80	-	-	
2017	89,31	80	-	-	
2016	82,66	80	-	-	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.62, meskipun realisasi IKU pada tahun 2019 mengalami penurunan namun nilai realisasi tahunan IKU untuk tahun 2016 s.d 2019 telah memenuhi target yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019.

Meskipun realisasi sebesar tersebut telah mencapai target yang ditentukan (100%), terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dalam melakukan perumusan komponen komponen terkait dengan identifikasi risiko sehingga:

1. Ada alur yang logis antara apa yang terjadi, penyebab, kapan terjadinya, dan konsekuensi.
2. Relevansi dan sasaran IKU yang dituju.
3. Ketepatan dalam menetapkan kategori risiko.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Adanya kegiatan pendampingan/asistensi dari Kantor Pusat dalam rangka penyusunan profil risiko tahun 2019.
2. Rapat evaluasi pelaksanaan tugas Kepatuhan internal triwulan I, II, III dan IV tahun 2019. Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada tahun 2019 (penanggung jawab: Bidang SKKI), yaitu dengan melanjutkan pelaksanaan rapat evaluasi pelaksanaan tugas Kepatuhan internal setiap triwulan serta dengan mengadakan rapat/GKM terkait manajemen risiko dan pengendalian intern.

Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization (SFO)*. Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

1. Nilai Kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2019 (70%).
2. Nilai NKO Unit periode tahunan 2018 (30%).

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*** bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pengelolaan kinerja di setiap unit lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan *maximize* (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan *take last known value* (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir).

*Target IKU  
Tahun 2019*

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah sebesar 83 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut lebih besar dari target IKU tersebut tahun 2018 (81) dan tahun 2017 (79). Target tersebut lebih besar dari target IKU pada Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 untuk tahun 2019 walaupun terdapat perbedaan *wording* IKU yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo yaitu IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja.

*Realisasi IKU  
Tahun 2019*

Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* adalah 93,27 berdasarkan hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-303/PB/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Penetapan peringkat penilaian pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2019.

*Perbandingan  
realisasi dan  
target tahun  
2019*

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.63

**TABEL 3.63**

Capaian IKU Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tahun 2019

Target/ Realisasi	Tahunan	Pol /KP
Target	83	Maximize/ Take Last Known
Realisasi	93,27	
Nilai	112,37	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.63, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 93,27 tersebut melampaui target IKU sebesar 83 (dengan nilai capaian 112,37) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-TwoKanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahun 2019 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.64.

**TABEL 3.64**

Perbandingan Capaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2016 s.d. 2019

Tahun	Realisasi	Target
2019	93,27	83
2018	94,27	81
2017	89,31	79
2016	86,42	77

Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa realisasi IKU terus mengalami kenaikan dari tahun 2016 s.d. 2019. Walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun secara keseluruhan telah memenuhi target yang telah ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo.

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi tiga tahun kedua dari Renstra Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.65

**TABEL 3.65**

Perbandingan Realisasi IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* s.d. 2019 dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	93,27	80	-	-	
2018	94,27	80	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019</i>
2017	89,31	80	-	-	
2016	86,42	75	-	-	

Terdapat beberapa isu terkait dan menjadi tantangan pencapaian pencapaian IKU Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization*, antara lain :

1. Koordinasi yang kurang maksimal akan berdampak pada penyajian data kegiatan yang kurang lengkap dalam laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.
2. Pembinaan kepada KPPN terkait penyusunan, cara penyajian, dan kelengkapan dokumen pada laporan langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja perlu dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

Akar masalah dari hal tersebut diantaranya adalah :

1. Kesadaran para pegawai terhadap pentingnya pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja yang masih belum optimal karena mereka lebih terfokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang harus segera dilaksanakan sehingga pendokumentasiannya tidak dapat dilakukan secara optimal
2. Pengukuran nilai kinerja organisasi yang menggunakan Balance Scorecard belum sepenuhnya mencerminkan nilai kinerja individu pegawai, sedangkan Balance Scorecard itu sendiri digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perilaku dan kinerja organisasi.

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan IKU tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan Performance Dialogue/DKO setiap bulan.
2. Menyurat ke KPPN dan Nota Dinas ke para pejabat/pelaksana Kanwil dalam rangka penguatan koordinasi dalam pengelolaan kinerja.
3. Pendampingan dan pembinaan ke KPPN dalam rangka monev pengelolaan kinerja, asistensi RPK, dan evaluasi pengelolaan kinerja KPPN.
4. Kegiatan penyusunan buku langkah-langkah peningkatan kualitas PK dilakukan setiap hari/setiap kegiatan action plan selesai dilaksanakan untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan volume pekerjaan di tiap akhir periode permintaan laporan.
5. Membuat inovasi di bidang pengelolaan kinerja untuk menciptakan awareness para pegawai terkait pengelolaan kinerja.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan di tahun 2019 (penanggung jawab: Bagian Umum), yaitu :

1. Merutinkan pelaksanaan DKO setiap bulan;
2. Melakukan pembinaan kepada KPPN terkait pengelolaan kinerja terutama pada KPPN Marisa yang pada tahun 2019 hasilnya masih belum maksimal.

Sasaran  
Strategis 11:  
Pengelolaan  
sarana dan TIK  
yang optimal

Pengelolaan sarana dan TIK adalah proses manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dimiliki oleh suatu unit. Optimal adalah pengelolaan sarana dan TIK dapat menjamin pelaksanaan kegiatan dan tugas untuk mencapai tujuan organisasi dapat berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mengidentifikasi 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang pencapaiannya ditabulasikan dalam tabel 3.66.

**TABEL 3.66**  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
*Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal*

**SS 11: Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
11a-N	Persentase pemenuhan BMN yang optimal	92%	96,32%	104,69

11a-  
N  
Persentase  
pemenuhan  
BMN sesuai  
standar

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016 tentang Standarisasi Peralatan dan Mesin pada Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, standarisasi peralatan dan mesin pada Kanwil dan/atau KPPN terdiri dari standar jumlah dan spesifikasi, khususnya untuk peralatan dan mesin strategis yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi. Jenis BMN peralatan dan mesin pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai acuan standarisasi adalah sebanyak 11 (sebelas), yaitu

- (1) PC,
- (2) Laptop/Notebook,
- (3) LCD Projector,
- (4) Scanner,
- (5) UPS,
- (6) Printer,
- (7) Komputer Server,
- (8) CCTV,
- (9) Mesin Absensi,
- (10) Facsimile,
- (11) Televisi.

Sedangkan, spesifikasi dan standar jumlah dari masing-masing jenis BMN mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-32/PB/2016. Dalam rangka pemetaan BMN lingkup unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, Setditjen Perbendaharaan meminta Kanwil dan KPPN menyampaikan data BMN peralatan dan mesin pada masing-masing unit secara periodik.

Indikator Kinerja Utama (IKU) **Persentase pemenuhan BMN yang optimal** bertujuan untuk mendorong Kanwil untuk menyusun/merumuskan strategi pengelolaan BMN peralatan dan Mesin secara optimal.

Atas penyampain data BMN peralatan dan mesin dimaksud, Setditjen perbendaharaan c.q. Bagian Umum melakukan evaluasi atas pemenuhan standar BMN dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$BMN \times \frac{\text{jumlah jenis BMN peralatan dan mesin yang tersedia}}{\text{jumlah jenis BMN peralatan dan mesin sesuai SF-32 (11)}} + 20\% \times \frac{\text{jumlah BMN peralatan dan mesin yang memenuhi spesifikasi SF-32}}{\text{jumlah BMN peralatan dan mesin yang harus terpenuhi sesuai SF-32}}$$

Target IKU  
Tahun 2019

Target IKU tersebut untuk tahun 2019 adalah 92% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019. Target sebesar 92% tersebut lebih kecil dari target Persentase Barang Milik Negara dengan kondisi baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 (95%). Dalam renstra kanwil terdapat perbedaan *wording* IKU dimana pada renstra kanwil mengukur dari sisi pemenuhan BMN dalam kondisi baik sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara *apple to apple*.

Realisasi IKU  
Tahun 2019

Realisasi IKU Persentase pemenuhan BMN yang optimal tahun 2019 adalah 96,32% sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Nomor : ND-3/PB.1/2020 tanggal 2 Januari 2020 hal Capaian IKU Persentase Pengelolaan BMN yang optimal Periode Semester II pada Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Perbandingan  
realisasi dan  
target tahun  
2019

Dengan demikian realisasi IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan capaiannya pada Tabel 3.67.

**TABEL 3.67**  
Capaian IKU *Persentase pemenuhan BMN sesuai standar* tahun 2019

Target/ Realisasi	Smt I	Smt II	Tahunan	Pol /KP
Target	70%	92%	92%	Maximize/ Take Last Known Value
Realisasi	84,68%	96,32%	96,32%	
Nilai	120	104,69	104,70	

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.68, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 96,32% tersebut melampaui target IKU sebesar 92% (dengan nilai capaian 104,70) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

Untuk diketahui perkembangannya dari tahun ke tahun, capaian IKU tahunan 2019 dapat dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.68.

**TABEL 3.68**  
Perbandingan Capaian IKU *Persentase pemenuhan BMN sesuai standar* Tahun 2016 s.d. 2019

Tahun	Realisasi			Target Tahunan
	Smt I	Smt II	Tahunan	
2019	84,68%	96,32%	104,69%	92%
2018	95,62%	103,02%	103,02%	91%
2017	90,80%	94,97%	94,97%	90%
2016	93,36%	92,82%	92,82%	80%

Perbandingan  
Realisasi s.d.  
2019 dengan  
Renstra Kanwil  
Ditjen  
Perbendaharaan  
Provinsi  
Gorontalo,  
Renstra Djpb dan  
Renstra  
Kementerian  
keuangan

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi dari Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.69.

**TABEL 3.69**  
Perbandingan Realisasi IKU *Persentase pemenuhan BMN sesuai standar*  
s.d. 2019 dengan Renstra 2015-2019

Tahun	Realisasi IKU Tahunan	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu	Keterangan
2019	96,32%	95%	-	-	<i>tidak terdapat penargetan IKU tersebut pada Renstra DjPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019</i>
2018	103,02%	95%	-	-	
2017	94,97%	95%	-	-	
2016	92,82%	95%	-	-	

**Ket :** Dalam renstra kanwil terdapat perbedaan wording IKU dimana pada renstra kanwil Mengukur dari sisi pemenuhan BMN dalam kondisi baik sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan secara *apple to apple*.

Isu,  
permasalahan,  
tindakan, dan  
action plan

Meskipun target IKU tercapai, namun untuk pemenuhan seluruh BMN yang sesuai dengan standar SE-32/PB/2016 masih terbentur dengan alokasi anggaran yang tersedia. Dengan demikian, dapat diidentifikasi sebagai akar permasalahan dalam optimalisasi pencapaian IKU ini antara lain adalah Banyak BMN pengadaan sebelum tahun 2015 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:

1. Melakukan identifikasi Aset yang belum memenuhi standard dan melakukan peningkatan/upgrade spesifikasi terhadap aset yang masih bisa dilakukan peningkatan/upgrade dan dilakukan penggantian/pengadaan baru untuk aset yang sudah tidak bisa diupgrade;
2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat DJPb terkait dengan pengadaan baru atau peningkatan spesifikasi Aset Peralatan Mesin yang tidak dapat dilakukan oleh Kanwil.

Selain itu, terdapat rekomendasi rencana aksi (*action plan*) untuk meningkatkan capaian mendatang IKU tersebut yang dilakukan selama tahun 2019 (penanggung jawab: Bagian Umum), yaitu pengadaan aset agar dilakukan secara terpusat sehingga standarisasi aset di setiap Kantor Vertikal dapat terjaga



Sasaran Strategis 12:

Pengelolaan anggaran yang optimal

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi *output* sebagaimana telah direncanakan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

TABEL 3.70  
Capaian IKU pada Sasaran Strategis  
*Pengelolaan anggaran yang optimal*

**SS 12: Pengelolaan anggaran yang optimal**

Kode	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	96,64%	101,73

Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut:

Unsur yang diukur terdiri dari 4 kriteria, yaitu penyerapan anggaran atas pagu neto, keluaran riil, efisiensi, dan konsistensi (SE-35/2017) dengan bobot 90% dan 12 Indikator Pelaksanaan Anggaran dari Ditjen Perbendaharaan dengan bobot 10%.

- Penyerapan anggaran atas pagu neto adalah realisasi anggaran atas belanja barang dan belanja modal terhadap anggaran sebagaimana tercantum dalam RKA-K/L dan DIPA, tidak termasuk self- blocking, hasil efisiensi, dan dana khusus.
- Keluaran Riil adalah barang/jasa sebagai hasil akhir setiap/serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh unit/satker pada satu tahun anggaran dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- Efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal. Hasil efisiensi dihitung apabila capaian setiap keluaran riil paling sedikit 100%.
- Konsistensi adalah kesesuaian antara realisasi penarikan dana bulanan belanja barang dan modal dengan RPD bulanan belanja barang dan modal sesuai Lembar Ketiga DIPA; atau RPD revisi pertama; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan APBN-P; atau RPD revisi pertama setelah penetapan kebijakan self blocking.
- 12 Indikator yang terdiri dari Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Penyampaian LPJ Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Kesalahan SPM, Pagu Minus Belanja Pegawai, Dispensasi SPM.

12a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil

Dengan demikian, perhitungan realisasi IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = [(\% \text{ capaian keluaran} \times 30\%) + (\% \text{ efisiensi} \times 15\%) + (\% \text{ konsistensi} \times 10\%) + (\% \text{ penyerapan anggaran atas pagu netto} \times 15\%)] + [(\% \text{ penyelesaian tagihan} \times 4\%) + (\% \text{ penyampaian data kontrak} \times 3\%) + (\% \text{ pengelolaan UP} \times 4\%) + (\% \text{ perencanaan kas} \times 2\%) + (\% \text{ penyampaian LPJ} \times 2\%) + (\% \text{ pengembalian SPM} \times 3\%) + (\% \text{ retur SP2D} \times 3\%) + (\% \text{ revisi DIPA} \times 5\%) + (\% \text{ pagu minus} \times 2\%) + (\% \text{ dispensasi SPM} \times 2\%)]$$

Target IKU  
Tahun 2019

Target IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* Kanwil untuk tahun 2019 adalah sebesar 95% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja Kemenkeu-*Two* tahun 2019. Target tersebut sama dengan target IKU tersebut tahun 2017 dan 2018, Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019, dan Renstra Kementerian Keuangan tahun 2015-2019.

Realisasi IKU  
Tahun 2019

Realisasi IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* Kanwil Tahun 2019 adalah 99,53%. Persentase tersebut diperoleh dari nilai realisasi terakhir periode pelaporan pada tahun 2019, yaitu nilai pada triwulan IV. Perhitungan nilai tersebut dapat ditunjukkan pada Tabel 3.71.

**TABEL 3.71**  
Uraian Perhitungan Realisasi IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran kanwil* Tahun 2019

No.	Indikator	Bobot	Q1	Q2	Q3	Q4
1	Capaian Kinerja	30%	N/A	N/A	N/A	30%
2	Efisiensi	15%	N/A	N/A	N/A	14,54%
3	Peny. Anggaran Neto	15%	15%	15%	15%	15%
4	Konsistensi	10%	9,78%	9,87%	10%	9,86%
5	Revisi DIPA	5%	5%	5%	5%	5%
6	Penyelesaian Tagihan	4%	N/A	N/A	N/A	0%
7	Pengelolaan UP	4%	4%	4%	4%	4%
8	Datat Kontrak	3%	N/A	N/A	N/A	0%
9	Kesalahan SPM	3%	3%	3%	3%	3%
10	Retur SP2D	3%	3%	3%	3%	3%
11	Renkas	2%	N/A	N/A	N/A	0%
12	Penyampaian LPJ	2%	2%	2%	2%	2%
13	Pagu Minus	2%	N/A	N/A	N/A	2%
14	Dispensasi	2%	N/A	N/A	N/A	2%

Perbandingan  
realisasi dan  
target tahun  
2019

Dengan demikian, realisasi IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* kanwil tahun 2019 telah melebihi targetnya (95%) sebagaimana ditunjukkan perbandingan realisasi dan target untuk setiap triwulannya pada Tabel 3.72.

**TABEL 3.72**  
Capaian IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran kanwil* Tahun 2019

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahunan	Pol /KP
Target	95%	95%	95%	95%	95%	Maximize/ Average
Realisasi	99,48%	99,69%	99,59%	99,37%	99,53%	
Capaian	104,72	104,94	102,24	104,76	104,81	

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2016 s.d. 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.73.

**TABEL 3.73**

Perbandingan Capaian IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran kanwil* Tahun 2016 s.d. 2019

IKU Tahun	Realisasi						
	Q1	Q2	Smt.1	Q3	Sd. Q3	Q4	Tahunan
2019	99,48%	99,69%	99,59%	99,59%	99,59%	99,37%	99,53%
2018	38,03%	69,67%	69,67%	86,87%	86,87%	96,64%	96,64%
2017	38,56%	49,26%	49,26%	80%	80%	100,06%	100,06%
2016	26,28%	49,89%	49,89%	86,62%	86,62%	103,55%	103,55%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.73, capaian IKU *Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran* kanwil Tahun 2019 berbeda dengan capaian di tahun-tahun sebelumnya karena jenis penilaian serta target mengalami perubahan.

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2019 mencerminkan realisasi rencana jangka menengah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.74

**TABEL 3.74**

Perbandingan Realisasi IKU *Persentase kualitas pelaksanaan anggaran* s.d. 2019 dan Renstra 2015—2019

Tahun	Realisasi IKU	Renstra Kanwil	Renstra DJPB	Renstra Kemenkeu
2019	99,53%	95%	95%	95%
2018	96,64%	95%	95%	95%
2017	100,06%	95%	95%	95%
2016	103,55%	95%	95%	95%

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.74, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 99,53% untuk tahun 2019 tersebut telah melampaui target tahunan yang ditetapkan dalam Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renstra DJPb Tahun 2015-2019 dan Renstra Kementerian Keuangan 2015-2019 (pada keduanya ditargetkan sebesar 95%).

Isu terkait pencapaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2019 antara lain:

1. Terdapat beberapa kegiatan yang belum tersedia/tidak mencukupi alokasi anggarannya sehingga mengurangi kecepatan pembayaran.
2. Adanya penghematan anggaran sehingga mengakibatkan penyesuaian beberapa rencana kegiatan melalui revisi anggaran Satker Kanwil (DIPA dan POK).

Akar Permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu DIPA/POK awal kurang mengakomodir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan.

Tindakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2019 untuk mendukung pencapaian IKU tersebut antara lain:

1. Berkoordinasi dengan bidang/bagian terkait agar alokasi anggaran kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dan segera mengajukan usulan revisi DIPA/POK apabila anggaran yang tersedia belum ada/kurang.
2. Telah dilakukan revisi anggaran untuk mengakomodir kegiatan yang akan dilaksanakan pasca adanya penghematan anggaran dan melakukan penggabungan pelaksanaan kegiatan yang melibatkan stakeholder yang sama dalam rangka efisiensi anggaran.

Rekomendasi rencana aksi yang dilakukan pada triwulan I tahun 2019 dengan penanggung jawab Bagian Umum, yaitu:

1. Melakukan koordinasi dengan Bidang PPA I atau Ditjen Anggaran apabila terdapat usulan revisi DIPA.
2. fleksibilitas alokasi anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan menyesuaikan anggaran untuk membiayai kegiatan prioritas terutama setelah adanya penghematan.
3. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran TA 2019 sekaligus evaluasi dan revisi anggaran dan melakukan efisiensi (Triwulan I s.d. IV 2019).

## LAIN-LAIN

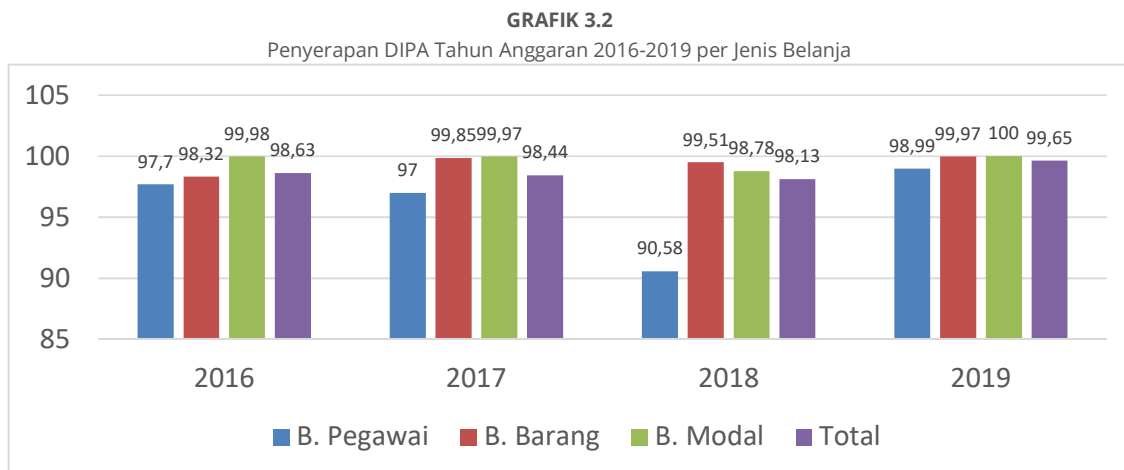
- ❖ Pada Capaian Kinerja Organisasi tahun 2019, tidak seluruh IKU dapat menggambarkan pencapaian dari Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019 dikarenakan keterbatasan jumlah IKU yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-*Two* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Namun demikian, dalam setiap *refinement* Peta Strategi dan IKU tiap tahunnya tetap mengacu pada dokumen Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2015-2019, Renja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, dan dokumen perencanaan lainnya.
- ❖ Selanjutnya, dalam rangka tetap memonitor perencanaan strategis dalam Renstra Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019, IKU yang tidak terdapat pada Kontrak Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 tetap diukur melalui penetapan dalam Kontrak Kinerja di level Kemenkeu-*Three* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, serta Kemenkeu-*Three* KPPN tahun 2019. Selain itu, seluruh unit kerja di lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo diminta untuk melaporkan realisasi capaian kinerja tiap triwulanan secara berjenjang.

### 1. Realisasi DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo TA 2019

Berdasarkan data per 13 Januari 2020 dengan menggunakan *online monitoring* SPAN, realisasi penyerapan DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo TA 2019 untuk semua jenis belanja sebesar Rp3.808.326.934 atau mencapai 99,65% dari total pagu sebesar Rp3.815.166.000.

Seluruh kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2019, realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp575.885.000 (98,99% dari pagu sebesar Rp581.784.000), belanja barang mencapai sebesar Rp2.913.056.634 (99,97% dari pagu sebesar Rp 2.913.994.000), dan belanja modal sebesar Rp319.385.300 (100% dari pagu sebesar Rp319.388.000).

Persentase penyerapan DIPA per jenis belanja tahun 2016 s.d. 2019 ditunjukkan pada Grafik 3.2.



Sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 3.2, persentase penyerapan DIPA secara keseluruhan menurun dari tahun 2016 (98,63%) ke tahun 2017 (98,44%) dan juga menurun pada tahun 2018 (98,13%) namun akhirnya kembali meningkat di tahun 2019 (99,65%). Persentase penyerapan tertinggi pada tahun 2019 adalah pada belanja modal yang mencapai 100%.

## 2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA TA 2019 per Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, pada tahun anggaran (TA) 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo melaksanakan 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) output. Adapun realisasi DIPA atas 4 (empat) output tersebut pada TA 2019 ditunjukkan pada Tabel 3.75.

**TABEL 3.75**

Realisasi DIPA Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019 per Output

Kode	Program / Kegiatan	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi	%
Kegiatan : Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wlayah (015.08.09.1706)				
003	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Tingkat Wilayah	142.102.000	142.098.426	100%
009	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	450.814.000	449.981.014	99,82%
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	319.388.000	319.385.300	100%
994	Layanan Perkantoran	2.902.862.000	2.896.862.194	99,79%
Jumlah		3.815.166.000	3.808.326.933	<b>99,90%</b>

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.76, terdapat satu kegiatan pada DIPA Kanwil yaitu kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah (1706) dan dibagi kedalam empat output dengan realisasi sebesar Rp3.815.166.000 atau sebesar 99,90% dari total pagu. Realisasi DIPA Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo Tahun 2019 per output tersebut dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2018) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.76.

Tabel 3.76 Perbandingan Realisasi DIPA TA 2018 dan 2019 per Jenis Kegiatan

Kode Output	Pagu Revisi	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	2019			2018		
003	142.102.000	142.098.426	100%	218.596.000	218.395.665	99,91%
009	450.814.000	449.981.014	99,82%	536.454.000	535.396.464	99,80%
951	319.388.000	319.385.300	100%	953.958.000	942.068.048	98,75%
994	2.902.862.000	2.896.862.194	98,79%	2.635.946.000	2.568.037.280	97,42%
Jumlah	3.815.166.000	3.808.326.933	<b>99,90%</b>	4.454.954.000	4.263.897.457	<b>98,13%</b>

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.76, penyerapan anggaran seluruh output Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo meningkat dibandingkan tahun 2018.

### 3. Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya

Sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE- 35/MK.01/2015 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, efisiensi adalah hasil lebih atau sisa dana belanja barang dan belanja modal dengan 11 objek efisiensi sebagai berikut:

- a. Perjalanan Dinas;
- b. Rapat Dalam Kantor;
- c. Konsinyering/paket meeting;
- d. Kudapan dan Makan Siang Rapat;
- e. Langganan daya dan jasa (listrik, air, telepon, dan internet);
- f. Honorarium Tim, Narasumber, Moderator, Kepanitiaan, dan kegiatan lainnya, kecuali kegiatan untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- g. Seluruh proses pengadaan barang/jasa, baik yang bersifat swakelola maupun pemilihan penyedia barang/jasa, sebagaimana diatur dalam peraturan terkait pengadaan barang/jasa;
- h. Belanja Operasional/Perkantoran;
- i. Belanja Jasa;
- j. Belanja Pemeliharaan;
- k. Belanja Barang Operasional dan Non Operasional lainnya.

Dengan demikian, hasil efisiensi adalah sisa dana belanja barang dan belanja modal dari jumlah pagu dan realisasi atas objek-objek efisiensi sebagaimana di atas. Hasil efisiensi tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Hasil efisiensi} = \sum \text{pagu objek efisiensi} - \sum \text{realisasi pagu objek efisiensi}$$

Hasil efisiensi tersebut dihitung apabila capaian setiap keluaran riil paling sedikit 100% (tercapai *output*-nya). Berdasarkan laporan dari setiap unit dan Satker, hasil efisiensi pada Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp 6.839.066 atau 0,0% dari pagu objek efisiensi Rp. 3.750.794.000 dengan perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.77.



Tabel 3.77 Perbandingan pagu dan realisasi serta hasil efisiensi dana belanja barang dan belanja modal

No	Kegiatan/Output	Pagu Belanja Barang dan Modal (objek efisiensi)	Realisasi Belanja Barang dan Modal (objek efisiensi)	Hasil Efisiensi	%
<b>1706: Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah</b>					
003	Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Tingkat Wilayah	142.102.000	142.098.426	3.574	0,00%
009	Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah	450.814.000	449.981.014	832.986	0,00%
951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	319.388.000	319.385.300	2.700	0,00%
994	Layanan Perkantoran	2.902.862.000	2.896.862.194	5.999.806	0,00%
<b>JUMLAH</b>		3.815.166.000	3.808.326.933	6.839.066	<b>0,00%</b>

Selain 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) yang diterapkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dengan capaian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2019 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja namun masih terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. INOVASI MANAJEMEN/PELAYANAN

#### a) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Menghasilkan Berbagai Macam Inovasi dan Kreativitas



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengawal implementasi PUG di Provinsi Gorontalo, tidak hanya sebatas pada penyediaan sarana dan prasarana dan pelayanan, tetapi juga di tingkat kebijakan dan implementasi yang berdampak langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat baik

laki-laki, perempuan, maupun kelompok masyarakat rentan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah banyak melakukan inovasi dan kreativitas untuk meningkatkan pelayanan kepada berbagai macam stakeholders. Semua bentuk inovasi pelayanan yang responsif gender tersebut dilakukan berdasarkan hasil analisis dari data terpilah yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian dari data terpilah tersebut diwujudkan inovasi-inovasi diantaranya:

## 1. Inovasi Bidang Sarana Prasarana

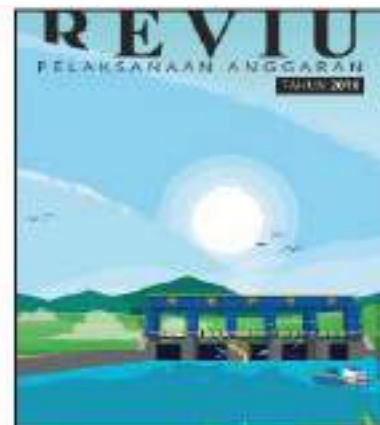


Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah menyediakan sarana prasarana sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi PUG Lingkup Ditjen Perbendaharaan. Namun berangkat dari kebutuhan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga melengkapi sarana prasarana yang responsif gender dengan menambah sarana prasarana diluar ketentuan SE tersebut yaitu:

1. *Activity Based Workplace*
2. *Limited Zone*
3. Mesin Antrian
4. Ruang Poliklinik
5. *PUG Corner*
6. Kursi roda dan kruk
7. Ruang Literasi
8. Kotak Saran
9. Layar Informasi dan Komputer Mandiri
10. Alat Pacu Jantung
11. *Mini Fitness Room*
12. *Free Wifi*
13. Kotak Charger
14. Kacamata Baca
15. Ruang Penitipan Anak
16. *Rest Area Driver*
17. Pojok Refleksi

## 2. Mengangkat Isu-Isu PUG dalam KFR dan RPA

Sebagai Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah yang memiliki tugas untuk melakukan analisis dan kajian di bidang perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi



Gorontalo memiliki peran penting untuk ikut serta dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil analisis dan kajian yang dilakukan tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan internal saja, namun juga dapat memberikan kontribusi dan solusi nyata baik kepada satker, pemerintah daerah, masyarakat, dan negara pada umumnya. Pada penyusunan KFR dan RPA tahun 2018 diangkat isu-isu PUG untuk di analisis dan direkomendasikan. Beberapa hasil rekomendasi dan isu yang diangkat seperti :

1. Memberikan hasil revid anggaran satker agar kegiatan mereka lebih responsif gender sesuai dengan PMK RKAKL dan Perpres 9 Tahun 2000.
2. Dampak positif yang dirasakan dari anggaran yang responsif gender terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah.
3. Memilih isu pengelolaan Dana Desa dalam mengangkat perekonomian desa sebagai analisis tematik.
4. Satker dapat mengalokasikan anggaran yang dimilikinya agar lebih responsif gender sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati secara sederajat/sama kegiatan yang dilaksanakan oleh satker.

### 3. Pelatihan Writing Skill untuk Menyuarakan Semangat PUG



Literasi merupakan cara yang paling efektif untuk menyampaikan suatu realitas isu dan gagasan solusi kepada masyarakat luas. Tulisan yang dapat terbit pada media masa baik cetak dan *online* dapat menjadi penyuar semangat penerapan PUG oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Gorontalo. Semangat mengasah dan mempertajam kemampuan penulisan literasi sangat menjadi perhatian bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Dengan kemampuan menulis yang memadai, diharapkan para ASN Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat menyuarakan dan menginformasikan ide, gagasan maupun pengetahuan melalui tulisan yang dapat dibaca masyarakat luas sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembacanya. Kegiatan yang dilakukan di tahun 2019 yaitu:

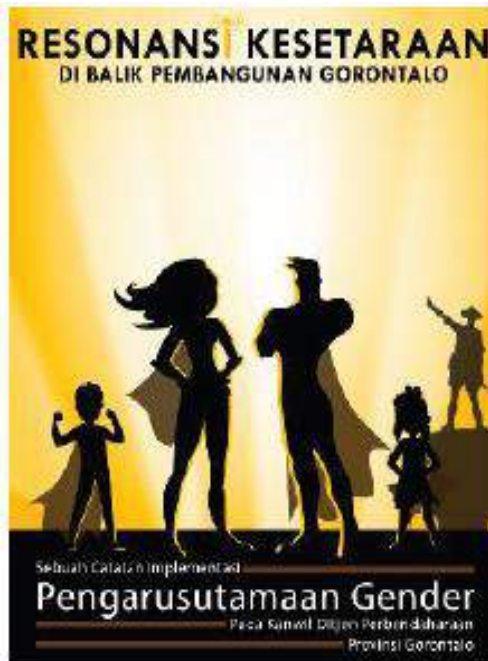
1. Bimtek Pengolahan Data Statistik  
Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 24 Mei 2019 dengan narasumber pejabat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.



2. Pelatihan *writing skill* tanggal 15 Agustus 2019 dengan narasumber dari Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, peserta dari seluruh pegawai Kanwil dan para pemenang lomba literasi perbendaharaan yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019.



#### 4. Penyusunan Buku Resonansi Kesetaraan di Balik Pembangunan Gorontalo



Sebuah kerja keras akan lebih bermakna jika tertulis dalam lembaran sejarah. Semangat menggemakan perspektif gender dan PUG kepada seluruh masyarakat di Gorontalo diperlukan sebuah rangkuman kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan agar manfaat dari Implementasi PUG pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat dirasakan lebih nyata bagi *stakeholder* dan masyarakat secara luas. Untuk itu Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyusun buku Implementasi PUG yang diberi judul

"Resonansi Kesetaraan di Balik Pembangunan Gorontalo". Selain itu, buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi penerapan Implementasi PUG bagi pihak lain.

#### 5. Pembuatan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Duta PUG

Buku ini disusun untuk memudahkan para Duta PUG dalam melaksanakan tugasnya. Buku berisi dasar hukum penunjukan Duta PUG, panduan apa-apa yang harus dilakukan oleh seorang Duta PUG, teknik presentasi, konsep dasar PUG, dan *Question and Answer* terkait PUG. Dengan buku ini diharapkan para Duta PUG dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif. Dan apabila ada pergantian Duta PUG, maka Duta PUG yang baru dapat langsung menjalankan tugasnya dengan berpedoman kepada buku ini.



## 6. Pembuatan Buku Saku PPRG untuk Satker



Menyadari akan arti pentingnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan, dan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan nilai IPM, IPG dan IDG di wilayah Gorontalo yang masih di bawah Nasional, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menginisiasi membuat buku saku PUG yang diperuntukkan bagi satker dalam proses penyusunan anggaran. Amanat penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi K/L telah termuat dalam PMK 94/PMK.02/2017 namun belum secara luas

diketahui oleh setiap satker. Penerapan ARG tersebut merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan antara perempuan dan laki-laki. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender). Diharapkan dengan disusunnya Buku saku PPRG ini setiap satker dapat memahami dan dapat melaksanakan penyusunan ARG-PPRG di satuan kerjanya sehingga dapat mengintegrasikan PUG saat menyusun kebijakan, program dan kegiatan pada RKAKL satker

### b) Melaksanakan Kegiatan *Treasury Awards* Tahun 2019

Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas diantaranya melakukan pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang perbendaharaan. Melihat tugas yang diembannya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam tercapainya tata kelola keuangan pemerintah yang baik. Agar perannya dapat terwujud dibutuhkan inovasi terus-menerus dalam pelaksanaan tugasnya agar tepat

sasaran dan lebih efektif. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah penyelenggaraan *Treasury Awards*. *Treasury Awards* adalah ajang apresiasi berupa pemberian penghargaan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang berkinerja baik dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Dalam Kegiatan *Treasury Awards* Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan



*Awards* adalah ajang apresiasi berupa pemberian penghargaan kepada satuan kerja dan pemerintah daerah yang berada di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang berkinerja baik dan memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Dalam Kegiatan *Treasury Awards* Tahun 2019 dalam rangka meningkatkan

pemahaman dan membuka wawasan terkait arah kebijakan akuntansi di masa depan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo mengundang Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kementerian Keuangan, Ibu R. Wiwin Istanti, S.E., Ak., M.Laws, untuk menyampaikan paparan dengan tema: "Pengaruh Revolusi Digital terhadap Perkembangan Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Pemerintah di Masa Depan". Dengan diadakannya kegiatan *Treasury Awards* diharapkan dapat memacu satuan kerja di daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja keuangannya ke arah yang lebih baik.





**c) Bermitra dengan Media Massa Setempat.**

Sebagai upaya memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat Gorontalo/*stakeholder* tentang pengelolaan keuangan negara terutama terkait Anggaran



Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berinisiatif menjalin kemitraan secara profesional dengan media massa setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka penyampaian informasi dan isu terkini terkait keuangan negara sekaligus

memberikan klarifikasi atas *tone* negatif tentang pengelolaan keuangan negara yang beredar di masyarakat. Beberapa media massa yang dipercaya untuk bermitra dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo di antaranya adalah Gorontalo Post, RRI Gorontalo, dan TVRI Gorontalo. Ketiga media massa tersebut dipilih karena diakui sebagai media massa terbesar di Gorontalo dan dapat



menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di Gorontalo. Melalui kemitraan ini



diharapkan informasi terkait keuangan negara dapat diperoleh secara langsung dari sumber yang terpercaya sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh seluruh lapisan masyarakat.

#### d) Pembuatan Buku Antologi Literasi Perbendaharaan



Program Literasi di DJPb bertujuan untuk mencetak SDM yang produktif dan berdaya saing serta mampu menuangkan ide dan menyuarakan informasi tidak hanya bagi organisasi namun juga masyarakat umum. Diharapkan ide dan informasi yang tertuang dapat mengedukasi masyarakat luas khususnya tentang pengelolaan Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara sehingga masyarakat sadar, paham, dan peduli dengan keuangan dan perbendaharaan negara. Kanwil Ditjen

Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyusun buku antologi literasi perbendaharaan yang berisi kumpulan berbagai artikel hasil dari penuangan ide, informasi, dan *sharing* pengalaman pegawai lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang telah dimuat di media cetak. Buku ini diberi judul "Torehan Tinta Emas Garda Treasury di Teluk Tomini". Diharapkan buku ini berguna sebagai bahan inspirasi dan juga sebagai media informasi yang dapat dijadikan pembelajaran dan penambah wawasan.

#### e) Inovasi Terkait Pengelolaan Kinerja (*Miss Kinerja*)

Inovasi terkait pengelolaan kinerja juga telah dilakukan terutama dalam rangka memberikan informasi secara berkala dan tepat waktu sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam melakukan pengelolaan kinerjanya masing-masing. Aplikasi yang disebut *Miss Kinerja* ini mempunyai fungsi untuk melakukan pengiriman pesan secara otomatis dan terjadwal melalui Aplikasi Whatsapp kepada



pejabat/pegawai yang belum melakukan upload dokumen pengelolaan kinerja berdasarkan hasil monitoring pada fitur perekaman dokumen pengelolaan kinerja dalam Aplikasi PBNOpen. Aplikasi ini juga berfungsi sebagai sarana konsultasi bagi pejabat/pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan khususnya terkait pengelolaan kinerja dengan pengelola kinerja di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sehingga dengan adanya aplikasi *Miss Kinerja*, pengelolaan kinerja pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan sangat baik.

**f) Inovasi Terkait Akuntansi Pemerintahan (Sistem Informasi Akuntansi Berdaya Guna (siAYA))**



Di era digital seperti saat ini, kebutuhan dan aktivitas yang serba cepat tidak dapat lepas dari perkembangan teknologi. *Google Site* merupakan suatu *tool* yang digunakan untuk menciptakan *custom website*. Untuk meningkatkan pelayanannya agar dapat diakses oleh semua *stakeholder*, dimana pun dan kapan pun, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi

Gorontalo berinovasi memanfaatkan *google site* yang diberi nama siAYA untuk menyebarluaskan informasi tentang akuntansi pemerintahan. Dengan adanya siAYA para *stakeholder* dengan cepat dan mudah mendapat informasi tentang akuntansi. siAYA sudah diujicobakan kepada para *stakeholder* dan sudah mendapat testimoni dari penggunaannya. Kedepan siAYA akan dikembangkan lebih luas tidak hanya terkait akuntansi tapi semua hal terkait bidang tugas Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

**g) Inovasi Terkait Keuangan dan Aset Daerah (Sistem Rekonsiliasi Kas yang Optimal (siReKam))**

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Boalemo sebagai salah satu *stakeholder* Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 memiliki permasalahan dalam hal rekonsiliasi Kas dan LPJ Bendahara pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah dimana penyajian data



yang dihasilkan dari Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) belum dapat memberikan LPJ Bendahara dan rekonsiliasi Kas yang sesuai. Dengan adanya Aplikasi siReKam yang berbasis *Microsoft Excell* ini dapat menjembatani kebutuhan akuntansi di seluruh SOPD pada Kabupaten Boalemo. Selain itu, manfaat yang didapat dengan adanya Aplikasi ini adalah memberikan kesamaan akses bagi seluruh Bendahara SOPD dalam penyusunan LPJ Bendahara dan Rekonsiliasi Kas.

**2. INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI**

**a) Semangat Melawan Korupsi melalui Kegiatan Internalisasi dan Eksternalisasi**



Semangat maju melawan korupsi pada Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2019 sesuai dengan tema Kementerian Keuangan yakni “Tanpa Korupsi Kementerian Keuangan Kuat, Indonesia Maju”. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah melakukan inisiatif pemberantasan korupsi dengan melaksanakan kegiatan



internalisasi berupa GKM kepada seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sekaligus penyematan pin hakordia secara simbolis sebagai tanda hwa seluruh pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo siap melawan korupsi. Selanjutnya dilakukan eksternalisasi melalui beberapa kegiatan salah satunya dengan mengadakan olah raga bersama berupa olah raga tenis lapangan dengan para aparat penegak hukum di lapangan tenis indoor Kota Gorontalo. Hal ini diharapkan dapat mendorong semua pihak untuk lebih bekerja secara profesional, bersih, dan beritikad baik dalam melakukan pengelolaan keuangan negara demi nusa dan bangsa.



### 3. PENGHARGAAN

#### a) Peringkat Pertama Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat Wilayah Terbaik Semester I Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil



Reviu Pelaksanaan Anggaran dilaksanakan setiap semester dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pada akhirnya akan berujung pada peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan belanja pemerintah. Prestasi RPA yang disusun oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo cukup membanggakan yaitu 3 kali berturut-turut di semester I tahun 2017, semester II tahun 2017 serta semester I tahun hingga 2018. Namun untuk semester II tahun 2018 mengalami

penurunan yaitu di peringkat II. Perbaikan yang berhasil dilakukan oleh tim Bidang PA I tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar anggota tim serta melakukan berbagai inovasi - inovasi baru dalam penyusunan RPA mulai dari analisis pelaksanaan anggaran, metode penelitiannya hingga desain layout yang diangkat. Dengan perubahan serta kualitas laporan yang semakin baik, di tahun 2019 Semester I Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo berhasil mendapatkan juara I kembali.

#### b) Peringkat Kedua Lomba Implementasi Pengarustamaan Gender Tingkat Kementerian Keuangan, Peringkat Pertama Lomba Implementasi Pengarustamaan Gender Unit Vertikal Tingkat Ditjen Perbendaharaan

Implementasi PUG merupakan kewajiban luhur Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai pengawal APBN di Bumi Hulondhalo. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mengimplementasikan PUG baik melalui internalisasi maupun eksternalisasi. Melalui internalisasi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berusaha mewujudkan layanan yang responsif gender dan berkeadilan, dilakukan dengan



menyediakan sarana dan prasarana yang responsif gender dan upaya-upaya menghadirkan SDM yang memiliki pemahaman tentang PUG. Tidak hanya itu, berangkat dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengawal APBN di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memperluas implementasi PUG melalui eksternalisasi. Upaya eksternalisasi dilakukan dengan mengintegrasikan PUG ke dalam setiap kegiatan tugas dan

fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo selaku pembina keuangan Kementerian/Lembaga dan selaku mitra pengelola keuangan Pemerintah Daerah. Berbagai upaya yang telah dilakukan diharapkan mampu menjadikan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai unit Kementerian Keuangan yang terus berprestasi dan ikut mengantarkan Gorontalo menjadi daerah yang mampu menyejahterakan masyarakatnya.



**c) Peringkat Kedua Penilaian Laporan Keuangan Tingkat Koordinasi Kuasa BUN Kantor Wilayah DJPb Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil**



Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga menyusun Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara Tingkat UAKKBUN Kanwil. Sesuai kaidah yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah bahwa laporan keuangan ini digunakan untuk tujuan transparansi, evaluasi kinerja keuangan dan pengambilan keputusan. Penggunaanya baik dari kalangan stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Upaya untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan dilakukan dengan melibatkan secara aktif seluruh KPPN dan

satker-satker mitra. Upaya dan kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan diakuinya kualitas laporan keuangan yang disusun. Terbukti dapat menggondol peringkat ke-2 terbaik secara nasional untuk kategori Kanwil Kecil berdasarkan KEP-273/PB/2019 tentang Penetapan Peringkat Penilaian LK Koordinator Kuasa BUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Semoga atas prestasi yang diraih ini bisa membantu mewujudkan upaya pengelolaan keuangan negara yang lebih baik pada masa kini dan yang akan datang.



**d) Peringkat Kedua Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Terbaik (LKPK-TW dan LSKP-TW) Tahun 2019 Kategori Kanwil Kecil**

Tantangan untuk terus memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Negara di sektor publik semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan aktivitas ekonomi yang semakin masif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah tidak tinggal diam dan terus melakukan inovasi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo sebagai institusi publik juga terus berbenah. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo kembali menyusun Laporan Statistik Keuangan Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 275/PMK.05/2014 tentang Manual Statistik



Keuangan Pemerintah. Upaya ini berguna untuk mewujudkan peningkatan kualitas pengelolaan Keuangan Negara yang modern dan professional, sebagaimana juga dilakukan negara maju sesuai best practices. Guna meningkatkan pemanfaatan informasi keuangan tersebut, Laporan GFS disusun secara regional agar informasinya dapat dimanfaatkan oleh Pemda, Bank Indonesia, BPS dan stakeholder lainnya. Upaya menyusun laporan ini berhasil dan diakui Kantor Pusat dengan menyabet penghargaan sebagai Terbaik Kedua secara nasional untuk Kategori Kanwil Kecil berdasarkan KEP-271/PB/2019 tentang Kriteria Penilaian dan Penetapan Hasil Penilaian LKPK-TW dan LSKP-TW Tahun 2018.

e) **Peringkat Ketiga Implementasi Pengelolaan Kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* Tahun 2019**



Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing- masing unit lingkup Ditjen Perbendaharaan, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja. Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip *Strategy Focused Organization* (SFO). Sebagai bentuk apresiasi

terhadap upaya- upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : KEP-303/PB/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Penetapan Peringkat Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2019, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menduduki peringkat ke-3 dari 34 kanwil seluruh Indonesia.

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran 2019 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo merupakan salah satu unit eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi manajemen keuangan negara, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo merupakan gabungan dari beberapa tugas dan fungsi yang beragam.

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memiliki peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memiliki peran strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memegang peran yang dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Pencapaian kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana seluruh IKU telah mencapai target yang ditentukan. Kinerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 yang dapat dinilai sebagai sebuah prestasi, antara lain: Nilai Kinerja Organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 109,36. Dari total 19 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Meksipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal, baik kinerja utama maupun kinerja-kinerja lainnya. Upaya yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran K/L melalui Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA), Spending Review, *Performance Dialogue*, dan monitoring proyeksi dan realisasi belanja

K/L;

2. Meningkatkan kualitas LKBUN dengan menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan akuntansi berkelanjutan dan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas LKPP, LKKL, dan LKBUN;
3. Mendorong Satker K/L mitra kerja KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa untuk meningkatkan kepatuhan dalam rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan;
4. Meningkatkan efektivitas pelatihan teknis perbendaharaan melalui updating materi sosialisasi sesuai perkembangan kebijakan standar dan sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku;
5. Meningkatkan kepuasan pengguna layanan dengan melakukan penyusunan updating langkah-langkah peningkatan kinerja layanan 2019;
6. Meningkatkan akurasi perencanaan kas pemerintah pusat melalui komunikasi intensif dan pelatihan berkesinambungan bagi operator perencanaan kas;
7. Meningkatkan kinerja pelaksanaan *special mission* dengan mendorong seluruh BLU menyampaikan pengesahan pendapatan kepada KPPN secara akurat dan tepat waktu;
8. Meningkatkan kualitas SDM yang *fit for purpose* melalui reassessment dan updating soal dan modul pembelajaran hard competency;
9. Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui monitoring penyelesaian tindak lanjut DAMS, survei SFO, dan survei persepsi integritas;
10. Menggiatkan pelaksanaan implementasi SAKTI tahap berikutnya pada seluruh Satker lingkup Kementerian Keuangan dan K/L lainnya;
11. Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kanwil dari sisi penyerapan anggaran, pencapaian output, efisiensi, serta konsistensi dengan rencana penarikan dana.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dan untuk seluruh jajaran Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN I :**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**



KONTRAK KINERJA  
NOMOR: 38/PB/2019



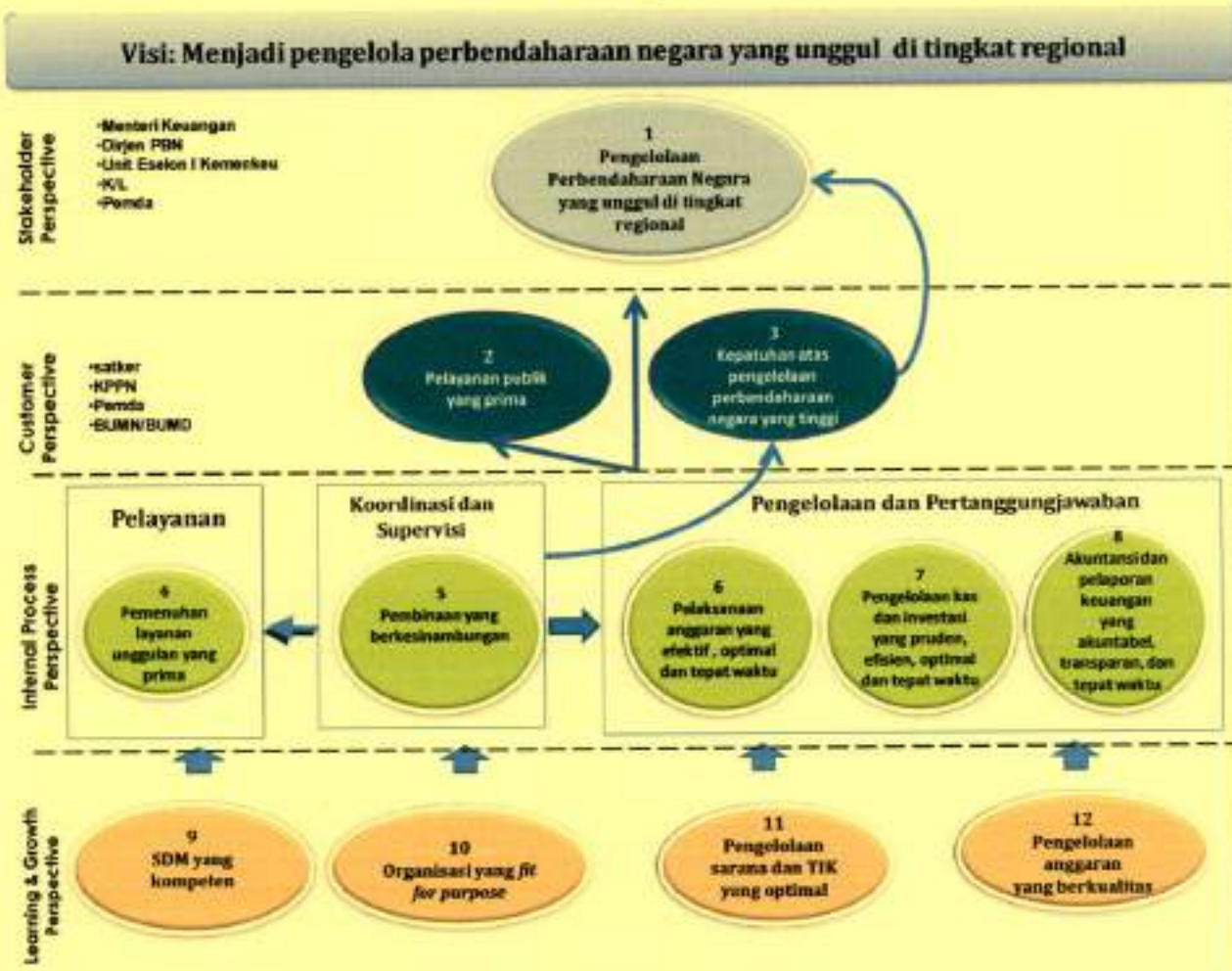
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI GORONTALO  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2019

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakuka nevaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSIGORONTALO**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88
		1b-N Nilai kualitas LaporanKajianFiskal Regional Kanwil	89
		1c-N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94
2.	Pelayanan publik yang prima	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,53 (skala 5)
3.	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	3a-CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%
4.	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a-N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%
5.	Pembinaan yang berkesinambungan	5a-N Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	88
		5b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86
		5c-N Persentase implementasi aplikasi SAKTI	95%
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu	6a-N Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	89
		6b-N Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75
7.	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	7a-N Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%
		7b-N Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	78
8.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	8a-N Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic (GFS)</i> tingkat wilayah	77
9.	SDM yang kompeten	9a-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77
10.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	10a-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83
		10b-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83

11.	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	11a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%
12.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%

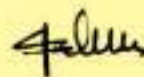
- Program/Kegiatan**
1. Pembinaan pelaksanaan perbendaharaan di wilayah

**Anggaran**  
(Rp 3.517.190.000)

Direktur Jenderal Perbendaharaan,

  
Marwanto Marjowiryono  
NIP 195906061983121001

Gorontalo, 29 Januari 2019  
Kepala Kantor Wilayah,

  
Fahma Sari Fatma  
NIP 197311041998032002



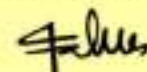
**RINCIAN TARGET KINERJA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DITJEN PERBENDAHARAAN  
PROVINSI GORONTALO  
KEMENTERIAN KEUANGAN  
TAHUN 2019**

Kode SS/IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt I	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
<b>I</b>	<b>Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional</b>							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	88	88	88	88	88	88
1b-N	Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	-	89	89	-	89	89	89
1c-N	Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	-	-	-	-	-	94	94
<b>II</b>	<b>Pelayanan publik yang prima</b>							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	-	4,53	4,53	-	4,53	-	4,53
<b>III</b>	<b>Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi</b>							
3a-CP	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%	98,1%
<b>IV</b>	<b>Pemenuhan layanan unggulan yang prima</b>							
4a-N	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>V</b>	<b>Pembinaan yangberkesinambungan</b>							
5a-N	Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan SupervisiKPPN	-	88	88	-	88	88	88
5b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	-	86	86	-	86	86	86
5c-N	Presentase tingkat implementasi aplikasi SAKTI	25%	40%	40%	70%	70%	95%	95%
<b>VI</b>	<b>Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu</b>							
6a-N	Nilai kualitas laporan reviu pelaksanaan anggaran Kanwil	-	89	89	-	89	89	89
6b-N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75	75	75	75	75	75	75

Kode SS/IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
VII	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, optimal dan tepat waktu							
7a-N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
7b-N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	-	78	78	-	78	78	78
VIII	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu							
8a-N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic (GFS)</i> tingkat wilayah	-	-	-	-	-	77	77
IX	SDM yang kompeten							
9a-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	77	77
X	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
10a-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	83	83
10b-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	83	83
XI	Pengelolaan sarana dan TIK yang optimal							
11a-N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	-	70%	70%	-	70%	92%	92%
XII	Pengelolaan anggaran yang berkualitas							
12a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%

Gorontalo, 29 Januari 2019

PNS yang dinilai,



Fahma Sari Fatma  
NIP197311041998032002



## Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Marwanto Harjowiryono	1	Nama	Fahma Sari Fatma
2	NIP	195906061983121001	2	NIP	197311041998032002
3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Utama / IVe	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Pembina Tingkat I/IVb
4	Jabatan	Direktur Jenderal	4	Jabatan	Kepala Kantor
5	Unit Kerja	Direktorat Jenderal Perbendaharaan	5	Unit Kerja	Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Gorontalo

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1	Meningkatkan nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L		88	100	12 bln	
2	Mewujudkan nilai Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil yang berkualitas		89	100	12 bln	
3	Mewujudkan nilai LK Kuasa BUN tingkat Kanwil yang berkualitas		94	100	12 bln	
4	Memenuhi kepuasan satker terhadap layanan Kanwil		4,53 (skala 5)	100	12 bln	
5	Mewujudkan rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal		98,1%	100	12 bln	
6	Mewujudkan penyelesaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker secara tepat waktu		100%	100	12 bln	
7	Mewujudkan nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN yang baik		88	100	12 bln	
8	Mewujudkan edukasi dan komunikasi yang efektif		86	100	12 bln	
9	Mewujudkan implementasi aplikasi SAKTI		95	100	12 bln	
10	Mewujudkan nilai laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil yang berkualitas		89	100	12 bln	
11	Mewujudkan rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN		75	100	12 bln	
12	Mewujudkan rencana penarikan dana satker yang akurat		90%	100	12 bln	

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS OUTPUT	KUALITAS MUTU	WAKTU	BIAYA
13	Melaksanakan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program secara berkualitas		78	100	12 bln	
14	Mewujudkan nilai Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah yang berkualitas		77	100	12 bln	
15	Mewujudkan nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai Kanwil yang baik		77	100	12 bln	
16	Memenuhi nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal		83	100	12 bln	
17	Memenuhi nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>		83	100	12 bln	
18	Mengelola BMN secara optimal		92%	100	12 bln	
19	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil		95%	100	12 bln	Rp.3.517.190.000

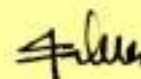
Pejabat Penilai,



★ Marwanto Harjowiryono ✧  
NIP 197906061983121001

Gorontalo, 2 Januari 2019

PNS yang dinilai,



Fahma Sari Fatma  
NIP 197311041998032002

**LAMPIRAN II :**  
**Rencana Kinerja Tahun 2019**



RENCANA KERJA TAHUNAN

2019





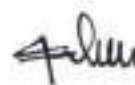
## PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun dalam rangka memberikan panduan bagi jajaran Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk melaksanakan kegiatan dalam tahun 2019. Dokumen ini memuat arah pelaksanaan dan pencapaian kebijakan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan bertolak dari Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada saat ini.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan tersebut untuk pencapaian misi dan tujuan organisasi, seluruh unit eselon III lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyusun rencana kegiatan bersama berdasarkan anggaran yang ada dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat berpola sistematis berkelanjutan dan saling bersinergi sehingga tugas pokok dan fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo berjalan dengan baik untuk pencapaian target kinerja dalam IKU, seirama dengan semakin luasnya rentang potensi dan permasalahan yang melingkupi.

Gorontalo, 29 Januari 2019  
Kepala Kanwil,



F Fahma Sari Fatma

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Kondisi Umum .....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan .....	6
<b>BAB II VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO .....</b>	<b>13</b>
2.1 Visi Unit .....	13
2.2 Misi Unit .....	13
2.3 Nilai-nilai Kementerian Keuangan .....	13
2.4 Tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gortalontalo .....	14
2.5 Peta Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo .....	15
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Target Kinerja .....	16
3.2 Kerangka Pendanaan .....	18
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>19</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam rangka memberikan panduan bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk pelaksanaan kegiatan kerja dalam tahun 2019 telah disusun Rencana Kerja Tahunan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019. Dokumen ini memuat rencana kegiatan berdasarkan anggaran dalam DIPA dan pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada saat ini.

Melalui penyusunan panduan ini diharapkan pelaksanaan kegiatan kerja tahunan Tahun 2019 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat sistematis, berkelanjutan dan saling bersinergi sehingga membuka ruang solusi yang lebih luas agar seluruh elemen pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mampu merespon perkembangan aktual yang terjadi.

### **1.1. Kondisi Umum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan dan pertanggung jawaban di bidang perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi:

1. Penelaahan dan pengesahan atas revisi dokumen pelaksanaan anggaran;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan anggaran;
3. Penyusunan reviu belanja pemerintah (spending review) dan reviu pelaksanaan anggaran;
4. Pembinaan teknis sistem akuntansi;
5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dana transfer;
6. Pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah;
7. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) ;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
9. Pembinaan dan monitoring atas investasi pemerintah, pinjaman dan kredit program di daerah;
10. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;

11. Pelaksanaan layanan bersama Kementerian Keuangan di daerah; ·
12. Pemberian pembinaan terkait dengan kewenangan dan pelaksanaan teknis perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) ;
13. Pelaksanaan manajemen mutu layanan dan koordinasi inovasi layanan;
14. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
15. Pelaksanaan kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
16. Pelaksanaan konsolidasi data Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) ;
17. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. Pelaksanaan kepatuhan internal; dan
19. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah.

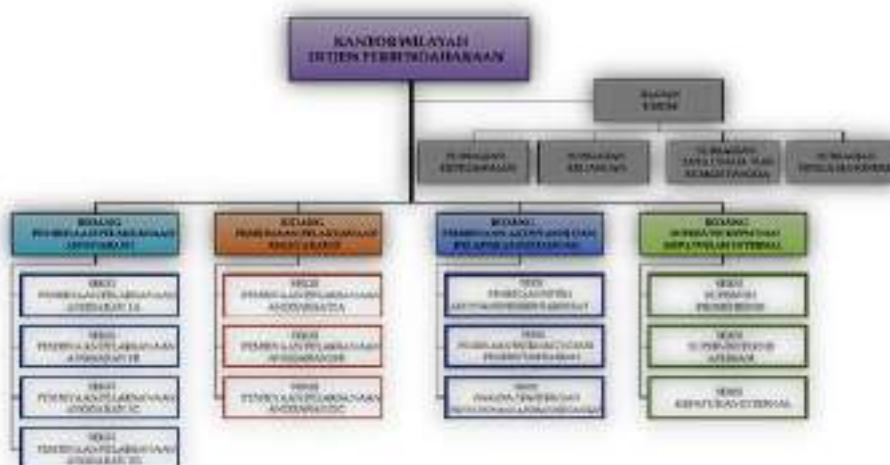
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo merupakan unit vertikal eselon II terdiri dari satu Kepala Kantor dibantu oleh 5 (lima) pejabat eselon III, yaitu Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang PPA I, Kepala Bidang PPA II, Kepala Bidang PPAK, dan Kepala Bidang SKKI.

### 1.1.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi KANWIL Gorontalo berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, adalah sebagai berikut:

1. Bagian Umum;
2. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I;
3. Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II;
4. Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; dan
5. Bidang Supervisi KANWIL dan Kepatuhan Internal. (Gambar 1.1)

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO



## 1.1.2. Profil Sumber Daya Manusia

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Jumlah SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yang berasal di seluruh Indonesia tentunya menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Pengelolaan SDM ditujukan kepada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo per 2 Januari 2019 adalah sejumlah 41 orang dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1.1  
Komposisi Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo  
menurut Eselon per 3 Januari 2019

No.	Eselon	Jumlah
1.	II.A	1
2.	III.A	4
3.	IV.A	16
4.	Pelaksana	20
<b>Jumlah Pegawai</b>		<b>41</b>

TABEL 1.1  
Komposisi SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menurut Jenjang Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah SDM
1.	Strata 2 (S2)	18 orang
2.	Sarjana (S1)/Diploma IV (D4)	9 orang
3.	Diploma III (D3)	7 orang
4.	Diploma I (D1)	3 orang
5.	SLTA	4 orang
6.	SLTP	- orang
<b>Jumlah</b>		<b>41 orang</b>

## 1.1.3. Pencapaian Kinerja

### 1.1.3.1. Fungsi Organisasi

1. Sebagai perpanjangan tangan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo menempati posisi yang strategis dalam jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan, setidaknya karena tiga alasan di bawah ini:
  - a. Merupakan wakil Direktorat Jenderal Perbendaharaan di daerah yang mengemban fungsi Kuasa BUN di Daerah;
  - b. Merupakan satu-satunya wakil Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal sehingga seluruh data, informasi dan pelaporan fiskal regional menjadi kekuatan untuk Ditjen Perbendaharaan.

c. Merupakan ujung tombak Pelayanan Ditjen Perbendaharaan kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Dengan demikian, baik atau tidaknya pelayanan yang diberikan akan berdampak langsung pada citra Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Mengingat peran strategis yang diembannya ini, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, seluruh komponen Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo harus senantiasa berorientasi dan berusaha memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, seiring dengan tuntutan masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku dan menjadi wakil Kementerian Keuangan yang mampu bersaing dengan lembaga yang lain.

2. Dalam rangka meningkatkan dan menstandarkan pelayanan kepada pemangku kepentingan, telah disusun Buku Panduan Standardisasi Sarana dan Prasarana bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Buku tersebut menjadi pedoman bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam melakukan perencanaan, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana kantor. Standardisasi sarana prasarana tersebut mencakup penerapan papan nama, pintu utama, *backdrop*, *neonsign*, serta *layout* ruangan yang meliputi *front office*, *middle office*, *back office*, serta ruangan penunjang lainnya.
3. Untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan, Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo telah meluncurkan Media Layanan Pengaduan dan Informasi melalui beberapa sarana yaitu telepon faksimile email, website dan juga melalui surat langsung ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dengan alamat tujuan Jalan Achmad Nadjamuddin Nomor 3. Pengaduan dan permintaan informasi yang diterima seluruhnya telah dapat ditindaklanjuti.
4. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengelolaan kinerja diejawantahkan melalui penyempurnaan Kemenkeu-*Wide*, Kemenkeu-*One* dan Kemenkeu-*Two*. Untuk mengefektifkan penerapan Manajemen Kinerja berbasis *Balanced Scorecard*, maka Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah melakukan upaya-upaya internalisasi dengan menyelenggarakan sosialisasi, bimtek, hingga asistensi pengelolaan IKU. Penerapan *Balanced Scorecard* di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah mencapai hingga tingkat pelaksana (Kemenkeu-*Five*) sampai dengan tahun 2019.

#### **1.1.3.2. Fungsi Sumber Daya Manusia**

Dengan SDM yang ada pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terus diupayakan peningkatan kompetensinya melalui berbagai instrumen antara lain pengusulan untuk mengikuti beberapa jenis diklat yang

sesuai dengan tuisi, sarana Gugus Kendali Mutu (GKM), *on the job training* dan sejenisnya. Hal ini bertujuan agar pengguna layanan satker mitra kerja dapat memperoleh pelayanan yang memuaskan dari pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Hal tersebut mencakup diantaranya dengan menerbitkan berbagai surat keputusan dibidang kepegawaian, hak-hak terkait pengangkatan, kepangkatan, penggajian dan pensiun, pengembangan dan pemenuhan kapasitas pegawai, khususnya *hard competency*, penyelenggaraan GKM, FGD, dan atau kegiatan lainnya dalam rangka pengembangan kapasitas internal pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.

### 1.1.3.3. Reformasi Birokrasi

Sejak Reformasi Birokrasi bergulir di Kementerian Keuangan pada tahun 2007, perubahan dan penyempurnaan kebijakan serta implementasinya telah dilakukan pada unit-unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan dan penyempurnaan tersebut dilakukan dengan diiringi efisiensi dan inovasi untuk menciptakan pelayanan publik yang modern, profesional, efektif, efisien, dan tanpa biaya. Pengelolaan perbendaharaan negara yang bersih, profesional, dan *responsive* terhadap kebutuhan pemangku kepentingan merupakan sasaran reformasi di tubuh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan secara terus menerus melakukan *self inventing* secara konsisten, berkelanjutan, dan terarah. Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan agenda utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, oleh karena itu setiap tahunnya terus diupayakan peningkatan kualitas (*continues improvement*) dalam pencapaiannya. Sedangkan pencapaian Reformasi Birokrasi di Direktorat Jenderal Perbendaharaan selama periode 2010 s.d. 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan 8 (delapan) area utama Reformasi Birokrasi yaitu :

1. Pola Pikir dan Budaya Kerja.

Dibeberapa kesempatan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah menyelenggarakan Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, sebagai satu identitas bagi semua pegawai untuk membangun budaya kerja yang kondusif dan membangun *sense of belonging* antar para pegawai dan organisasi.

2. Penerapan SOP unggulan pada layanan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo.
3. Penataan Tata laksana perbaikan proses bisnis melalui evaluasi secara periodik serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan, perbaikan penyusunan SOP dan evaluasinya, reuiu terhadap kontrak kerja dan manual IKU.

4. Penataan Sistem Manajemen SDM dengan meningkatkan disiplin pegawai, mendukung *assessment* individu pegawai, menerapkan sistem penilaian dan *database* kepegawaian untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kinerja dan kompetensi pegawai, melaksanakan pertemuan rutin (Gugus Kendali Mutu) secara intensif dengan materi yang terkait isu-isu aktual dan strategis sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dan mendukung *grand design* dan implementasi manajemen talenta.
5. Penguatan sistem pengelolaan keuangan sejak tahap perencanaan kegiatan melalui penyusunan RKA-KL yang efektif, efisien, transparan dan akuntebel; meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran melalui penerapan anggaran berbasis kinerja.
6. Menerapkan pengendalian intern secara berkelanjutan
7. Penguatan akuntabilitas pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja dan reviu terhadap pencapaian target IKU secara periodik.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik memelihara komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui sosialisasi, kunjungan kerja atas kebijakan-kebijakan terkait tugas dan fungsi kepada mitra kerja, melaksanakan survei indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan Kanwil.

#### **1.1.3.3.1. Tantangan dan hambatan reformasi birokrasi.**

Koordinasi antara unit-unit di internal maupun eksternal Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo masih perlu ditingkatkan. Untuk mengatasi hambatan ini telah dilaksanakan kegiatan koordinasi secara lebih intensif antara lain dalam bentuk *performance dialogue* secara periodik atau insidental; Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terus mendukung pemanfaatan IT yang lebih optimal dalam pengelolaan perbendaharaan. Telah dilaksanakan beberapa kegiatan untuk mengatasi hambatan ini antara lain melalui penyediaan sistem informasi keuangan yang terintegrasi yang dinamakan SPAN dimana saat ini telah dilaksanakan secara menyeluruh sejak tahun 2015, Implementasi Aplikasi SAKTI, Aplikasi SIKP untuk monitoring dan evaluasi penyaluran KUR dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) serta pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung tugas dan fungsi perbendaharaan lainnya.

### **1.2. Potensi dan Permasalahan**

#### **1.2.1. Potensi dan Permasalahan Organisasi**

##### **1.2.1.1. Potensi Organisasi**

- a. Sifat Organisasi yang bersifat Terbuka.

Kanwil adalah sebuah organisasi yang terbuka dan dinamis, saling bersinergi antar unit yang ada di dalamnya sehingga apabila suatu seksi



dari organisasi mengalami gangguan, maka akan berpengaruh kepada seksi lainnya dan mungkin juga kepada seluruh sistem organisasi. Sebagai suatu organisasi terbuka, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal seperti teknologi, ekonomi, undang-undang, dan faktor sosial kemasyarakatan. Dalam hal teknologi, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual.

b. *Learning Organization*.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo terus menjadi *learning organization* yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, kemitraan, inovatif, konsisten, dan akuntabel. Sebagai sebuah *learning organization*, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dalam melaksanakan tugas sehari-hari senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki *role model* dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi. Semangat pembelajaran terlihat pada sistem Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, dimana seorang yang baru mengikuti diklat wajib membagi pengetahuan yang dimilikinya untuk menghidupkan situasi pembelajaran yang saling berbagi pengetahuan dan saling melengkapi kekurangan dalam organisasi. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo juga terus berusaha agar setiap pegawai menjadi ahli dalam bidang pekerjaannya. Hal tersebut tercermin dari sistem *assessment* yang menguji pemahaman pegawai mengenai bidang pekerjaannya. Selain itu juga diupayakan pelaksanaan mutasi internal untuk memperkaya keahlian dan menghindari kejenuhan.

c. Berkembang mempertajam fungsi *Treasury*.

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, fungsi-fungsi *treasury* akan berkembang untuk mengikuti tuntutan pemangku kepentingan. Konsep keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. Bila dikupas satu persatu, keterpaduan ini mencakup tiga jenjang, yaitu :

- 1) Aspek filosofis, mulai dari visi yang dijabarkan jadi misi hingga dirumuskan menjadi sasaran Kanwil Gorontalo yang jadi pedoman semua fungsi dalam organisasi;
- 2) Keterkaitan kerja antar fungsi, misalnya SDM, penelitian dan pengembangan, manajemen kas, pelaksanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan;
- 3) Keterpaduan atau integrasi berbagai fungsi, bertujuan untuk mewujudkan tiga hal, yaitu konsistensi untuk meraih reputasi yang diharapkan, memelihara interaksi sehingga terjalin ikatan hubungan yang kokoh dan menerapkan tuisi berbasis misi untuk memenuhi tuntutan pemangku kepentingan.

### **1.2.1.2. Permasalahan Organisasi**

#### **1. Perubahan Struktur Organisasi**

Fungsi *treasury* tersebar di beberapa unit eselon I, dimana fungsi perencanaan anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran, fungsi pengelolaan asset/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan fungsi pengelolaan utang pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Hal ini menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan struktur (reorganisasi), dimana reorganisasi juga membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Di sisi lain, dengan adanya keterbatasan regulasi dalam melakukan reorganisasi, penyesuaian struktur organisasi harus didesain sedemikian rupa agar tetap mampu mengejawantahkan dan mengakomodasi kebutuhan organisasi sekian tahun kedepan.

#### **2. Keterbatasan Sumber Pendanaan**

Dalam rangka mewujudkan visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo, telah disusun berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit-unit lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo di masa mendatang. Namun demikian Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo memiliki tantangan untuk mewujudkan berbagai kegiatan tersebut secara efektif dengan penggunaan seluruh sumber daya yang dimiliki organisasi secara efisien, termasuk sumber daya pendanaan yang terbatas jumlahnya.

### **1.2.2. Potensi dan Permasalahan Manajemen Sumber Daya Manusia**

#### **1.2.2.1. Potensi Manajemen Sumber Daya Manusia**

Keterbatasan pegawai pada unit kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo diimbangi dengan semangat kerja yang tinggi pada dasarnya memiliki potensi yang cukup untuk dapat dioptimalkan dalam menjawab tantangan dan tuntutan serta peran organisasi. Hal tersebut didukung dengan semakin banyaknya kesempatan bagi setiap pegawai

untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi yang dimilikinya, sehingga dapat disesuaikan dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh organisasi. Disamping itu, sistem insentif, kompensasi dan reward juga semakin baik dan mengarah pada azas keadilan berdasarkan merit *system*. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi pegawai untuk bermalasan dan tidak berkontribusi bagi organisasi. Komposisi pegawai saat ini sebenarnya cukup dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi setiap unit kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo. Adanya kerja sama dengan berbagai pihak terkait, dukungan teknologi, studi/kajian ilmiah dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan/difasilitasi oleh organisasi secara tidak langsung telah semakin meningkatkan kapasitas pegawai, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kontribusi pegawai dalam melakukan analisis maupun penyelesaian tugas teknis dan strategis yang ada pada setiap unit kerja.

#### **1.2.2.2. Permasalahan Manajemen Sumber Daya Manusia**

1. Masalah di bidang manajemen SDM yang paling krusial dirasakan adalah tidak meratanya pembagian beban kerja pegawai pada setiap unit kerja, sehingga terdapat ketergantungan yang besar pada segelintir pegawai saja. Selain itu, secara umum dapat dilihat bahwa kompetensi yang dimiliki pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan oleh masing-masing jabatan, artinya masih terdapat *gap* yang harus ditutup melalui berbagai metode pengembangan kompetensi yang memungkinkan.
2. Selain itu, adanya kenyataan bahwa mayoritas pegawai berasal dari daerah di luar Provinsi Gorontalo. Kondisi ini jika tidak disikapi secara bijak, dapat berpotensi menurunkan motivasi dan etos kerja pegawai. Permasalahan lain yang perlu mendapat prioritas penyelesaian adalah kepatuhan pegawai pada aturan disiplin dan kode etik pegawai, baik menyangkut kehadiran, keberadaan ditempat tugas, maupun kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan sebagai PNS.

#### **1.2.3. Potensi dan Permasalahan Pelaksanaan Anggaran**

##### **1.2.3.1. Potensi Pelaksanaan Anggaran**

- a. Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Penyaluran Belanja

Teknis pelaksanaan anggaran yaitu ketatalaksanaan penyaluran belanja memberikan dampak yang signifikan pada kualitas belanja pemerintah. Rendahnya tingkat penyerapan belanja yang terjadi dari tahun ke tahun yang berdampak pada penumpukan penyaluran dana di akhir tahun anggaran sering menjadi sorotan publik dan menimbulkan apriori terhadap kinerja Kementerian Keuangan (secara umum), dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (secara khusus). Beberapa penyempurnaan

kebijakan pelaksanaan anggaran telah diambil. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo beserta KPPN telah secara aktif melakukan sosialisasi, pendampingan dan sejenisnya namun hal tersebut belum mampu merubah perilaku K/L dalam penyerapan anggarannya sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan.

b. Peningkatan Kualitas Penggunaan Belanja

Sesuai dengan isu terkait belum efektifnya *implementasi Performance Base Budgeting* di lapangan, dapat dipahami bahwa penggunaan belanja belum sepenuhnya optimal. Belanja masih berdasar *input-based* dan belum menghubungkannya dengan *output-based*. Hal ini sangat disayangkan, mengingat sebagai negara berkembang, Indonesia masih mempunyai keterbatasan *fiscal space* dan mempunyai banyak agenda program prioritas. Perencanaan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme *bottom-up*, dan diputuskan di level nasional. Pelaksanaan anggaran, sebagai lanjutan tahapan perencanaan dapat memotret pelaksanaan belanja di lapangan sebagai implementasi dari rencana-rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, dari potret tersebut, dapat dihasilkan informasi-informasi yang signifikan untuk evaluasi belanja pemerintah dan dapat digunakan sebagai perbaikan anggaran di Tahun Anggaran berikutnya. Hal tersebut penting dilaksanakan mengingat masing-masing tahapan siklus APBN saling berpengaruh dan bersinergi. Pengukuran kinerja satker dan K/L dalam menggunakan belanjanya belum begitu banyak disentuh. Perlu adanya mekanisme evaluasi atas penggunaan belanja yang tidak hanya bermanfaat untuk pelaksanaan anggaran tetapi juga dapat menjadi bahan masukan penting perencanaan anggaran periode selanjutnya. Sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mempunyai *resource* yang cukup penting dalam dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penggunaan belanja. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mempunyai informasi lengkap dan *up-to-date* dalam besaran realisasi belanja, beserta dengan *progress* yang terjadi baik perkembangan pelaksanaan anggaran dan hambatan dilapangan. Sebagai unit yang paling dekat dan berhadapan langsung dengan satker dan K/L, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo mempunyai kedudukan yang strategis dalam kebijakan fiskal belanja, terutama ikut serta dalam penyusunan kebijakan perubahan kebijakan belanja untuk merespon perkembangan pelaksanaan anggaran dan perubahan kebutuhan masyarakat. Belum fleksibelnya mekanisme perubahan (pengurangan/penambahan) alokasi belanja menghambat optimalisasi penggunaan alokasi belanja. Kebijakan pelaksanaan

anggaran perlu didorong untuk memfasilitasi fleksibilitas belanja, sehingga atas belanja yang tidak diperlukan/tidak akan dilaksanakan K/L dapat segera direalokasikan secara cepat untuk belanja lain yang lebih bermanfaat.

Melalui reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan mekanisme pembinaan pelaksanaan anggaran, Kanwil berusaha untuk mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan anggaran dan menindaklanjutinya dengan usaha-usaha dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Melalui RPA, kualitas pelaksanaan anggaran diukur dari sisi operasionalisasi/teknis, kendala yang dihadapi, pencapaian target, pemenuhan tujuan dan dampak yang diharapkan. Rekomendasi kebijakan dan strategi implementasi diharapkan membantu penyelesaian kendala yang dihadapi. Pembinaan, dari sisi yang lain, dilaksanakan dan dimonitor secara terus-menerus untuk menindaklanjuti kendala sisi ketatalaksanaan yang dihadapi. Pada akhirnya, peningkatan kualitas ini akan serta merta mendorong percepatan realisasi, menyelesaikan permasalahan menumpuknya penyaluran dana pada akhir tahun anggaran dan rendahnya tingkat penyerapan belanja yang selama ini terjadi.

Monev Pelaksanaan Anggaran mempunyai potensi yang besar dalam peningkatan kualitas belanja pemerintah. Diperlukan usaha yang besar dari segenap pihak untuk dalam melaksanakan monev Pelaksanaan Anggaran secara optimal.

### **1.2.3.2. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran**

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo untuk tahun anggaran 2019 sebagai Kuasa BUN di Daerah mengelola 283 DIPA dengan nilai Rp. 2.736.859.399.000,- dan sebagai satker mengelola anggaran sebesar Rp. 3.517.190.000,-. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran seperti sebagaimana diuraikan, dimana adanya perubahan nomenklatur kementerian, telah mengakibatkan adanya perubahan struktur organisasi dan para pejabat pemangku jabatan. Hal ini memerlukan waktu, baik dalam penetapan maupun eksekusi kegiatan. Permasalahan pada tataran pelaksanaan adalah proses pengadaan barang dan jasa terutama pada belanja modal. Proses lelang yang mengalami gagal lelang dan harus diulang cukup memakan waktu sampai sebuah kegiatan fisik dapat terlaksana.

### **1.2.4. Potensi dan Permasalahan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

#### **1.2.4.1. Potensi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

- a. Komitmen Pimpinan yang sangat mendukung untuk terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan dan tepat waktu

merupakan modal utama yang selanjutnya akan memacu semangat aparat dibawahnya untuk mewujudkan laporan keuangan tersebut.

- b. Diberlakukannya SPAN dengan *single integrated database system* yang sangat membantu dalam keakuratan dan kecepatan proses data laporan keuangan.
- c. Tercukupinya sarana dan prasarana untuk meningkatkan kompetensi SDM penyusun laporan keuangan dengan diterbitkannya peraturan-peraturan yang lengkap dan dapat diakses secara umum, kegiatan-kegiatan terkait pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan seperti rapat koordinasi, rapat kerja nasional, kegiatan PPAKP dan diklat-diklat lain yang akan sangat mendukung peningkatan kemampuan SDM penyusun laporan keuangan.

#### **1.2.4.2. Permasalahan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan**

- a. Kemampuan SDM satker penyusun laporan keuangan yang kurang memadai;
- b. Aplikasi SAKTI yang masih dalam penyempurnaan dan masih belum diimplementasikan ke seluruh K/L;
- c. Mengingat sistem akuntansi akrual diimplementasikan secara penuh pada tahun 2015, masih terdapat banyak permasalahan pada aplikasi SPAN dan SAIBA sebagai sistem pengelolaan keuangan berbasis akrual.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

#### **2.1. Visi**

Dengan melibatkan seluruh pejabat dan pegawai, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo telah menetapkan visi organisasi yang disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh. Visi ini dapat mengartikulasi organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi treasury, dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh pejabat/pegawai dengan mudah sekaligus menginspirasi sehingga mampu diimplementasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik. Mengacu pada Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka Visi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo adalah:

**"Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di regional"**

**Pengelola perbendaharaan** negara artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

**Unggul** memiliki makna utama atau terbaik dalam kualitas kinerja.

**Di tingkat regional** artinya kualitas kinerja yang dihasilkan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dapat menjadikan rujukan bagi pengelolaan perbendaharaan negara oleh unit-unit lain di tingkat wilayah.

#### **2.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Ditjen Perbendaharaan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang meliputi:

1. Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal;
2. Mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif dan optimal;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
4. Mewujudkan pelayanan yang prima;
5. Mewujudkan instansi vertikal yang berkesinambungan.

#### **2.3 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan**

##### **1. Integritas**

Dalam Integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Perilaku utama integritas:



- a. Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; dan
- b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

## **2. Profesionalisme**

Dalam Profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Perilaku utama profesionalisme yaitu: memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas, dan bekerja dengan hati.

## **3. Sinergi**

Dalam Sinergi terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Perilaku utama sinergi memiliki sangka baik, saling percaya, menghormati, dan menemukan serta melaksanakan solusi terbaik.

## **4. Pelayanan**

Dalam Pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Perilaku utama pelayanan:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; dan
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

## **5. Kesempurnaan**

Dalam Kesempurnaan terkandung makna bahwa pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Perilaku utama kesempurnaan:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus; dan
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

### **2.4. Tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo**

Tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 difokuskan untuk mewujudkan fungsi perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan *best practices*, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah dan kualitas serta kepuasan layanan kepada satuan kerja. Tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo yaitu:

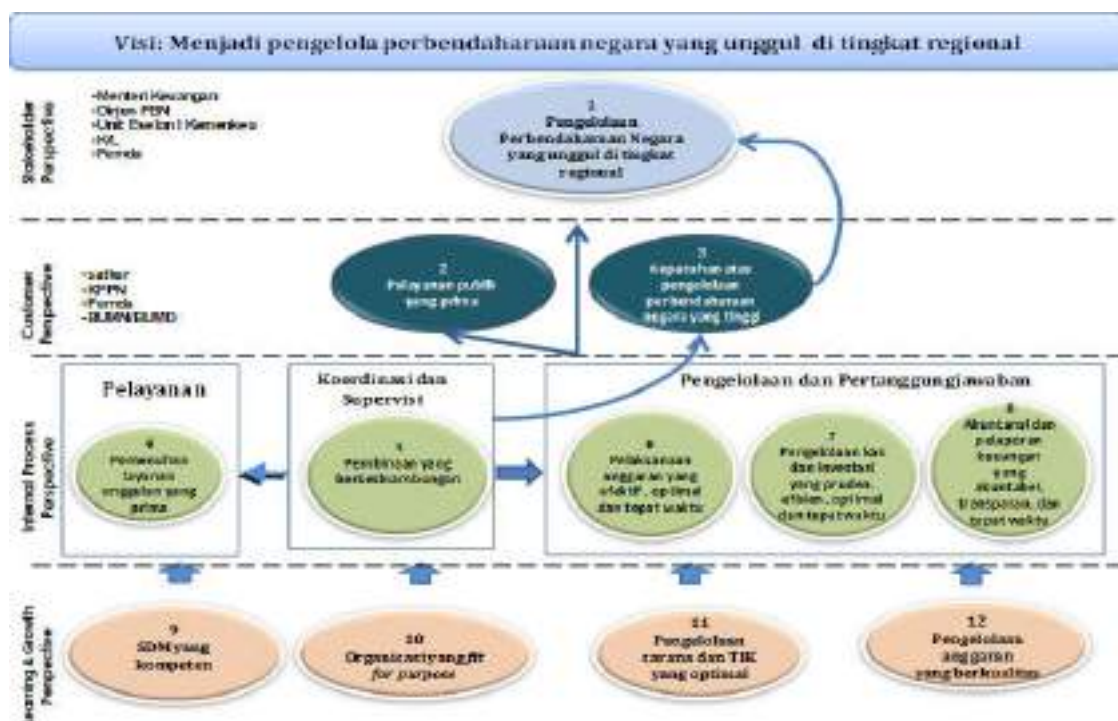
1. Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan negara yang unggul di tingkat regional;



2. Tercapainya pelayanan publik yang prima;
3. Tercapainya kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi;
4. Terwujudnya layanan unggulan yang prima;
5. Terwujudnya Pembinaan yang berkesinambungan;
6. Terciptanya fungsi Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal, dan tepat waktu;
7. Terwujudnya Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal;
8. Terwujudnya Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu;
9. Terwujudnya SDM yang kompetitif;
10. Terciptanya Organisasi yang fit for purpose;
11. Terwujudnya Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal;
12. Terwujudnya Pengelolaan anggaran yang optimal.

## 2.5. Peta Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan yang terarah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo menetapkan Peta Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2019, dimana peta strategi tahun 2019 merupakan salah satu *milestone* dari beberapa sasaran strategis yang hendak dicapai di tahun 2015-2019. Peta Strategi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2019 adalah sebagai berikut :



## BAB III RENCANA KERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 3.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo, telah disusun rencana kegiatan berdasarkan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Two* Kepala Kanwil, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada tahun 2019, dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel 3.1

Sasaran Program. Indikator Kinerja Utama, Target IKU dan Rencana Kegiatan Tahun 2019

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019	Rencana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengelola Perbendaharaan Negara yang unggul di tingkat regional	1a- CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	88	a. FGD Kinerja Pelaksanaan Anggaran b. Pemberian apresiasi kepada satker berkinerja terbaik melalui Kegiatan <i>Treasury Awards</i>
		1b- N Nilai kualitas Laporan Kajian Fiskal Regional Kanwil	89	FGD mengenai penyusunan Kajian Fiskal Regional dengan mengundang Dit. PA, BI dan BPS
		1c- N Nilai kualitas LK BUN tingkat Kanwil	94	a. Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 b. Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2019
2.	Pelayanan publik yang prima	2a- N Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,53 (skala 5)	FGD terkait PMK dan Perdirjen Perbendaharaan terkait revisi dan Aplikasi RKAKL
3.	Kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi	3a- CP Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%	Monev secara <i>on the spot</i> ke satker-satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi melalui pembentukan tim saber recon
4.	Pemenuhan layanan unggulan yang prima	4a- N Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%	FGD terkait PMK dan Perdirjen Perbendaharaan terkait revisi dan Aplikasi RKAKL
5.	Pembinaan yang berkesinambungan	5a- N Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	88	a. Membentuk tim pembinaan lintas bidang/bagian yang terdiri atas pegawai yang menguasai materi sesuai dengan unsur-unsur pembinaan KPPN b. Analisa atas hasil pembinaan kepada KPPN dan finalisasi LHPS
		5b- N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86	Kegiatan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (Bidang PAPK) dan FGD Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bidang PPA I)
		5c- N Persentase implementasi aplikasi SAKTI	95%	Optimalisasi FGD SAKTI dan publikasi SAKTI

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2019	Rencana Kegiatan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif, optimal dan tepat waktu	6a- N	Nilai kualitas laporan reuiu pelaksanaan anggaran Kanwil	89	a. Melaksanakan <i>knowledge sharing</i> mengenai metode penelitian dengan akademisi b. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi Pembinaan BLU
		6b- N	Rata-rata nilai kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada KPPN	75	a. FGD Dana Desa TA 2019 b. Monev dana transfer ke Pemerintah Daerah
7.	Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal	7a- N	Persentase akurasi rencana penarikan dana satker	90%	Monev secara <i>on the spot</i> ke satker-satker yang rencana penarikan danayanya belum optimal
		7b- N	Indeks kualitas pelaksanaan pembinaan dan monitoring pinjaman dan kredit program	78	a. Monitoring dan evaluasi pembiayaan Ultra Mikro (UMi) b. Koordinasi dengan Dit. SMI untuk penyempurnaan aplikasi SIKP
8.	Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu	8a- N	Nilai kualitas Laporan <i>Government Finance Statistic</i> (GFS) tingkat wilayah	77	a. Melakukan pendampingan penyusunan LKPD ke Pemda b. Melakukan pendampingan ke BKAD terkait temuan-temuan BPK c. Menyelenggarakan sosialisasi GFS dengan melibatkan semua Pemda di lingkup Kanwil Gorontalo dengan mengundang Narasumber dari Dit. APK d. Mengundang pemda untuk rapat dalam penyusunan LKPD Konsolidasian.
9.	SDM yang kompeten	9a- N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	77	Update materi <i>Digital Library</i> dan Pelaksanaan GKM terkait tuisi dan peraturan perbendaharaan/proses bisnis terkini.
10.	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	10a- N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	83	a. Rapat penyusunan profil risiko tahun 2019 b. Rapat evaluasi pelaksanaan tugas Kepatuhan internal dan manajemen Risiko setiap triwulan
		10b- N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	83	a. DKO capaian IKU Kemenkeu- <i>Two-Three</i> bulanan dan triwulanan; b. Monev Pengelolaan Kinerja ke KPPN; c. GKM penyampaian hasil Rakornas Pengelolaan Kinerja Tahun 2019.
11.	Pengelolaan Sarana dan TIK yang optimal	11a- N	Persentase pengelolaan BMN yang optimal	92%	Melakukan identifikasi Aset yang belum memenuhi standard
12.	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a- -CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%	a. Melakukan koordinasi dengan Bidang PPA I atau Ditjen Anggaran apabila terdapat usulan revisi DIPA b. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran TA 2019 sekaligus evaluasi dan revisi anggaran dan melakukan efisiensi

## 2.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo membutuhkan sumber pendanaan untuk membiayai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, indikasi kebutuhan dana tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2  
Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Tahun 2019

No	Output	Kebutuhan Pendanaan
<b>Kegiatan: Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara (015.08.09.1706)</b>		
1	Layanan Pelaksanaan Kuasa BUN di Daerah (1706.003)	145.242.000
2	Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN (1706.009)	461.868.000
3	Layanan Internal ((1706.951)	11.040.000
4	Layanan Perkantoran (1706.994)	2.899.040.000
<b>Jumlah</b>		<b>3.517.190.000</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo Tahun 2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo dengan mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo tahun 2015-2019, Inisiatif Strategis Transformasi Kelembagaan, Dokumen Kebijakan Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta cara pandang terhadap realitas organisasi kekinian dan kemajuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo di masa mendatang.

Keberhasilan dalam merealisasikan visi dan misi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan mewujudkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi dan kepatuhan atas pengelolaan perbendaharaan negara yang tinggi, mewujudkan pemenuhan layanan unggulan yang prima, penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara yang andal dan akurat, manajemen satker yang berkesinambungan, dan akuntansi pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu, serta mewujudkan SDM yang kompeten, Organisasi yang kondusif, pengelolaan sarana dan TIK yang optimal, dan pengelolaan anggaran yang berkualitas.

Pencapaian tujuan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui pelaksanaan serangkaian tugas pokok dan strategi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Kementerian Keuangan dalam kerangka Program Budaya Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo didukung dengan kerangka regulasi, dan kelembagaan. Guna mewujudkan pencapaian kinerja secara optimal maka disusun target kinerja untuk periode tahun 2019 dan didukung dengan kerangka pendanaan sebagai indikasi alokasi anggaran seluruh kegiatan.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman seluruh pejabat/pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo pada saat pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2019. Mengingat dokumen Rencana Kerja Tahunan merupakan sebuah *living document* dan dalam rangka mendukung implementasi Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka penyesuaian atas Rencana Kerja Tahunan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Gorontalo ini masih perlu dilakukan.

LAMPIRAN:  
MATRIKS RENCANA KERJA  
TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019





MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019  
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI GORONTALO

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	INISIATIF STRATEGIS	ACTION PLAN /KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	Q1			Q2			Q3			Q4			RENCANA ANGGARAN
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	Indeks kepuasan satker terhadap layanan Kanwil	4,53		FGD terkait PMK dan Perdirjen Perbendaharaan terkait revisi dan Aplikasi RKAKL	<p><i>Output</i> : Terselenggaranya Kegiatan FGD terkait PMK dan Perdirjen Perbendaharaan terkait revisi dan Aplikasi RKAKL.</p> <p><i>Outcome</i> : Pemahaman petugas FO terhadap peraturan revisi dan teknis Aplikasi RKAKL lebih meningkat sehingga akan mempengaruhi kepuasan satker dalam menerima layanan menjadi lebih optimal.</p>													Rp 12.000.000
5	Persentase rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal	98,1%		Monev secara <i>on the spot</i> ke satker-satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi melalui pembentukan tim saber rekon	<p><i>Output</i> : Terselenggaranya Kegiatan monev oleh tim saber rekon kepada satker yang belum melakukan rekonsiliasi</p> <p><i>Outcome</i> : Seluruh satuan kerja dapat melakukan rekonsiliasi sesuai batas waktu dan ketentuan yang berlaku.</p>													Rp 12.000.000
6	Persentase revisi dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang diselesaikan tepat waktu	100%		FGD terkait PMK dan Perdirjen Perbendaharaan terkait revisi dan Aplikasi RKAKL	<p><i>Output</i> : Terselenggaranya Kegiatan FGD terkait PMK dan Perdirjen Perbendaharaan terkait revisi dan Aplikasi RKAKL.</p> <p><i>Outcome</i> : Pemahaman petugas FO terhadap peraturan revisi dan teknis Aplikasi RKAKL akan mempercepat proses revisi.</p>													Rp 12.000.000
7	Rata-rata nilai Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN	88		Membentuk tim pembinaan lintas bidang/bagian yang terdiri atas pegawai yang menguasai materi sesuai dengan unsur-unsur pembinaan KPPN serta melakukan analisa atas hasil pembinaan kepada KPPN dan finalisasi LHPS	<p><i>Output</i> : Terbentuknya tim pembinaan lintas bidang/bagian yang terdiri atas pegawai yang menguasai materi sesuai dengan unsur-unsur pembinaan KPPN.</p> <p><i>Outcome</i> : Memudahkan proses analisa atas hasil pembinaan kepada KPPN dan finalisasi LHPS.</p>													Rp 32.500.000
8	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	86		a. Kegiatan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (Bidang PAPPK)	<p><i>Output</i> : Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Teknis pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (Bidang PAPPK) dan FGD Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bidang PPA I).</p>													Rp 30.000.000
				b. FGD Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Bidang PPA I)	<p><i>Outcome</i> : Satuan kerja dapat memahami tata cara penyusunan laporan keuangan K/L Tahun 2018 berbasis akrual serta memahami ketentuan terkait pelaksanaan anggaran.</p>													






MATRIKS RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019  
KANTOR WILAYAH DJPB PROVINSI GORONTALO

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUNAN	INISIATIF STRATEGIS	ACTION PLAN /KEGIATAN	OUTPUT/OUTCOME	Q1			Q2			Q3			Q4			RENCANA ANGGARAN	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
19	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kanwil	95%		a. Melakukan koordinasi dengan Bidang PPA I atau Ditjen Anggaran apabila terdapat usulan revisi DIPA	Output : Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan monitoring pelaksanaan anggaran TA 2019 sekaligus evaluasi dan revisi anggaran dan melakukan efisiensi.														-
				b. Melakukan monitoring pelaksanaan anggaran TA 2019 sekaligus evaluasi dan revisi anggaran dan melakukan efisiensi	Outcome : Kualitas pelaksanaan anggaran kanwil dapat terealisasi secara optimal..														

Keterangan :

- Penanggung Jawab Kegiatan Bagian Umum
- Penanggung Jawab Kegiatan Bidang PPA I
- Penanggung Jawab Kegiatan Bidang PPA II
- Penanggung Jawab Kegiatan Bidang PAPK
- Penanggung Jawab Kegiatan Bidang SKKI

Mengetahui  
Kepala Kanwil,

  
Fahma Sari Fatma

# **LAMPIRAN III :**

**Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2019**

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 1 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>3,815,166,000</b>	<b>3,463,883,112</b>	<b>344,443,822</b>	<b>3,808,326,934</b>	<b>99.82 %</b>	<b>6,839,066</b>
09 Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara	3,815,166,000	3,463,883,112	344,443,822	3,808,326,934	99.82 %	6,839,066
09.1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	3,815,166,000	3,463,883,112	344,443,822	3,808,326,934	99.82 %	6,839,066
003 Laporan Keuangan BUN Tingkat Wilayah dan Statistik Tingkat Wilayah	142,102,000	138,950,676	3,147,750	142,098,426	100.00	3,574
003.001 LK BUN Tingkat Wilayah	79,145,000	75,995,357	3,147,750	79,143,107	100.00	1,893
051 Konsultasi, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis	67,980,000	65,328,107	2,650,000	67,978,107	100.00	1,893
051.A Pendampingan Penyusunan dan Penyelesaian Permasalahan Laporan Keuangan UAPPAW dan BLU	9,314,000	9,313,250	0	9,313,250	99.99 %	750
521211 Belanja Bahan	9,314,000	9,313,250	0	9,313,250	99.99 %	750
1. Konsumsi	9,314,000	9,313,250	0	9,313,250	99.99 %	750
051.B Sosialisasi dan Bimbingan Teknis UAPPAW	10,073,000	10,073,000	0	10,073,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	10,073,000	10,073,000	0	10,073,000	100.00	0
1. ATK dan Supplies Komputer serta konsumsi peserta	10,073,000	10,073,000	0	10,073,000	100.00	0
051.C Pembinaan UAKBUN D (KPPN)	32,690,000	30,040,000	2,650,000	32,690,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	26,090,000	23,890,000	2,200,000	26,090,000	100.00	0
1. Transport	26,090,000	23,890,000	2,200,000	26,090,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,600,000	6,150,000	450,000	6,600,000	100.00	0
1. Transport Lokal	6,600,000	6,150,000	450,000	6,600,000	100.00	0
051.D Koordinasi UAKBUND (KPPN)	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. Konsumsi Peserta	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
051.E Konsultasi ke Pusat	15,902,000	15,901,857	0	15,901,857	100.00	143
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,902,000	15,901,857	0	15,901,857	100.00	143
1. Konsultasi ke Kantor Pusat	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Transport	15,902,000	15,901,857	0	15,901,857	100.00	143
052 Penyusunan LK Kuasa BUN Tingkat Wilayah	8,265,000	7,767,250	497,750	8,265,000	100.00	0
052.A TANPA SUB KOMPONEN	8,265,000	7,767,250	497,750	8,265,000	100.00	0

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 2 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
521211 Belanja Bahan	8,265,000	7,767,250	497,750	8,265,000	100.00	0
1. ATK dan Supplies Komputer serta penggandaan	8,265,000	7,767,250	497,750	8,265,000	100.00	0
<b>053 Analisis Hasil Telaahan Laporan UAPPAW, UAKBUN Daerah, dan LK BLU</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>0</b>	<b>2,900,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
053.A TANPA SUB KOMPONEN	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	100.00	0
1. ATK dan Bahan Habis Pakai	2,900,000	2,900,000	0	2,900,000	100.00	0
<b>003.002 Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah</b>	<b>62,957,000</b>	<b>62,955,319</b>	<b>0</b>	<b>62,955,319</b>	<b>100.00</b>	<b>1,681</b>
<b>051 Koordinasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</b>	<b>28,227,000</b>	<b>28,226,219</b>	<b>0</b>	<b>28,226,219</b>	<b>100.00</b>	<b>781</b>
051.A TANPA SUB KOMPONEN	28,227,000	28,226,219	0	28,226,219	100.00	781
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27,177,000	27,176,219	0	27,176,219	100.00	781
1. Transport	27,177,000	27,176,219	0	27,176,219	100.00	781
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
1. Transport Lokal	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
<b>052 Pembinaan SAP pada Pemerintah Daerah</b>	<b>10,990,000</b>	<b>10,990,000</b>	<b>0</b>	<b>10,990,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
052.A TANPA SUB KOMPONEN	10,990,000	10,990,000	0	10,990,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10,390,000	10,390,000	0	10,390,000	100.00	0
1. Transport	10,390,000	10,390,000	0	10,390,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
1. Transport Lokal	600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
<b>053 Penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah</b>	<b>1,992,000</b>	<b>1,991,100</b>	<b>0</b>	<b>1,991,100</b>	<b>99.95 %</b>	<b>900</b>
053.A TANPA SUB KOMPONEN	1,992,000	1,991,100	0	1,991,100	99.95 %	900
521211 Belanja Bahan	1,992,000	1,991,100	0	1,991,100	99.95 %	900
1. DokumentasiPenggandaanLaminasi	1,992,000	1,991,100	0	1,991,100	99.95 %	900
<b>054 Sosialisasi Workshop Diseminasi Bimtek FGD</b>	<b>21,748,000</b>	<b>21,748,000</b>	<b>0</b>	<b>21,748,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
054.A TANPA SUB KOMPONEN	21,748,000	21,748,000	0	21,748,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	21,748,000	21,748,000	0	21,748,000	100.00	0



## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 3 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
1. ATK dan Supplies Komputer serta konsumsi peserta	21,748,000	21,748,000	0	21,748,000	100.00	0
<b>009 Layanan Pembinaan Perbendaharaan di Wilayah</b>	<b>450,814,000</b>	<b>410,508,814</b>	<b>39,472,200</b>	<b>449,981,014</b>	<b>99.82 %</b>	<b>832,986</b>
<b>009.001 Layanan Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal</b>	<b>120,446,000</b>	<b>110,602,772</b>	<b>9,692,200</b>	<b>120,294,972</b>	<b>99.87 %</b>	<b>151,028</b>
<b>051 Pelaksanaan Supervisi Teknis Aplikasi, Proses Bisnis dan Kepatuhan Internal</b>	<b>88,074,000</b>	<b>85,801,697</b>	<b>2,250,000</b>	<b>88,051,697</b>	<b>99.97 %</b>	<b>22,303</b>
051.A Pelaksanaan Supervisi Teknis Aplikasi	16,600,000	16,580,000	0	16,580,000	99.88 %	20,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,850,000	9,830,000	0	9,830,000	99.80 %	20,000
1. Transport	9,850,000	9,830,000	0	9,830,000	99.80 %	20,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000	100.00	0
1. Transport Lokal	6,750,000	6,750,000	0	6,750,000	100.00	0
051.B Pelaksanaan Supervisi Proses Bisnis KPPN	52,340,000	50,540,000	1,800,000	52,340,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,990,000	29,990,000	0	29,990,000	100.00	0
1. Transport	29,990,000	29,990,000	0	29,990,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	22,350,000	20,550,000	1,800,000	22,350,000	100.00	0
1. Transport Lokal	22,350,000	20,550,000	1,800,000	22,350,000	100.00	0
051.C Pemantauan Kode Etik dan Kepatuhan Pegawai	19,133,000	18,681,697	450,000	19,131,697	99.99 %	1,303
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15,532,000	15,531,697	0	15,531,697	100.00	303
1. Transport	15,532,000	15,531,697	0	15,531,697	100.00	303
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,601,000	3,150,000	450,000	3,600,000	99.97 %	1,000
1. Transport Lokal	3,601,000	3,150,000	450,000	3,600,000	99.97 %	1,000
051.D Pemantauan Pengendalian Intern Pengujian Kepatuhan dan Penyusunan Laporan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. ATK dan bahan habis pakai	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
<b>052 Pembinaan Pengelolaan Tehnologi Informasi, Rekening Pemerintah, Inovasi Layanan dan TMR</b>	<b>12,671,000</b>	<b>8,155,500</b>	<b>4,470,000</b>	<b>12,625,500</b>	<b>99.64 %</b>	<b>45,500</b>
052.A Peningkatan Kompetensi Treasury Management Representative (TMR)	3,056,000	3,055,500	0	3,055,500	99.98 %	500
521211 Belanja Bahan	3,056,000	3,055,500	0	3,055,500	99.98 %	500
1. Konsumsi Rapat FGD dan ATK	3,056,000	3,055,500	0	3,055,500	99.98 %	500

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 4 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
052.B Peningkatan Kapasitas Teknologi Informasi Komunikasi Pegawai	8,865,000	5,100,000	3,720,000	8,820,000	99.49 %	45,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	870,000	0	870,000	870,000	100.00	0
1. Transport	870,000	0	870,000	870,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,995,000	5,100,000	2,850,000	7,950,000	99.44 %	45,000
1. Transport Lokal	7,995,000	5,100,000	2,850,000	7,950,000	99.44 %	45,000
052.C Uji Petik Kepatuhan BankPos Persepsi	750,000	0	750,000	750,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	0	750,000	750,000	100.00	0
1. Transport Lokal	750,000	0	750,000	750,000	100.00	0
<b>053 Monitoring dan Evaluasi Standar Tata Kelola dan Perbaikan Proses Bisnis</b>	<b>19,701,000</b>	<b>16,645,575</b>	<b>2,972,200</b>	<b>19,617,775</b>	<b>99.58 %</b>	<b>83,225</b>
053.A Monitoring dan Evaluasi Implementasi ISO	3,510,000	3,510,000	0	3,510,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,910,000	2,910,000	0	2,910,000	100.00	0
1. Transport	2,910,000	2,910,000	0	2,910,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
1. Transport Lokal	600,000	600,000	0	600,000	100.00	0
053.B Monitoring Akselerasi Zona Integritas WBKWBBM	451,000	450,000	0	450,000	99.78 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. Transport	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	450,000	450,000	0	450,000	100.00	0
1. Transport Lokal	450,000	450,000	0	450,000	100.00	0
053.C Pelaksanaan Manajemen Risiko	7,215,000	5,062,075	2,072,200	7,134,275	98.88 %	80,725
521211 Belanja Bahan	7,215,000	5,062,075	2,072,200	7,134,275	98.88 %	80,725
1. ATK dan bahan habis pakai serta konsumsi peserta	7,215,000	5,062,075	2,072,200	7,134,275	98.88 %	80,725
053.D Monev Tindak Lanjut Penyelesaian LHP, Pulbaket dan Pendampingan Saksi	901,000	0	900,000	900,000	99.89 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. Transport	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	900,000	100.00	0

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 5 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
1. Transport Lokal	900,000	0	900,000	900,000	100.00	0
053.E Evaluasi dan Perbaiki Proses Bisnis serta Penyusunan Laporan	7,624,000	7,623,500	0	7,623,500	99.99 %	500
521211 Belanja Bahan	7,624,000	7,623,500	0	7,623,500	99.99 %	500
1. ATK dan bahan habis pakai serta konsumsi rapat	7,624,000	7,623,500	0	7,623,500	99.99 %	500
<b>009.002 Layanan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Pusat</b>	<b>214,228,000</b>	<b>203,751,742</b>	<b>10,030,000</b>	<b>213,781,742</b>	<b>99.79 %</b>	<b>446,258</b>
<b>051 Pelayanan Pelaksanaan Anggaran Pusat</b>	<b>64,060,000</b>	<b>64,053,865</b>	<b>0</b>	<b>64,053,865</b>	<b>99.99 %</b>	<b>6,135</b>
051.A Penyerahan DIPA	58,306,000	58,303,865	0	58,303,865	100.00	2,135
521211 Belanja Bahan	45,704,000	45,703,865	0	45,703,865	100.00	135
1. Pelaksanaan Penyerahan DIPA	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan Supplies Komputer serta konsumsi peserta	45,704,000	45,703,865	0	45,703,865	100.00	135
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. Panitia Kegiatan (Pemprov)	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
522141 Belanja Sewa	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. Sewa Peralatan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
522151 Belanja Jasa Profesi	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000	100.00	0
1. Honor Narasumber (Gubernur)	9,900,000	9,900,000	0	9,900,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
1. Transport Lokal Panitia	2,700,000	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
051.B Penyelesaian Pengesahan Revisi DIPA	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. ATK dan supplies komputer	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
051.C Pelaksanaan Survei Bahan Sumbangan Standar Biaya Masukan	2,301,000	2,300,000	0	2,300,000	99.96 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. ATK dan supplies komputer	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0
1. Perjalanan Dinas Dalam Rangka Penyusunan Standar Biaya Masukan	1,100,000	1,100,000	0	1,100,000	100.00	0

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 6 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
1. Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
051.D Monitoring dan Evaluasi PNB	3,451,000	3,450,000	0	3,450,000	99.97 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. Forum Komunikasi Satker PNB	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	100.00	0
1. Pembinaan Satker PNB	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,450,000	3,450,000	0	3,450,000	100.00	0
051.E Pengelolaan Register Hibah	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. ATK dan supplies komputer	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
<b>052 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Pusat</b>	<b>139,435,000</b>	<b>130,702,800</b>	<b>8,330,000</b>	<b>139,032,800</b>	<b>99.71 %</b>	<b>402,200</b>
052.A Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	14,792,000	14,792,000	0	14,792,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	14,792,000	14,792,000	0	14,792,000	100.00	0
1. Pelaksanaan FGD	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer	14,792,000	14,792,000	0	14,792,000	100.00	0
052.B Koordinasi Daerah Pelaksanaan Anggaran	32,045,000	32,044,300	0	32,044,300	100.00	700
521211 Belanja Bahan	32,045,000	32,044,300	0	32,044,300	100.00	700
1. Pelaksanaan Sosialisasi	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer dan konsumsi	32,045,000	32,044,300	0	32,044,300	100.00	700
052.C Pelaksanaan pembinaan Satuan Kerja BLU	9,380,000	5,680,000	3,700,000	9,380,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,930,000	4,030,000	1,900,000	5,930,000	100.00	0
1. Pembinaan Satker BLU Luar Kota	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Transport	5,930,000	4,030,000	1,900,000	5,930,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,450,000	1,650,000	1,800,000	3,450,000	100.00	0

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 7 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
1. Pembinaan Satker BLU Dalam Kota	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,450,000	1,650,000	1,800,000	3,450,000	100.00	0
052.D Pelaksanaan Pembinaan Terkait PeraturanKebijakan Pelaksanaan Anggaran	44,097,000	44,096,500	0	44,096,500	100.00	500
521211 Belanja Bahan	44,097,000	44,096,500	0	44,096,500	100.00	500
1. ATK dan supplies komputer dan konsumsi	44,097,000	44,096,500	0	44,096,500	100.00	500
052.E Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	38,370,000	33,340,000	4,630,000	37,970,000	98.96 %	400,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29,220,000	26,440,000	2,680,000	29,120,000	99.66 %	100,000
1. Transport	29,220,000	26,440,000	2,680,000	29,120,000	99.66 %	100,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,150,000	6,900,000	1,950,000	8,850,000	96.72 %	300,000
1. Transport Lokal	9,150,000	6,900,000	1,950,000	8,850,000	96.72 %	300,000
052.F Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kas	751,000	750,000	0	750,000	99.87 %	1,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. Transport	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	750,000	750,000	0	750,000	100.00	0
1. Transport Lokal	750,000	750,000	0	750,000	100.00	0
<b>053 Analisis Pelaksanaan Anggaran Pusat</b>	<b>10,733,000</b>	<b>8,995,077</b>	<b>1,700,000</b>	<b>10,695,077</b>	<b>99.65 %</b>	<b>37,923</b>
053.A Pelaksanaan Spending Review	5,630,000	5,630,000	0	5,630,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	5,630,000	5,630,000	0	5,630,000	100.00	0
1. Pelaksanaan FGD, Sosialisasi dan Penyusunan Laporan	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer serta konsumsi	5,630,000	5,630,000	0	5,630,000	100.00	0
053.B Reviu Pelaksanaan Anggaran	5,103,000	3,365,077	1,700,000	5,065,077	99.26 %	37,923
521211 Belanja Bahan	5,103,000	3,365,077	1,700,000	5,065,077	99.26 %	37,923
1. Pelaksanaan FGD	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer	5,103,000	3,365,077	1,700,000	5,065,077	99.26 %	37,923
<b>009.003 Layanan Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah</b>	<b>116,140,000</b>	<b>96,154,300</b>	<b>19,750,000</b>	<b>115,904,300</b>	<b>99.80 %</b>	<b>235,700</b>
<b>051 Penyediaan Informasi Anggaran Daerah</b>	<b>49,095,000</b>	<b>41,370,300</b>	<b>7,560,000</b>	<b>48,930,300</b>	<b>99.66 %</b>	<b>164,700</b>

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 8 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
051.A Penyediaan Informasi Fiskal Regional	33,943,000	26,218,500	7,560,000	33,778,500	99.52 %	164,500
521211 Belanja Bahan	16,429,000	16,428,500	0	16,428,500	100.00	500
1. ATK dan supplies komputer	16,429,000	16,428,500	0	16,428,500	100.00	500
522151 Belanja Jasa Profesi	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
1. Honor narasumber (Regional Economisteksternal)	2,800,000	2,800,000	0	2,800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,464,000	1,740,000	7,560,000	9,300,000	98.27 %	164,000
1. Transport	9,464,000	1,740,000	7,560,000	9,300,000	98.27 %	164,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,250,000	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
1. Transport Lokal	5,250,000	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
051.B PenyediaanKonfirmasi Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bimtek Keuangan Daerah	14,108,000	14,107,800	0	14,107,800	100.00	200
521211 Belanja Bahan	668,000	667,800	0	667,800	99.97 %	200
1. ATK dan supplies komputer	668,000	667,800	0	667,800	99.97 %	200
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,490,000	8,490,000	0	8,490,000	100.00	0
1. Perjalanan Dinas Luar Kota (Pemda Luar Kota)	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Transport	8,490,000	8,490,000	0	8,490,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	100.00	0
1. Transport Lokal	4,950,000	4,950,000	0	4,950,000	100.00	0
051.C Pengkoordinasian Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah	1,044,000	1,044,000	0	1,044,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	144,000	144,000	0	144,000	100.00	0
1. Pelaksanaan RapatDiseminasiSosialisasi	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer serta konsumsi peserta	144,000	144,000	0	144,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	900,000	900,000	0	900,000	100.00	0
1. Honor Narasumber (Regional EconomistEksternal)	900,000	900,000	0	900,000	100.00	0
<b>052 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Daerah</b>	<b>21,623,000</b>	<b>21,623,000</b>	<b>0</b>	<b>21,623,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
052.A Pelaksanaan Kajian Fiskal Regional	2,565,000	2,565,000	0	2,565,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,565,000	2,565,000	0	2,565,000	100.00	0

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 9 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
1. Pelaksanaan FGD dan Sosialisasi	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer	2,565,000	2,565,000	0	2,565,000	100.00	0
052.B Pelaksanaan FGDSosialisasi Profil Keuangan Daerah	988,000	988,000	0	988,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	988,000	988,000	0	988,000	100.00	0
1. Pelaksanaan FGD dan Sosialisasi	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer	988,000	988,000	0	988,000	100.00	0
052.C Pembinaan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah	13,480,000	13,480,000	0	13,480,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	13,480,000	13,480,000	0	13,480,000	100.00	0
1. Pelaksanaan FGD dan Sosialisasi	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer	13,480,000	13,480,000	0	13,480,000	100.00	0
052.D Asistensi Pengelolaan Keuangan BLU Daerah	4,590,000	4,590,000	0	4,590,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	4,590,000	4,590,000	0	4,590,000	100.00	0
1. Pelaksanaan Forkom BLUD	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer	4,590,000	4,590,000	0	4,590,000	100.00	0
<b>053 Pembinaan dan Monitoring atas Investasi Pemerintah, Pinjaman, dan Kredit Program</b>	<b>29,571,000</b>	<b>23,401,000</b>	<b>6,170,000</b>	<b>29,571,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
053.A Bimtek pelaksanaan kredit program	10,281,000	10,281,000	0	10,281,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	10,281,000	10,281,000	0	10,281,000	100.00	0
1. ATK dan supplies komputer	10,281,000	10,281,000	0	10,281,000	100.00	0
053.B Monitoring dan Evaluasi Kredit Program	19,290,000	13,120,000	6,170,000	19,290,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,690,000	7,720,000	4,970,000	12,690,000	100.00	0
1. Transport	12,690,000	7,720,000	4,970,000	12,690,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,600,000	5,400,000	1,200,000	6,600,000	100.00	0
1. Transport Lokal	6,600,000	5,400,000	1,200,000	6,600,000	100.00	0
<b>054 Monitoring atas Dana Transfer dan Dana Desa</b>	<b>15,850,000</b>	<b>9,760,000</b>	<b>6,020,000</b>	<b>15,780,000</b>	<b>99.56 %</b>	<b>70,000</b>
054.A TANPA SUB KOMPONEN	15,850,000	9,760,000	6,020,000	15,780,000	99.56 %	70,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,650,000	9,760,000	4,820,000	14,580,000	99.52 %	70,000



## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 10 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
1. Perjalanan Dinas ke Pemda Luar Kota	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Transport	14,650,000	9,760,000	4,820,000	14,580,000	99.52 %	70,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	100.00	0
1. Transport Lokal	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	100.00	0
<b>055 Konsolidasi Data Perhitungan Fihak Ketiga dan Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>	<b>1,000</b>
055.A TANPA SUB KOMPONEN	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
1. Pelaksanaan FGD	0	0	0	0	0.00 %	0
2. ATK dan supplies komputer	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
<b>951 Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>319,388,000</b>	<b>319,385,300</b>	<b>0</b>	<b>319,385,300</b>	<b>100.00</b>	<b>2,700</b>
<b>951.001 Tanpa Sub Output</b>	<b>319,388,000</b>	<b>319,385,300</b>	<b>0</b>	<b>319,385,300</b>	<b>100.00</b>	<b>2,700</b>
<b>997 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>224,538,000</b>	<b>224,535,300</b>	<b>0</b>	<b>224,535,300</b>	<b>100.00</b>	<b>2,700</b>
997.A TANPA SUB KOMPONEN	224,538,000	224,535,300	0	224,535,300	100.00	2,700
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	224,538,000	224,535,300	0	224,535,300	100.00	2,700
1. Pengadaan Inventaris Pegawai Baru	4,985,000	4,984,500	0	4,984,500	99.99 %	500
2. Penggantian Inventaris Pegawai Lama	5,600,000	5,598,000	0	5,598,000	99.96 %	2,000
3. KomputerLEC Touchsreen	12,042,000	12,042,000	0	12,042,000	100.00	0
4. Sofa Front Office	15,000,000	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
5. AC standing, AC Split, Dispenser, Kulkas Ruang Laktasi	28,490,000	28,490,000	0	28,490,000	100.00	0
6. Meja Lobby	1,340,000	1,340,000	0	1,340,000	100.00	0
7. Paket Pengadaan Workstation pada Middle Office	120,000,000	120,000,000	0	120,000,000	100.00	0
8. Sofa Laktasi	9,438,000	9,438,000	0	9,438,000	100.00	0
9. Kursi Metal	23,243,000	23,242,800	0	23,242,800	100.00	200
10. Televisi	4,400,000	4,400,000	0	4,400,000	100.00	0
<b>998 Pembangunan Renovasi Gedung dan Bangunan</b>	<b>94,850,000</b>	<b>94,850,000</b>	<b>0</b>	<b>94,850,000</b>	<b>100.00</b>	<b>0</b>
998.A TANPA SUB KOMPONEN	94,850,000	94,850,000	0	94,850,000	100.00	0

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 11 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	94,850,000	94,850,000	0	94,850,000	100.00	0
1. Renovasi Interior Front Office	49,850,000	49,850,000	0	49,850,000	100.00	0
2. Renovasi Toilet Wanita dan Ruang Poliklinik	45,000,000	45,000,000	0	45,000,000	100.00	0
<b>994 Layanan Perkantoran</b>	<b>2,902,862,000</b>	<b>2,595,038,322</b>	<b>301,823,872</b>	<b>2,896,862,194</b>	<b>99.79 %</b>	<b>5,999,806</b>
<b>994.001 Tanpa Sub Output</b>	<b>2,902,862,000</b>	<b>2,595,038,322</b>	<b>301,823,872</b>	<b>2,896,862,194</b>	<b>99.79 %</b>	<b>5,999,806</b>
<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>	<b>581,784,000</b>	<b>486,064,000</b>	<b>89,821,000</b>	<b>575,885,000</b>	<b>98.99 %</b>	<b>5,899,000</b>
001.A Pembayaran Gaji dan Tunjangan	581,784,000	486,064,000	89,821,000	575,885,000	98.99 %	5,899,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	313,489,000	258,696,000	48,918,000	307,614,000	98.13 %	5,875,000
1. Uang Makan PNS Gol. II, III dan IV	313,489,000	258,696,000	48,918,000	307,614,000	98.13 %	5,875,000
512211 Belanja Uang Lembur	268,295,000	227,368,000	40,903,000	268,271,000	99.99 %	24,000
1. Uang Lembur dan Makan Lembur Gol. II, III dan IV	268,295,000	227,368,000	40,903,000	268,271,000	99.99 %	24,000
<b>002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran</b>	<b>2,321,078,000</b>	<b>2,108,974,322</b>	<b>212,002,872</b>	<b>2,320,977,194</b>	<b>100.00</b>	<b>100,806</b>
002.A Keperluan Sehari-hari Perkantoran	539,110,000	472,266,487	66,834,775	539,101,262	100.00	8,738
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	432,154,000	367,427,390	64,719,275	432,146,665	100.00	7,335
1. Keperluan Sehari-hari Perkantoran	82,519,000	71,548,140	10,963,725	82,511,865	99.99 %	7,135
2. Kertas Berharga/Materai	4,146,000	3,903,000	243,000	4,146,000	100.00	0
3. Honorarium dan Lembur PPNPN	0	0	0	0	0.00 %	0
4. Honor Satpam, Sopir dan Pramubakti	311,494,000	265,296,250	46,197,550	311,493,800	100.00	200
5. Uang Lembur dan Makan Lembur Satpam, Supir, dan Pramubhakti	33,995,000	26,680,000	7,315,000	33,995,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	46,959,000	44,842,582	2,115,500	46,958,082	100.00	918
1. Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi dan Kearsipan	46,959,000	44,842,582	2,115,500	46,958,082	100.00	918
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	59,997,000	59,996,515	0	59,996,515	100.00	485
1. ATK dan Supplies Komputer	59,997,000	59,996,515	0	59,996,515	100.00	485
002.B Langganan Daya dan Jasa	263,884,000	238,316,514	25,565,825	263,882,339	100.00	1,661
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,182,000	19,702,000	4,480,000	24,182,000	100.00	0
1. Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan	24,182,000	19,702,000	4,480,000	24,182,000	100.00	0

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 12 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
522111 Belanja Langganan Listrik	184,835,000	169,002,019	15,832,088	184,834,107	100.00	893
1. Listrik	184,835,000	169,002,019	15,832,088	184,834,107	100.00	893
522112 Belanja Langganan Telepon	34,503,000	31,733,895	2,768,537	34,502,432	100.00	568
1. Telepon	34,503,000	31,733,895	2,768,537	34,502,432	100.00	568
522113 Belanja Langganan Air	20,364,000	17,878,600	2,485,200	20,363,800	100.00	200
1. Air	20,364,000	17,878,600	2,485,200	20,363,800	100.00	200
002.C Pemeliharaan Perkantoran	756,351,000	716,049,649	40,280,869	756,330,518	100.00	20,482
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	389,671,000	371,562,127	18,095,250	389,657,377	100.00	13,623
1. Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat	366,756,000	348,660,452	18,095,250	366,755,702	100.00	298
2. Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat	4,906,000	4,894,375	0	4,894,375	99.76 %	11,625
3. Pemeliharaan Halaman Kantor	18,009,000	18,007,300	0	18,007,300	99.99 %	1,700
523119 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	30,884,000	30,883,325	0	30,883,325	100.00	675
1. Pemeliharaan Rumah Jabatan	25,678,000	25,677,325	0	25,677,325	100.00	675
2. Pemeliharaan Halaman Rumah Jabatan	5,206,000	5,206,000	0	5,206,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	222,471,000	200,279,197	22,185,619	222,464,816	100.00	6,184
1. Kendaraan Pejabat Eselon II	17,181,000	12,848,220	4,332,000	17,180,220	100.00	780
2. Kendaraan Roda 4	85,525,000	82,028,650	3,495,750	85,524,400	100.00	600
3. Kendaraan Roda 2	6,219,000	1,593,507	4,624,800	6,218,307	99.99 %	693
4. Inventaris Kantor	30,680,000	29,681,513	997,997	30,679,510	100.00	490
5. Personal ComputerNotebook	27,303,000	25,509,531	1,792,500	27,302,031	100.00	969
6. Printer	8,330,000	8,329,800	0	8,329,800	100.00	200
7. AC SplitWindowStanding Floor	35,380,000	29,237,500	6,142,500	35,380,000	100.00	0
8. Faksimili	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
9. Mesin Fotocopy	100,000	100,000	0	100,000	100.00	0
10. UPS	225,000	225,000	0	225,000	100.00	0
11. Tabung Pemadam Api	6,351,000	6,350,400	0	6,350,400	99.99 %	600

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 13 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
12. Genset	5,176,000	4,375,076	800,072	5,175,148	99.98 %	852
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	113,325,000	113,325,000	0	113,325,000	100.00	0
1. Persediaan BBM	113,325,000	113,325,000	0	113,325,000	100.00	0
002.D Pelaksanaan Operasional Kantor	761,733,000	682,341,672	79,321,403	761,663,075	99.99 %	69,925
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	108,600,000	90,500,000	18,100,000	108,600,000	100.00	0
1. Honorarium Pengelola Keuangan	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Honor Pengelola Keuangan	94,200,000	78,500,000	15,700,000	94,200,000	100.00	0
3. Honorarium Tim SAI	0	0	0	0	0.00 %	0
4. Honor Tim SAI	14,400,000	12,000,000	2,400,000	14,400,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	318,709,000	307,128,878	11,515,200	318,644,078	99.98 %	64,922
1. Obatobatan dan Dokter	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Obatobatan	2,212,000	2,211,705	0	2,211,705	99.99 %	295
3. Dokter	11,000,000	8,000,000	3,000,000	11,000,000	100.00	0
4. Peningkatan Kebugaran	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
5. Seragam	0	0	0	0	0.00 %	0
6. Seragam Pegawai	24,080,000	24,080,000	0	24,080,000	100.00	0
7. Seragam Satpam	6,868,000	6,867,800	0	6,867,800	100.00	200
8. Seragam SupirPramubhakti	1,487,000	1,486,240	0	1,486,240	99.95 %	760
9. Penyelenggaraan GKMJamuan TamuPelantikanAkhir Tahun	0	0	0	0	0.00 %	0
10. Konsumsi Penerimaan TamuPenyelenggaraan RapatGKM	165,096,000	156,523,838	8,515,200	165,039,038	99.97 %	56,962
11. Pelantikan Eselon IV dan III	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
12. Penyelesaian LHP dan SAI	0	0	0	0	0.00 %	0
13. Penyelesaian LHP dan SAI	6,025,000	6,025,000	0	6,025,000	100.00	0
14. Kesekretariatan Perwakilan Kemenkeu	0	0	0	0	0.00 %	0
15. Biaya Kesekretariatan Perwakilan Kemenkeu	28,890,000	28,889,970	0	28,889,970	100.00	30

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 14 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
16. Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW Pengelolaan Kinerja KUDAMSLAKIP dan ABK	0	0	0	0	0.00 %	0
17. Konsumsi dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPAW	1,591,000	1,590,500	0	1,590,500	99.97 %	500
18. Konsumsi dalam rangka Penyusunan Pengelolaan Kinerja	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
19. Pengelolaan IKUDAMSLAKIP dan ABK	4,055,000	4,054,500	0	4,054,500	99.99 %	500
20. Biaya Kehumasan	0	0	0	0	0.00 %	0
21. Biaya Kehumasan	18,391,000	18,390,725	0	18,390,725	100.00	275
22. Kegiatan HORI Perwakilan Kemenkeu TA 2019	45,833,000	45,832,400	0	45,832,400	100.00	600
23. Penyelesaian RKAKL	0	0	0	0	0.00 %	0
24. Penyelesaian RKAKL	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
25. Peningkatan Kualitas SDM	0	0	0	0	0.00 %	0
26. Konsumsi	177,000	176,200	0	176,200	99.55 %	800
27. Barang habis pakai	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
521211 Belanja Bahan	120,628,000	79,984,800	40,642,903	120,627,703	100.00	297
1. ATK dan Bahan Habis Pakai Pelaksanaan Rapat	24,655,000	24,655,000	0	24,655,000	100.00	0
2. ATK dan Bahan Habis Pakai dalam rangka Rakorwil tahun 2019	95,973,000	55,329,800	40,642,903	95,972,703	100.00	297
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	14,800,000	11,800,000	3,000,000	14,800,000	100.00	0
1. Honor Pejabat PBJ dan Pejabat Pemeriksa Penerima BJ	13,200,000	11,000,000	2,200,000	13,200,000	100.00	0
2. Honorarium Rohaniawan dalam rangka pelantikan	1,600,000	800,000	800,000	1,600,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000	100.00	0
1. Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM	11,200,000	11,200,000	0	11,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	174,292,000	170,177,994	4,113,300	174,291,294	100.00	706
1. Konsultasi ke Pusat, Koordinasi dan Pembinaan serta Penyusunan Laporan	0	0	0	0	0.00 %	0
2. Transport	112,282,000	108,167,994	4,113,300	112,281,294	100.00	706
3. Perjalanan Dinas dalam rakorwil semester I tahun 2019	62,010,000	62,010,000	0	62,010,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13,500,000	11,550,000	1,950,000	13,500,000	100.00	0

## LAPORAN REALISASI DETAIL TA 2019

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;  
Periode Desember 2019

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN**  
**Satuan Kerja : 648741 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO**

Hal 15 dari 15

Uraian	Pagu Revisi	Realisasi TA 2019				SISA ANGGARAN
		Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode Ini	%	
1. Transport lokal	13,500,000	11,550,000	1,950,000	13,500,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,000	0	0	0	0.00 %	4,000
1. Pelaksanaan SosialisasiWorkshopDiseminasi Kanwil DJPb	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
2. Peningkatan Kualitas SDM	0	0	0	0	0.00 %	0
3. Paket Meeting Pegawai Kanwil	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
4. Uang Saku	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000
5. Transport	1,000	0	0	0	0.00 %	1,000